

**MENGARTIKULASI PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG MAJEMUK:
SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS**



**Disusun Oleh:
Bartolomeus Samho, SS., M.Pd.
Rudi Setiawan, S.Ag., M.M**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2015**

DAFTAR ISI

JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II METODE PENELITIAN	12
BAB III JADWAL PELAKSANAAN	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
Sub Bab 1	
PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA	16
3.1 Pengantar	16
3.2 Perspektif Pancasila	17
3.3 Pengertian Spiritualitas	28
3.4 Perspektif Pancasila Menjadi Spiritualitas	28
3.5 Makna Pancasila Menjadi Spiritualitas	57
3.6 Penutup	59
Sub Bab 2:	
PANDANGAN BEBERAPA TOKOH TENTANG PANCASILA	60
2.1 Pengantar	60
2.2 Pandangan Beberapa Tokoh	60
2.3 Penutup	76
Sub Bab 3:	
SIGNIFIKANSI DAN RELEVANSI PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS	
BANGSA INDONESIA	77
3.1 Pengantar	77
3.2 Signifikansi Pancasila Menjadi Spiritualitas Indonesia	78
3.3 Relevansi Pancasila Menjadi Spiritualitas	81
3.4 Penutup	89
BAB V KESIMPULAN	90
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini telah sejak dahulu disadari oleh para pendiri bangsa dan menjadi ciri khas masyarakat di Indonesia. Para pendiri bangsa tentu berharap agar pluralitas yang sungguh real di Indonesia itu kelak tetap terpelihara dalam kondisi yang utuh. Dalam rangka mewujudkan harapan itu, mereka merumuskan suatu semangat hidup bersama. Rumusan yang dimaksudkan bersumber pada elemen-elemen yang ada dalam jiwa Indonesia.¹ Rumusan itulah yang menjadi ruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bersumber dari “keutamaan hidup” (*virtue*) bangsa Indonesia. Ia adalah inti atau kristalisasi kultur bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai spiritual. Sebagai demikian, Pancasila patut menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai vital yang terkandung di dalamnya menjadi kekuatan dalam proses “menjadi Indonesia”. Berangkat dari penalaran di atas, penelitian ini hendak kami fokuskan pada klaim bahwa Pancasila adalah spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, gerak atau orientasi kehidupan bangsa Indonesia yang ideal dalam tatanan real adalah dijiwai dan dihidupi oleh nilai-nilai dasar Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, spiritualitas, Indonesia, pluralisme, pluralitas, kebhinnekaan,

¹ Soekarno, 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta, Media Pressindo, hlm. 108.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia ini yang pernah mengalami kejahnya penjajahan. Pengalaman antikemanusiaan akibat penjajahan Belanda dan Jepang menjadi inti permenungan para pendiri bangsa ini dalam merumuskan *azaz* kehidupan yang menjadi ruh kehidupan bangsa Indonesia. Titik sentuh permenungan dalam Pancasila adalah pentingnya mewujudkan kondisi hidup yang saling menghormati antar sesama manusia dan mencegah terjadinya situasi dehumanistik. Apakah yang diperlukan agar hal itu terjadi?

Dalam konteks penjajahan, tentu kemerdekaan adalah dambaan sebuah bangsa yang dijajah. Kemerdekaan sebagai bangsa adalah kata kunci bagi perwujudan kondisi hidup yang manusiawi. Kemerdekaan sebagai bangsa juga menentukan identitas sebagai bangsa. Bangsa yang merdeka memiliki martabat dan hak-hak yang setara dengan bangsa lain dan dihormati dalam pergaulan internasional.

Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Muatan nilai-nilainya mengutarakan gelora jiwa bangsa Indonesia yang cinta merdeka sehingga berpotensi untuk mencegah terulangnya situasi dehumanistik di alam kemerdekaan. Jadi, Pancasila itu mempribadi atau terbenam di dalam jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu, kata Sukarno, adalah kepribadian yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimanakah kepribadian bangsa Indonesia itu?

Menurut Sukarno, kepribadian Indonesia yang terjelma di dalam dasar Pancasila itu berupa cinta merdeka. Cinta merdeka itu artinya tidak mau dijadikan budak orang lain. Cinta merdeka juga berarti menghormati kemerdekaan orang lain. Kepribadian yang cinta merdeka itu membuat bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan semua manusia, semua bangsa, dan semua Negara di dunia ini.² Jadi, spirit Pancasila adalah cinta merdeka yang mewujud dalam perikemanusiaan. Maka implementasi Pancasila dalam praksis mestilah menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang implikasinya memerdekakan manusia sebagai manusia.

² *Ibid.*, hlm. 68.

Dimensi spiritual dalam Pancasila terletak pada dayanya yang mempersatukan keanekaragaman di Indonesia. Daya yang mempersatukan itu adalah cinta merdeka dan menghormati kemerdekaan orang lain. Cinta merdeka itulah yang menghidupkan paham kebangsaan Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Cinta merdeka itu merupakan ekspresi rasa kemanusiaan sejati yang menjwai setiap manusia di Indonesia untuk menghormati keunikan dan perbedaan yang sungguh real di Indonesia. Cinta merdeka juga menginspirasi bangsa Indonesia untuk menghormati hak-hak bangsa lain.

Intinya, Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi 'hari kelahiran' Pancasila adalah menegaskan kepribadian Indonesia yang sesungguhnya, yakni cinta merdeka. Itulah yang menjadi dasar-dasar Indonesia merdeka. Cinta merdeka adalah spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Sejak pidato Sukarno itu dikumandangkan, Pancasila telah menjadi azas dan semangat kehidupan bersama bangsa Indonesia. Tujuan pidato Sukarno selain untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat mengenai dasar Negara, juga untuk meyakinkan para pendiri bangsa yang menghadiri rapat BPUPKI pada waktu itu bahwa bangsa Indonesia pada saat yang tepat layak merdeka karena telah memiliki kepribadian bangsa yang bersumber dari keutamaan hidup para leluhur bangsa Indonesia, yakni cinta merdeka.

Dengan kata lain, muatan utuh dari pidato itu adalah tekad Sukarno yang bulat, semangatnya yang menggelora, dan komitmennya yang kukuh untuk menunjukkan bahwa cinta merdeka adalah alasan utama sebuah bangsa berjuang melawan penjajahan. Cinta merdeka itulah ruh yang mempersatukan paham kebangsaan dan fakta pluralitas di Indonesia. Memang ada banyak hal yang dapat dijadikan sarana atau alasan untuk membangun persatuan di Indonesia, misalnya, pengalaman pahit akan situasi penjajahan Belanda dan Jepang yang tidak manusiawi, bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, peraturan dan adat istiadat, bendera, mata uang, dll. Akan tetapi, para pendiri bangsa merasa bahwa bangsa Indonesia memerlukan semacam kebangkitan kesadaran akan pentingnya menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk itu, membangun rasa cinta merdeka itu dipandang tepat pada situasi penjajahan. Spirit cinta merdeka itu mampu mengikat, mempererat, mengutuhkan, dan membangkitkan semangat persatuan di tengah keanekaragaman di Indonesia. Jadi, cinta merdeka adalah hakekat makna dan spirit yang menjwai Pancasila. Itulah yang mendasari Negara Indonesia.

Mengapa perlu diangkat tema ini? Dalam rangka pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, perlu sebuah perspektif baru terhadap Pancasila. Perspektif baru yang dimaksudkan adalah yang menunjukkan betapa Pancasila itu penting diberi pemaknaan yang mendasar sebagai ruh yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia. Bila selama ini Pancasila diartikan sebagai Dasar Negara, Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, filsafat dan pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa Indonesia, menurut kami itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pusat kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila adalah spiritualitas yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, ia pertama-tama adalah ruh yang menghidupkan bangsa Indonesia. Dalam konteks itu pula, kehidupan bangsa Indonesia mesti dituntun oleh lima azas yang dijiwai oleh “cinta merdeka” itu:

Pertama, pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kemerdekaan (kebebasan) dalam ber-Tuhan. Ketaqwaan kepada Tuhan terekspresi dalam sikap hormat kepada kemerdekaan setiap manusia untuk memilih menganut caranya masing-masing dalam mengimani Tuhan. Dalam konteks agama yang majemuk, semangat tersebut teraktualisasi dalam sikap toleransi di antara umat beragama dan berkeyakinan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara fenomenologis mencerminkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya pada Tuhan. Tapi kerinduan demikian menuntut adanya praksis kehidupan antar-umat beragama yang harmonis dan toleran. Itu berarti bahwa, bukti manusia di Indonesia mengimani Tuhan adalah menghormati kemanusiaan manusia lain dan menghormati keragaman cara manusia di Indonesia dalam mengimani Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan. Dalam praksis hidup bersama, pluralitas yang dimaksudkan menuntut masing-masing pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara historis ajakan untuk saling menghormati itu berlandaskan pada pernyataan Bung Karno yang bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya kepada Tuhan atau ber-Tuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menerima adanya perbedaan cara dalam ber-Tuhan. Beriman kepada Tuhan dengan terbuka pada pluralitas dan toleran adalah ruh yang menghidupkan kebebasan beragama dan mendorong serta menggerakkan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam menciptakan konteks sosial yang harmonis.

Kedua, pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat kemanusiaan yang berperikemanusiaan. Artinya, kemanusiaan yang diwarnai oleh semangat persaudaraan universal atas dasar pengakuan akan kesetaraan derajat kemanusiaan dan hormat pada hak-hak asasi seperti hak hidup dan hak atas kemerdekaan sebagai manusia. Iman kita kepada Tuhan menjadi nyata memuliakan diri-Nya ketika kita bersikap dan bertindak konstruktif kepada sesama manusia. Jadi, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mendukung dan mengharuskan kita untuk menghormati keutuhan kodrat dan martabat kehidupan setiap manusia. Implementasi semangat seperti itu menghantar setiap orang (Indonesia) kepada kondisi hidup yang adil dan beradab. Dengan demikian, kecenderungan pada tindakan yang melanggar hak-hak asasi dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang berupa penjajahan dan kekerasan dalam berbagai bentuk dan alasannya dapat dikurangi bahkan dihapus.

Ketiga, pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat persatuan Indonesia yang berperikemanusiaan. Spirit demikian bisa jadi mewujudkan dalam rasa cinta kepada tanah air yang mendorong seseorang untuk rela berkorban bagi keutuhan bangsa dan Negeranya. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan semangat kebersamaan dan kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti bahwa, kecenderungan untuk korupsi dan sikap primordial berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan yang menghambat pembangunan, memperlemah persatuan bangsa, dan membuyarkan kebersamaan dalam keragaman perlu ditinggalkan.

Keempat, pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat demokrasi yang berperikemanusiaan. Artinya, tata kelola hidup bersama dirumuskan dalam semangat musyawarah yang berperikemanusiaan sebab diwarnai oleh keterbukaan dan kesediaan untuk saling mendengarkan dan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama yang pro kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola kehidupan bersama yang demokratis. Kemauan setiap manusia di Indonesia untuk bermusyawarah dan terbuka pada pandangan yang berbeda-beda mencitrakan sosok manusia di Indonesia yang bijaksana, sanggup meninggalkan egoisme dirinya, terbuka hati dan budinya untuk mendengarkan pandangan pihak lain dan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan yang berguna untuk mencapai cita-cita hidup bersama.

Kelima, pluralitas di Indonesia penting dihidupi dalam semangat keadilan sosial yang berperikemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam implementasinya, semangat perikemanusiaan itu mewujud dalam sikap solidaritas sosial berupa kepedulian dan keterlibatan sosial secara aktif (berbelarasa) untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak manusiawi karena kemiskinan. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbelarasa kepada sesamanya yang menderita.

Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas, tampak bahwa Pancasila adalah spiritualitas kehidupan Bangsa Indonesia yang cinta merdeka dan berperikemanusiaan. Itulah yang menjiwai bangsa Indonesia dan menghidupi seluruh derap pembangunan bangsa dan Negara Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Berangkat dari keyakinan itu, penelitian ini kami beri judul: ***MENGARTIKULASI PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG MAJEMUK: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS.***

1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Selama ini Pancasila dipahami sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Dasar Negara Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Apakah Pancasila dapat menjadi spiritualitas kehidupan Bangsa Indonesia yang majemuk?
2. Bagaimana memaknai Pancasila “menjadi spiritualitas” kehidupan bangsa Indonesia?
3. Bagaimana relevansi Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia?

1.3 HIPOTESIS

Apa kaitan antara Pancasila dan spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia? Dan, mengapa dimensi spiritual menjadi pokok bahasan dalam sebuah penelitian tentang Pancasila? Tampaknya fokus penelitian ini berdasarkan hipotesis bahwa: dimensi spiritual dalam Pancasila menjadi daya dorong yang memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam menguji hipotesis ini, kami akan: (1). Mengkaji otonomi penggagas Pancasila secara historis, (2) Menelaah otonomi teks tentang Pancasila atau pandangan para pemikir

atas Pancasila, (3) mengkaji otonomi pembaca kontemporer dan posibilitas saran dan usul atas Pancasila yang mengandung dimensi spiritual, (4) menunjukkan relevansi Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui dimensi spiritual dalam Pancasila yang menjadi ruh kehidupan bangsa Indonesia
2. Mengetahui pelbagai pandangan tentang Pancasila yang menggarisbawahi bahwa Pancasila dapat menjadi Spiritualitas kehidupan Bangsa Indonesia
3. Menumbuhkan minat untuk memahami Pancasila sebagai Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menggali kekayaan spiritual dalam Pancasila bertolak dari penggagas utamanya, yakni Sukarno dan pandangan kritis atas Pancasila dari para tokoh Indonesia seperti Mohamad Hatta, N. Drijarkara, Suharto, Notonagoro, dan Abdurrahman Wahid.
2. Menempatkan Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia
3. Mengukuhkan perikemanusiaan dalam Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

1.5 URGENSI PENELITIAN

Penelitian ini penting dan urgen dilakukan: *pertama*, dalam rangka memahami dimensi spiritual dalam Pancasila sehingga dapat dihayati dan diaktualisasikan dalam praksis kehidupan bangsa dan negara Indonesia. *Kedua*, untuk memperkenalkan sebuah pemahaman lain tentang Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk sehingga menumbuhkan inspirasi dalam rangka meneruskan dinamika dan proses

perwujudan “Menjadi Indonesia” yang kekal dan abadi seperti dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan Negara Indonesia.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk memperluas khasanah pemikiran tentang Pancasila
2. Memperkenalkan dimensi spiritual dalam Pancasila kepada segenap generasi bangsa Indonesia
3. Menumbuhkan minat dan inspirasi untuk mempelajari Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam kerangka tujuan penulisan dan metode penelitian di atas, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri lima bab.

Pada bab **pertama** adalah Pendahuluan. Di sini kami memaparkan alasan mendasar mengapa penulis berupaya meneliti tema ini. Bab **kedua** adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode hermeneutik untuk menganalisis teks atau tulisan-tulisan dan pandangan-pandangan Sukarno tentang Pancasila. Sementara dalam bab **ketiga**, kami memaparkan jadwal pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, dalam bab **keempat** berisi hasil dan pembahasan penelitian berkaitan dengan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam sub bab 1, nilai-nilai mendasar Pancasila sebagai spiritualitas bangsa Indonesia kami paparkan secara sistematis. Kemudian, dalam sub bab 2, kami menampilkan pandangan beberapa tokoh atas Pancasila. Tokoh-tokoh yang kami bahas adalah Mohamad Hatta, N. Drijarkara, Suharto, Notonagoro, dan Abdurrahman Wahid. Pandangan kelima tokoh itu kami pandang cukup representatif untuk mengukuhkan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Pada sub bab 3, kami menunjukkan signifikansi dan relevansi Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Di sini kami kembali menegaskan nilai-nilai mendasar Pancasila sebagai ruh kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mestinya

mengikuti Pancasila dalam arti menghayati, menjiwai, dan mewujudkan nilai-nilai mendasar Pancasila dalam praksis kehidupan. Sementara bab **kelima** adalah bab kesimpulan, yang berisi penegasan kembali poin-poin penting berkaitan dengan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur mengenai Pancasila ditinjau dari sudut pandang filosofis. Obyek material penelitian ini adalah beberapa buku/naskah yang mengandung gagasan dasar tentang Pancasila karya Sukarno dan beberapa tokoh kritis lainnya seperti Hatta, N. Drijarkara, Notonagoro, Suharto, dan Abdurrahman Wahid. Sementara itu, obyek formal penelitian ini adalah filsafat, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari hakekat segala sesuatu, yang mencakup manusia, alam semesta, maupun Tuhan. Teks-teks karya para tokoh tersebut ditinjau sebagai naskah filosofis yang menyiratkan hakekat Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan Bangsa Indonesia. Singkat kata, penelitian ini merupakan tinjauan filosofis atas berbagai teks karya para penggagas utama Pancasila, maupun teks-teks yang memberi warna spiritualitas terhadapnya.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi *heuristika* (menemukan dalam sumber-sumber) dan *hermeneutika* (menginterpretasi temuan dalam teks yang menjadi sumber), diperkaya dengan memperhatikan persoalan atau tema dan penelitian tentang pemikir tertentu mengenai Pancasila.

Yang dimaksud dengan metode *heuristik* adalah metode yang digunakan untuk menemukan suatu visi atau pemahaman baru dalam rangka memecahkan suatu masalah secara ilmiah.³ Metode heuristik dilakukan dengan cara menyelidiki sumber-sumber sejarah yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan tujuan penelitian, sehingga dengan itu peneliti menemukan cara-cara baru yang ilmiah untuk memecahkan persoalan. Temuan dalam penelitian dengan metode heuristik diharapkan berdaya inovatif atau merupakan inovasi ilmiah yang bekerja dengan cara mendekonstruksi (membongkar) bentuk-bentuk konsep atau orientasi yang terlanjur sudah dipandang pakem. Sebagai demikian, heuristik lebih dianggap sebagai sebuah kreativitas logika. Sebagai bagian dari metode filosofis, heuristik tidak menemukan atau menyodorkan aplikasi yang praktis untuk memecahkan masalah, tapi ia dapat menemukan atau membangun visi serta pemahaman baru untuk mengatasi masalah. Itu berarti bahwa kapasitas heuristik adalah untuk menuntun atau membimbing dan 'mengatur' secara terencana munculnya sebuah

³ Anton Bakker and Achmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 51-53.

pembaharuan ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, metode heuristik dapat bermakna sebagai suatu pendekatan dan perspektif yang lebih segar untuk membangun pemahaman baru atas Pancasila, misalnya, perspektif atau pengertian yang bermakna spiritual agar menuntun kita pada visi tertentu tentang Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia.⁴

Sementara itu, metode *hermeneutika* merupakan metode interpretasi atau penafsiran atas teks.⁵ Hermeneutika dalam dunia filsafat telah mengalami berbagai pergeseran makna. Pada zaman filsuf Yunani, istilah *hermeneios* sudah dipakai Aristoteles sebagai cara memahami pikiran dalam konteks gramatika. Pada era para Bapa Gereja dalam dunia teologi Yahudi dan Kristen, hermeneutika menjadi suatu metode penafsiran, yakni metode menafsir teks Kitab Suci secara alegoris maupun simbolis. Setelah diaplikasikan cukup lama sebagai metode penafsiran Kitab Suci, kira-kira di abad ke-18, hermeneutika dikembangkan secara lebih luas lagi pada teks-teks non-Kitab Suci. Hermeneutika tampil sebagai metode filologi, untuk menyelidiki maksud-maksud yang tersembunyi di balik segala bentuk teks (termasuk teks yang bukan Kitab Suci). Dalam perkembangannya, hermeneutika lantas tidak lagi dipahami sebagai sekadar metode menafsir teks. Schleiermacher mengembangkan hermeneutika sebagai filsafat, yakni sebagai bentuk seni memahami sesuatu. Setelah Schleiermacher, hermeneutika berkembang sebagai filsafat itu sendiri. William Dilthey mengembangkan hermeneutika sebagai dasar ilmu-ilmu manusia. Hermeneutika berkembang dalam konteks yang lebih linguistik. Heidegger maupun Gadamer melihat hermeneutika sebagai cara manusia mengada. Lebih jauh lagi, Paul Ricoeur menerapkan hermeneutika sebagai segala bentuk sikap curiga atas simbol-simbol atau mitos-mitos yang mapan dalam struktur yang menindas manusia. Walaupun ada berbagai pengertian tentang hermeneutika, dalam penelitian ini, hermeneutika dibatasi sebagai suatu *metode interpretasi*. Dalam hal ini, pada prinsipnya, masalah dasar yang diperkarakan hermeneutika adalah menyangkut pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

⁴ Istilah heuristik berasal dari kata Yunani *heureka* yang berarti "saya sudah menemukannya". Menurut A.M.W. Pranarka, *heuristic* meliputi penyelidikan sumber-sumber sejarah (tertulis maupun tidak tertulis). Lih. A.M.W. Pranarka, 1985. hal. 11.

⁵ Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani *hermeneuin* yang berarti membuat penafsiran atau interpretasi atas suatu hal. Konon terminologi hermeneutika ada kaitannya dengan mitos Yunani tentang Hermes yang bertugas menyampaikan warta para dewa dari Gunung Olympus kepada manusia. Hermes menjalankan tugas mulianya itu secara kreatif, dengan cara menerjemahkan bahasa dewa ke dalam bahasa yang dapat dipahami manusia dengan tidak keliru. Artinya, ia tidak hanya menyampaikan pesan tersebut secara apa adanya, tapi juga memberinya uraian, tambahan dan komentar. Dengan kata lain, ia berperan sebagai penafsir juga.

Bagaimana proses penangkapan makna dari ungkapan-ungkapan manusia dalam teks? Bagaimana terjadinya proses transposisi makna yang sudah tertangkap itu ke dalam sistem nilai dan sistem makna si penafsir? Dalam konteks itu, tugas pokok Hermeneutika adalah: pertama, memastikan makna, pesan, isi suatu kata, kalimat, teks, dst; kedua, menemukan instruksi-instruksi yang terkandung di dalam bentuk-bentuk simbolik. Dalam kerangka tugas pokoknya itu, bagian metode hermeneutik ini berupaya memahami bahasa teks. Memahami bahasa secara hermeneutis berarti menyelinap ke balik bahasa yang diucapkan (yang ditulis) demi memusatkan perhatian pada sesuatu yang ingin dikemukakan oleh kata-kata yang terucap atau tertulis. Tujuannya adalah untuk menangkap makna, pesan, dan arti mendasar dari bahasa yang diucapkan dalam kaitannya dengan tujuan penelitian sang penulis.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pertama-tama ialah mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan utama (berupa naskah, buku asli, dan sebagainya) dari para penggagas ide tentang Pancasila. Dari situ, penulis kemudian berupaya menemukan visi baru serta membuat interpretasi tentang Pancasila yakni sebagai spiritualitas bangsa Indonesia berdasarkan data-data yang telah dicari, diperoleh, diseleksi, dan diklasifikasi sebelumnya. Dalam upaya menemukan visi baru dan interpretasi itu, penulis diperkaya oleh pandangan tentang Pancasila dari beberapa tokoh lain, yang membuka dan menginspirasi gagasan tentang Pancasila sebagai spiritualitas bangsa Indonesia. Temuan gagasan ini dirangkai dalam beberapa bab di tulisan ini.

BAB III

JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Seminar proposal penelitian
Seminar proposal penelitian dilakukan di tingkat Komunitas Bidang Ilmu (KBI) Filsafat, dengan dihadiri beberapa dosen filsafat/ humaniora.
2. Studi pustaka
Studi pustaka meliputi aktivitas mengumpulkan, membaca, menganalisa, mengklasifikasi data-data yang didapat dari sumber literatur.
3. Penulisan laporan
Penulisan laporan dilakukan dalam bentuk naskah akademik yang dicetak maupun dibuat dalam format digital.
4. Seminar laporan hasil penelitian dan revisi
Seminar proposal penelitian dilakukan di tingkat Komunitas Bidang Ilmu (KBI) Filsafat, dengan dihadiri beberapa dosen filsafat/ humaniora. Revisi dilakukan berdasarkan rekomendasi para peserta seminar.
5. Pengumpulan laporan akhir hasil penelitian
Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk naskah akademik yang dicetak maupun dibuat dalam format digital.

Jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu
1	Seminar proposal penelitian	Januari 2015
2	Tahap 1: Tahap studi pustaka	Januari 2015 – Agustus 2015
3	Tahap 2: Tahap penulisan	Agustus 2015 – Desember 2015
4	Seminar laporan hasil penelitian dan revisi	Desember 2015
5	Pengumpulan Laporan akhir hasil penelitian	Desember 2015

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini, temuan penelitian dirumuskan ke dalam tujuh bagian, yang ditampilkan dalam tujuh sub bab.

Sub Bab 1

PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

1.1. Pengantar

Dalam bagian ini kami hendak memaparkan pandangan-pandangan Sukarno tentang Pancasila terkait dengan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam rangka itu pula, kami menelusuri gagasan Sukarno atas Pancasila yang terekam dalam karya-karyanya dan pandangan para tokoh atasnya.

Sukarno yakin bahwa Pancasila itu berakar dalam konteks bangsa Indonesia. Hal itu berarti bahwa hakekat Pancasila itu bercorak khas manusia di Indonesia atau mengandung spirit kehidupan manusia di Indonesia. Ibaratkan sebatang pohon, akar tunjang Pancasila itu tertanam dalam wilayah kebangsaan dan kemanusiaan Indonesia. Pancasila itu tumbuh dari gelora jiwa bangsa Indonesia. Ia adalah spiritualitas hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilainya menjadi daya yang menghidupkan dan mendorong manusia di Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang cinta akan Tuhan, persaudaraan, kedamaian, kesetaraan, dan keadilan.

Barangkat dari pandangan Sukarno tentang Pancasila, kami memfokuskan kajian pada nilai-nilai mendasar Pancasila yang menjadi ruh kehidupan bangsa Indonesia dalam konteks lokal, nasional, dan global. Dalam kerangka itu, pembahasan kami akan difokuskan pada perspektif Pancasila, sejarah kelahirannya, pengertian spiritualitas, perspektif Pancasila Menjadi Spiritualitas, nilai-nilai mendasar dalam masing-masing sila, dan makna Pancasila menjadi spiritualitas.

1.2. Perspektif Pancasila

a. Peristilahan

Pengertian suatu peristilahan secara jernih erat kaitannya dengan etimologinya. Agar pengertian tersurat dan tersirat Pancasila dapat kita tangkap secara signifikan, tinjauan etimologis sungguh membantu.

Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa sanskerta: *Panca* dan *Sila*. *Panca* berarti lima (yang membentuk ke-utuh-an) dan *sila* berarti prinsip atau moralitas (yang melebur dalam ke-utuh-an).⁶ Pancasila secara etimologi dapat diartikan sebagai lima prinsip yang menyatu utuh sebagai panduan kehidupan atau lima prinsip moralitas yang menjadi panduan hidup bersama.

Dalam perspektif Budhisme, istilah Pancasila mengandung pengertian yang merujuk pada hal-hal yang positif untuk kehidupan personal dan komunal manusia seperti kodrat, karakter, kebiasaan, dan perilaku dalam pengertian yang luas. Selain itu, Pancasila juga diartikan sebagai tindakan moral, karakter yang baik, etika Budhis. Pengertian sila pada dasarnya adalah “hal yang utama” dari latihan-latihan kehidupan seorang Budhis. Singkatnya, Pancasila dalam perspektif Budhisme merujuk pada hal-hal mendasar untuk membangun kepribadian manusia.⁷ Artinya, ia adalah nilai-nilai moral yang menjiwai kehidupan manusia. Hemat kami, pemaknaan Sukarno atas Pancasila tidak terlepas dari refleksi dan pemahamannya atas perspektif etimologi di atas. Tinjauan etimologi ini masih bersifat upaya dasar dalam melacak arti tersurat dan tersiratnya. Artinya, perumusan hakikat maknanya sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia masih memerlukan penalaran kritis bertolak dari gagasan Sukarno dan pemaknaan atasnya.

Berdasarkan penalaran etimologi di atas, tampak bahwa arti Pancasila secara tersurat adalah lima nilai (dasar) yang terungkap dalam lima sila. Sementara secara tersirat, arti Pancasila berkaitan erat dengan dinamika dan situasi kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, yang direfleksikan Sukarno secara sadar, terkubur selama jaman penjajahan.

⁶ Dalam penelitiannya tentang Pancasila, William Chang mengemukakan bahwa secara etimologi istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa sansekerta, yakni *panca* dan *sila*. *Panca* berarti lima dan *Sila* berarti azas. Jadi, sebagai suatu istilah, Pancasila merupakan lima azas atau lima prinsip dasar. Dalam konteks peristilahan itu, untuk bangsa Indonesia, Pancasila adalah prinsip dasar atau azas kehidupan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah inti kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, kehidupan bangsa Indonesia selalu berada di dalam kerangka nilai-nilai spiritualnya. Lih. William Chang. 1997. Hlm. 8.

⁷ *Loc.cit.*

Pengalaman dan perjuangan politik Sukarno serta analisisnya terhadap kearifan suku-suku Indonesia secara umum, merupakan peristiwa yang melatarbelakangi Pancasila. Ia memandang masyarakat nusantara, yang kemudian menjadi Indonesia, telah hidup di luar nilai-nilai dasarnya selama masa penjajahan. Itulah sebabnya, Sukarno berupaya menggali “mutiara lima” yang telah terkubur atau dikubur oleh kepentingan penjajah menyebut dirinya sebagai penggali Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan hasil refleksi kritisnya atas nilai-nilai dasar yang menghidupi masyarakat nusantara, yang kemudian secara politis disebut Indonesia. Meskipun demikian, pemahaman secara umum atas Pancasila memerlukan sebuah kajian atas kenyataan sejarah Indonesia. Berikut adalah penalaran singkat atas sejarah kelahirannya.

b. Sejarah Kelahiran Pancasila

Kami sadar bahwa sejarah kelahiran Pancasila adalah sebuah rentang kehidupan bangsa Indonesia yang panjang dan luas. Sebagai demikian, ada kekhawatiran bahwa uraian kami ini belum memenuhi gambaran ideal mengenai Pancasila secara utuh. Meskipun demikian, kami mencoba memetakan secara sekilas sejarah kelahiran Pancasila tanpa bermaksud meniadakan atau mengurangi hakekat atau kandungan makna dan nilai-nilainya.

Sukarno memandang Pancasila sebagai sesuatu yang khas bangsa Indonesia. Ia lahir dari renungannya atas konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila adalah kristalisasi semadi Sukarno atas kearifan bangsa Indonesia yang tenggelam dalam kekuasaan pemerintah kolonial. Ia berisi cita-cita dan harapan bangsa Indonesia.⁸ Pengalaman hidup berkomunitas *ala* masyarakat nusantara, yang sempat tertahan dan terbenam dalam kekuasaan penjajah Belanda, terekam kuat dalam Pancasila. Senada dengan itu, M. Hatta menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari kenyataan bangsa Indonesia yang terpuruk oleh penjajahan. Kata Hatta, “Pancasila adalah cita-cita untuk masa yang akan datang sebagai reaksi terhadap realita yang pahit berupa kesengsaraan rakyat, penghinaan, pemeasaran, dan

⁸ Menurut Sukarno, Pancasila adalah hasil ia merenung di bawah pohon sukun di Ende. Pohon sukun tersebut bercabang lima dan menghadap ke laut. Di bawah pohon sukun itulah konsepsinya mengenai Pancasila selesai diolah. Setelah menjadi presiden pertama di Indonesia, Bung Karno kembali mengunjungi Ende pada tahun 1950. Saat itu juga dia kembali mengingat pohon sukun tempat ia merenung dan menegaskan kembali bahwa pohon sukun tersebut adalah tempat ia merenungkan Pancasila, yang pada waktu ia berkunjung sudah menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia merdeka. Sebelumnya, tak seorang pun tahu hal itu hingga Sukarno sendiri mengungkapkannya. Tim Nusa Indah, 2015. Bung Karno dan Pancasila, Ilham Dari Flores untuk Nusantara, Ende, Nusa Indah, hal. 77-78.

penderitaan bangsa di bawah kekuasaan otokrasi kolonial.⁹ Jadi, Pancasila adalah kristalisasi cita-cita hidup bangsa Indonesia, masyarakat nusantara, yang sempat terkubur selama masa penjajahan Belanda. Tepat sekali kalau Yudi Latif memandang Pancasila sebagai warisan dari jenius Nusantara.¹⁰

Kelahiran Pancasila sebetulnya bermula dari kehendak kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Menurut Yudi Latif, cikal bakal kelahiran Pancasila adalah aksi Perhimpunan Indonesia di Belanda (1924) yang merumuskan konsepsi ideologi politiknya yang mencakup empat prinsip tujuan kemerdekaan, yakni: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi ideologis ini, kata Yudi Latif, merupakan hasil sintesis dari ideologi-ideologi terdahulu. Prinsip persatuan nasional adalah tema *Indisch Partij*, *non-kooperasi* adalah kerangka politik komunis, kemandirian adalah tema Sarekat Islam, sementara solidaritas adalah simpulan yang mengikat atau mengutuhkan ketiga tema tersebut.¹¹

Selain konsepsi ideologis di atas, buah pemikiran kritis para tokoh pejuang seperti Tan Malaka dan Tjokroaminoto terlalu berharga untuk dilupakan. Kedua tokoh itu punya pengaruh besar bagi perjuangan dan kegiatan politik Sukarno. Tan Malaka melalui bukunya *Naar de Republiek Indonesia* (menuju Republik Indonesia) memberi gagasan brilian menyangkut demokrasi. Baginya, demokrasi berakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Sementara itu, Tjokroaminoto dalam rentang waktu yang beriringan mengumandangkan pentingnya sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi dalam rangka menjadi “para demokrat dan sosialis sejati”. Tokoh Islam lainnya adalah kedua pemimpin Persatuan Muslimian Indonesia (PMI), yakni Ijlas Ja’kub dan Muchtar Lutfi. Dengan slogan “Islam dan Kebangsaan”, PMI pada tahun 1932 berupaya mempertautkan diri dengan gerakan nasionalisme modern.¹² Kelak cikal bakal ini diperkaya oleh tulisan Sukarno dalam majalah *Indonesia Moeda* yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Sukarno memandang ketiga paham itulah yang menjadi sifat pergerakan rakyat Indonesia pada tahun 1926 dan menjadi ruh pergerakan di Asia.¹³

⁹ Karya Lengkap Bung Hatta, 2000. *Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta, LP3ES. hal. 394.

¹⁰ Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia, hal. 2.

¹¹ *Ibid.*, hal. 5-6.

¹² Ricklefs, 1930: 190, dalam Yudi Latif, 2011: 6.

¹³ *Ibid.*, hal. 7.

Dalam proses selanjutnya, Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) menjadi landasan kuat bagi perumusan ideologi bersama. Dapat dipastikan bahwa pengaruh Sumpah Pemuda itu telah mendorong masing-masing pejuang untuk menyumbangkan gagasan dan pemikirannya mengenai gambaran ideal bangsa Indonesia ke depan. Sukarno, misalnya, pada awal tahun 1930 merumuskan sintesis dari ketiga ideologi yang sempat menjadi buah permenungannya pada tahun 1926 menjadi “sosio nasionalisme” dan sosio demokrasi. Terkait dengan sosio-nasionalisme, Sukarno hendak menunjukkan betapa pentingnya membentuk diri menjadi bangsa yang berperikemanusiaan baik ke dalam maupun ke luar. Sementara “sosio demokrasi” lebih menekankan bagaimana sosok demokrasi yang tepat dan cocok untuk bangsa Indonesia, yakni demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial yang mencakup ranah hak-hak sipil, politik, dan ekonomi.

Ideal demokrasi yang dicita-citakan itu tentu terkait dengan situasi dehumanistik akibat penjajahan Belanda. Situasi itulah yang mendorong Sukarno untuk merumuskan ideologi yang mampu mempersatukan berbagai lapisan dan golongan yang ada di Indonesia. Sesungguhnya perumusan dan kelahiran Pancasila telah mengalami proses panjang, menyangkut pengalaman personal Sukarno pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dialog politisnya dengan para tokoh perjuangan Indonesia, serta situasi komunal dan tradisi kehidupan masyarakat Indonesia kala itu pada umumnya. Konsepsi ideologis itu pula yang menjadi landasan kuat bagi harapan segenap bangsa Indonesia akan kehadiran pihak Jepang untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya mengapa kedatangan Jepang pada tanggal 11 Januari 1942 disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Sayangnya, Jepang kemudian malah memperparah keadaan di Indonesia.

Memang pada mulanya Jepang tampilan diri sebagai “sang pembebas” sebab berjanji akan mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Pihak Jepang bahkan menawarkan kerjasama dengan para pejuang nasional bangsa Indonesia agar kemerdekaan yang dicita-citakan dapat segera terwujud. Maka selama pendudukan Jepang, para pejuang nasionalis pun mengubah strategi perjuangan. Mereka bersedia menerima tawaran pihak Jepang untuk bekerjasama guna mempercepat proses kemerdekaan dari Belanda. Mereka memandang tawaran tersebut merupakan sebuah kesempatan emas untuk mempercepat perwujudan kemerdekaan sebab selama penjajahan Belanda belum pernah ada tawaran serupa. Tapi, seperti diakui oleh M. Hatta kepada Sukarno, rakyat sudah mulai

criga kepada “sang pembebas” dan mereka dengan penuh semangat menantikan Bung Karno.¹⁴

“Sang pembebas” ternyata ingkar janji. Fakta sejarah menjadi saksi kunci. Setelah Belanda tidak memiliki kekuasaan atas bangsa Indonesia, bangsa Jepang malahan balik menjajah bangsa Indonesia. Janji dan harapan akan kemerdekaan yang diberikan pun tak kunjung tiba. Yang terjadi justru sebaliknya, Jepang malahan menindas bangsa Indonesia dengan lebih kejam dari pada penjajahan Belanda. Pemerintahan Jepang justru memperburuk keadaan yang telah lama menekan bangsa Indonesia. Penjajah Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras dan memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak manusiawi. Kehidupan rakyat Indonesia pun makin terpuruk. Rakyat Indonesia bahkan sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup primernya. Nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia yang mendasar seperti yang digagas oleh Sukarno dalam Pancasila diinjak-injak dan direndahkan. Bangsa Indonesia sungguh tidak lagi dapat menahan situasi penjajahan Jepang yang dehumanistik itu.¹⁵ Jepang pun tidak segan-segan menyiksa, memperbudak, dan memeralat para pemuda dan pemudi Indonesia untuk tujuan kekuatan militernya. Akibatnya tumbuhlah kebencian yang tak terkira dari segenap rakyat Indonesia terhadap pihak Jepang.

Ketika Jepang terdesak oleh serangan tentara Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, pemerintah Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Meskipun pembentukan ini merupakan upaya Jepang untuk mengulur waktu bagi kemerdekaan Indonesia, tapi kesempatan itu direspon oleh para pejuang Indonesia dengan serius sebagai batu loncatan untuk mengubah situasi dan bahkan merebut kedaulatan dari pihak Jepang. Secara politis, tujuan pihak Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk mengulur waktu bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembentukan, pihak Jepang menunda cukup lama untuk menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Pejambon (Gedung Tyuuoo Sangi-In Jakarta), yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat.

Secara formal BPUPKI bertugas menyelidiki perkara-perkara penting dan mendasar terkait kemerdekaan seperti politik, ekonomi, tata pemerintahan, dll. Hal-hal mendasar

¹⁴ Cindy Adams, 1965. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, (edisi Revisi 2014), Media Pressindo, Jakarta, hal. 206.

¹⁵ Catatan sejarah menunjukkan kenyataan pahit tersebut. Dari sekitar 300.000 rakyat Indonesia di pulau Jawa kala itu, 70.000 ribu hidup di bawah garis kemiskinan dan dalam kondisi yang tidak manusiawi.

yang dibahas dalam sidang pertama, antara lain, mengenai syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Pertanyaan pembuka sidang yang dilontarkan oleh ketua sidang adalah “apakah dasar negara Indonesia merdeka”? Para peserta sidang pun mulai berdiskusi dengan serius. Pemikiran-pemikiran yang berkembang sejak awal sidang masih belum menunjukkan kejelasan arah. Sukarno bahkan menegaskan bahwa pidato-pidato para anggota sidang belum sama sekali menunjukkan atau menjawab permintaan ketua sidang. Kata Sukarno:

*“Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang Mulia yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosophische grondslag” daripada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”.*¹⁶

Sidang yang berlangsung alot itu dinilai Sukarno tidak menjawab persoalan yang dijadikan agenda utama. Komentar dan argumentasi yang diberikan oleh para anggota sidang terhadap pertanyaan ketua sidang menurut Sukarno masih merupakan pemikiran-pemikiran yang simpang siur sehingga belum dapat dijadikan kiblat dan simpul bagi kepentingan semua pihak. Akhirnya, Sukarno pun angkat bicara, katanya:

*“ ... Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan! Maaf, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya! Kalau benar hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, sampai di lobang kubur!”*¹⁷

¹⁶ Sukarno, 1964. *Tjamkan Pancasila (Patja Sila Dasar Falsafah Negara)*, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Patja Sila 1 Juni 1945 -1 Juni 1964, hal. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 10-11.

Dari kata-kata Sukarno di atas, tampak bahwa situasi Sidang BPUPKI dinilai Sukarno bertele-tele. Meskipun berlangsung serius dan diwarnai argumentasi-argumentasi kritis dari para peserta, substansi pembicaraan masih bercorak kepentingan masing-masing golongan. Perbedaan pandangan yang tajam di antara para peserta sungguh menyulitkan masing-masing untuk menemukan kata sepakat berkaitan dengan dasar Indonesia Merdeka. Situasi sidang yang serba hati-hati dan menjurus ke arah mementingkan masing-masing kubu atau golongan sudah mulai terasa menerpa masing-masing peserta.

Setelah Sukarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar-dasar Indonesia merdeka, suasana hati beberapa peserta pun belum tentram. Dasar-dasar Indonesia Merdeka yang digagas Sukarno, yakni: perikemanusiaan (internasionalisme), perikebangsaan, demokrasi, perikeadilan dan ketuhanan dipandang beberapa peserta belum maksimal. Padahal, pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu tampak begitu inklusif dan sungguh mementingkan fakta pluralitas masyarakat di Indonesia, tapi prinsip Ketuhanan yang diusungnya bukan tanpa persoalan bagi beberapa peserta atau golongan tertentu.

Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Menjelang kemerdekaan Indonesia (tepatnya pada periode awal kemerdekaan) diwarnai oleh perbedaan pandangan dari para pendiri bangsa ini. Kala itu ada dua kelompok yang berseberangan pandangan mengenai prinsip Ketuhanan Sukarno, yakni pihak yang mendukung penerapan syariah Islam dan pihak yang tidak mendukung syariah Islam. Kubu yang pro-syariah memandang prinsip Ketuhanan yang dicanangkan Sukarno belum maksimal dan belum mendalam sehingga perlu diubah ke bentuk yang paling mendasar dan mendalam. Mereka pun mengajukan saran dan usulan kepada Sukarno untuk perubahan Prinsip Ketuhanan tersebut. Pada intinya, mereka memandang prinsip Ketuhanan Sukarno belum sesuai dengan aspirasi mereka berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Sukarno tentu mengerti inti persoalannya dan konsekuensinya di kemudian hari manakala ia tidak mengatasainya dengan tepat dan bijak. Maka ia menanggapi kritik itu dengan pernyataan dan pengakuan yang tegas bahwa ia telah menggali prinsip Ketuhanan itu sampai ke empat saf (jaman), yakni: Hindu dan pra Hindu.¹⁸

¹⁸ Sukarno, *ibid.*, hal. 79-80.

Terkait dengan pro-kontra seputar syariah Islam, tokoh yang dengan lantang mengusulkan Islam sebagai dasar Negara Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo. Usulan tersebut memang menjawab kebutuhan golongan pro-syariah, tapi para pendiri yang terbuka pada pluralitas seperti Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Sukarno tetap mempertahankan dan mengusulkan dasar-dasar yang toleran.

Untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan yang semakin tajam antara pihak yang pro-syariah dan yang pro golongan nasionalis, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang dan diketuai oleh Sukarno.¹⁹ Secara formal tugas panitia kecil ini adalah menginventarisasikan usulan-usulan dari para peserta sidang pada sidang pertama demi perumusan pembukaan undang-undang dasar yang merupakan suatu kompromi antara golongan nasionalis dengan golongan pro-syariah Islam. Kemudian, Sukarno atas inisiatifnya sendiri yang bersifat spontan dan diakuinya sebagai tindakan yang salah karena di luar keputusan sidang BPUPKI merombak Panitia Kecil tersebut. Sebagai gantinya, Sukarno pada rentang sidang kedua BPUPKI (18-21 Juni 1945) membentuk panitia 9, yang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Tim panitia 9 inilah yang melaporkan Teks Piagam Jakarta dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Empat hari kemudian (14 Juli 1945), laporan itu baru disahkan. Selanjutnya, laporan tersebut diterima oleh segenap anggota BPUPKI sebagai modus kompromi antara golongan nasionalis dan golongan pro-syariah Islam pada tanggal 16 Juli 1945.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Piagam Jakarta adalah wujud nyata dari upaya pencarian titik simpul antara pihak-pihak yang berbeda pandangan pada masa sidang BPUPKI tersebut. Secara tertulis, Piagam Jakarta ini memeteraikan hasil sidang pada masa itu sbb: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah mencapai kata sepakat atau kompromi, sila pertama lalu berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Anak

¹⁹ Panitia 8 dibentuk oleh ketua BPUPK setelah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini diketuai oleh Sukarno. Anggotanya adalah 6 orang golongan kebangsaan (Sukarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Oto Iskandardinata, dan 2 golongan Islam (Ki Bagus Hadikosoemo dan K.H. Wachid Hasjim). Tugas panitia ini adalah mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang pada tanggal 10-17 Juli 1945. Lih. Yudi Latif, *op.cit.*, hal. 76.

kalimat "dengan kewajiban..." adalah hasil kompromi dari pihak-pihak yang berbeda pandangan dalam rapat Panitia Kecil pada tanggal 26-6-1945, dan kemudian diajukan ke sidang Pleno BPUPKI (10 Juli 1945). Tapi persoalannya adalah upaya kompromi itu menimbulkan keberatan bagi pihak Indonesia bagian Timur. Bung Hatta mengaku bahwa dirinya mendapat informasi dari Opsir Kaigun Jepang mengenai keberatan pihak Indonesia Timur, sbb:

"wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketentuan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika diskriminasi ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia".²⁰

Dapat kita mengerti kalau informasi tersebut menimbulkan pemikiran dan refleksi mendalam bagi Bung Hatta. Dapat kita pahami pula manakala pihak Indonesia Timur menilai rumus hasil kompromi tersebut berpotensi diskriminatif dan disintegratif sebab bernuansa mengistimewakan salah satu golongan. Bila rumusan itu tidak diubah, Negara yang baru hendak dibangun akan menghadapi bahaya disintegratif. Kecuali itu, rumusan tersebut juga di kemudian hari bisa dimanfaatkan untuk menegaskan syariat Islam dengan menggunakan alat-alat negara yang akan dibentuk itu. Kecuali itu, mereka juga berkeberatan terhadap rumusan mengenai agama presiden dan pasal 29 UUD 1945 mengenai agama para warga Negara.

²⁰ Menurut pengakuan M. Hatta, pada sore hari sebelumnya dia dikunjungi oleh seorang perwira angkatan Laut Jepang atas permohonan Nishijama, asisten Laksamana Maeda. Perwira ini memberitahukan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di bagian Timur sangat keberatan dengan klausul Islam (tujuh kata) dalam pembukaan karena dipandang sebagai tindakan diskriminasi. Jika kalimat itu tetap dimasukkan, mereka akan lebih suka berada di luar Republik Indonesia. Lih. Hatta, M. 1970, Sekitar Proklamasi, Djakarta, hlm. 66 – Tapi menurut Moh. Ridwan dan Sophian Marthabaya, bukan seorang perwira Jepang yang mengemukakan keberatan, melainkan Sam Ratulangi, ketua delegasi dari daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Lih. Moh. Ridwan dan Sophian Marthabaya, 1987, *Peristiwa-Peristiwa di sekitar Proklamasi 17-8-1945*, Jakarta, hlm. 145. Informasi lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada utusan AL Jepang yang bertemu Hatta. Yang menghadap adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yang seorang di antaranya berwajah oriental dan memakai seragam Angkatan Laut Jepang. Lih. Hakiem et.all. (2001), dalam tulisan ini kami ambil dari Yudi Latif, 2001. hal, 83.

Bung Hatta menilai informasi dari Opsir kaigun Jepang itu begitu penting sehingga ia langsung mengajukan pertanyaan reflektif pada dirinya sendiri, "Apakah perjuangannya lebih dari 25 tahun akan menjadi sia-sia? Apakah Indonesia yang baru saja lahir (baca: merdeka) akan terpecah-belah?" Berangkat dari pertanyaan reflektif itu, Bung Hatta pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berlangsung, menemui para tokoh kunci untuk berdiskusi dan mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan kemungkinan perubahan yang bersifat integratif dan inklusif. Mereka yang ditemui Bung Hatta adalah: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera. Tujuannya semata-mata supaya jangan terjadi perpecahan sebagai bangsa. Perundingan para tokoh itu mencapai kata mufakat. Mereka setuju agar kalimat yang dipandang berpotensi menimbulkan perpecahan itu dihilangkan dan diganti dengan rumusan yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Perubahan rumusan ini pun lantas diajukan Bung Hatta kepada sidang PPKI. Dalam rapat tersebut, Bung Hatta mewakili sidang untuk memberikan keterangan mengenai beberapa perubahan, antara lain, mengenai rumusan yang termaktub dalam Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, terjadi juga perubahan redaksional pada prinsip internasionalisme atau peri-kemanusiaan. Urutannya tetap pada posisi kedua, tapi redaksionalnya menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", prinsip kebangsaan Indonesia berubah urutannya dari sila pertama menjadi sila ketiga dan redaksionalnya menjadi "Persatuan Indoneia". Prinsip Mufakat atau demokrasi berubah urutannya dari sila ketiga menjadi sila keempat dan redaksionalnya menjadi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Prinsip "Kesejahteraan Sosial" berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima dan redaksionalnya menjadi "keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Setelah memberikan keterangan dan ternyata tidak ada lagi yang berkeberatan dari para anggota sidang, Bung Karno pun membacakan naskah itu dan mengesahkannya.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut bersyukur dan berterimakasih kepada para pendiri bangsa yang telah meruntuhkan ego masing-masing untuk mencapai titik kesepakatan yang memenangkan semua pihak dan menyelamatkan kesatuan Indonesia pada awal kemerdekaannya. Buah kerja keras para pendiri bangsa itu dalam memikirkan, merancang dan merumuskan perubahan rumusan dalam Piagam Jakarta mesti dihargai dan

dipertahankan. Perubahan rumusan ini begitu penting sebab mengatasi diskriminasi yang berpotensi melahirkan disintegrasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak bahwa kelahiran Pancasila itu sarat dengan diskusi kritis untuk mengupayakan keputusan dan kesepakatan yang inklusif dan integratif. Dalam kerangka itu, Sukarno adalah “bidan” yang aktif mengupayakan proses kelahiran Pancasila. Tepat sekali ungkapan Sukarno bahwa dirinya bukan pencipta, tapi penggali (orang yang menggali) Pancasila. Artinya, Pancasila itu sudah terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia, tapi terkubur oleh situasi penjajahan. Peran Sukarno adalah membantu proses Pancasila muncul kembali ke permukaan kehidupan bangsa Indonesia.

Berangkat dari lintasan sejarah perumusan Pancasila di atas, dapat disetujui bahwa 1 Juni 1945 adalah momentum kelahiran Pancasila. Pada masa itulah kelima prinsip dasar Negara dikemukakan dengan sebutan Pancasila.²¹ Sejak itu pula kelima prinsip itu tidak pernah berubah jumlahnya kecuali salah satu rumusannya mengenai Ketuhanan yang mengalami perubahan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila yang mengikat bangsa Indonesia secara kolektif bukanlah rumusan versi tanggal 1 Juni atau 22 Juni, tapi rumusan berdasarkan kesepakatan perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pemetaan atas sejarah kelahiran Pancasila di atas menunjukkan bahwa Pancasila sungguh tepat dimaknai sebagai ungkapan kritis dan tanggapan bangsa Indonesia terhadap penderitaan, penolakan terhadap penjajahan. Lebih dari itu, Pancasila adalah gambaran ideal kehidupan yang diharapkan Sukarno akan diwujudkan di alam kemerdekaan. Dari sejak semula, Sukarno menghasratkan agar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dijadikan atau menjadi daya hidup bersama yang mendorong dan menggerakkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia yang *bhinneka* ke arah kondisi hidup yang berperikemanusiaan. Oleh karena itu, Pancasila yang digali Sukarno pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memang layak dan semestinya menjadi spiritualitas atau “ruh” kehidupan bangsa Indonesia.

²¹ Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertamakalinya pemikiran tentang Pancasila baik dalam pengertian nama maupun dalam pengertian isinya, secara eksplisit dan terurai dicetuskan dan tercatat dalam sejarah. Lih. A.M.W. Pranarka, 1985, hal. 33.

1.3. Pengertian Spiritualitas

Menurut Tom Jacobs, pengertian spiritualitas yang paling umum adalah “kerohanian”, senada dengan kata (Latin) Spiritus yang berarti roh.²² Tetapi kata spiritualitas sendiri, menurutnya, bukan dari bahasa Latin, melainkan dari bahasa Perancis, spiritualite. Istilah spiritualite sendiri bukan pertama-tama berarti roh, tapi menunjuk pada suatu corak atau gaya hidup, meski tidak terlepas dari ranah yang rohani. Ketika seseorang mengikuti cara hidup pihak lain secara sadar, tahu, dan mau, itulah yang disebut spiritualitas. Bertautan dengan itu, kata spiritual menunjuk pada daya ‘yang rohani’ misalnya, jiwa. Ungkapan yang senada dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spirit adalah semangat, jiwa, sukma, ruh.²³

Dari perspektif psikologi, J.P. Chaplin juga menampilkan makna yang sama berkaitan dengan spiritualitas yakni, semangat, ruh, jiwa; religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai transendental; bersifat mental, sebagai lawan dari material, fisikal, atau jasmaniah.²⁴ Dari perspektif teologi, makna spiritualitas tampak seirama dengan penalaran di atas, yakni semangat, roh, aura, kesucian, dan kecenderungan religius: praktik dan permenungan sistematis atas dimensi hidup religius yang ditandai dengan olah doa, kebaktian, dan disiplin.²⁵ Jadi, spiritualitas adalah gaya hidup yang mengikuti semangat tertentu atau pihak lain.

1.4 Perspektif Pancasila Menjadi Spiritualitas

Para pemikir seperti M. Yamin, M. Hatta, dan Notonagoro pada umumnya mengakui bahwa Pancasila adalah nilai-nilai mendasar yang menuntun kehidupan manusia di Indonesia. Nilai-nilai mendasar kehidupan yang dikristalisasikan sebagai Pancasila diyakini berasal dari masyarakat nusantara, khususnya, Indonesia. Ada bermacam ragam gagasan tentang nilai mendasar yang terkandung di dalam Pancasila. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan nilai mendasar dalam kaitannya dengan Pancasila?

²² Tom Jacobs, SJ, 2002. *Paham Allah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 232. Lih Juga A. Heuken SJ, 2005. *Ensiklopedi Gereja Jilid VIII Sel-To*, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, hlm.106-107.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, hlm. 857.

²⁴ J.P. Chaplin, 1968. *Dictionary of Phsicology*, terjemahan Kartini-Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

481

²⁵ Gerald O' Collins SJ dan Edward G. Farrugia, SJ, 1991. *A Concise Dictionary of Theology*, Cambridge, Mass: Harvard University Press,. Alih bahasa, I. Suharyo, 2002. Yogyakarta, Kanisius, hlm. 304.

Istilah nilai-nilai mendasar (*fundamental values*) mengandung makna sebagai hal utama yang berdaya mewujudkan kesempurnaan, keutuhan, dan keberlanjutan bagi eksistensi sesuatu hal yang bernilai. Maka makna istilah nilai-nilai mendasar bukan sekadar bertataran *values* (harga, penting, berguna), tapi sesuatu yang *ultimate* atau utama. Dalam perspektif itu, nilai-nilai mendasar bukan sekadar nilai-nilai atau *values* yang berarti harga.²⁶

Dalam pengertian *values*, sesuatu itu bernilai karena ia memang bernilai dalam dirinya sendiri dan oleh karena itu pula ia menjadi sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai juga berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan tindakan manusia sehingga bercorak instrumental (subjektif). Artinya, hal berharga yang menjadi tujuan tindakan seorang pribadi. Jadi, nilai-nilai (*values*) adalah kualitas atau situasi dari sesuatu yang secara fisik dan mental berguna untuk kehidupan manusia, tapi tidak menentukan kesinambungan eksistensi dirinya. Sementara nilai-nilai mendasar (*fundamental values*) adalah yang menjadi syarat utama yang menentukan eksistensi sesuatu atau seseorang. Kedudukan Pancasila sebagai nilai-nilai mendasar menempatkan dirinya sebagai spiritualitas yang menentukan keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Maka Pancasila adalah “ruh” yang menghidupkan aktivitas fisik dan mental bangsa Indonesia.

Dalam konteks tulisan ini, Pancasila dimaknai sebagai spiritualitas. Artinya, cara hidup yang harus dihayati, dijiwai, dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai mendasar (*fundamental values*) yang menjadi acuan hidup bersama dan dijadikan orientasi hidup bersama dalam tataran praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, hidup bangsa Indonesia yang ideal dalam tataran praksis adalah mengikuti, menghayati, dan mewujudkan nilai-nilai mendasar.

Jadi, Pancasila sebagai Spiritualitas berdaya menghidupkan, mengutuhkan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cinta akan kehidupan, persaudaraan, kesatuan dalam kebersamaan, musyawarah untuk menentukan kepentingan bersama, dan keadilan sosial. Ketika bangsa Indonesia berkanjang dalam nilai-nilai mendasar itu, Pancasila adalah spiritualitas yang memungkinkan proses dinamisnya.

Dengan kata lain, menyebut Pancasila menjadi Spiritualitas adalah menempatkan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, kehidupan bangsa

²⁶Istilah *values* berasal dari kata dalam bahasa Latin *valere* dan bahasa Prancis kuno *valoir* yang berarti harga. Lih. Rohmat Mulyana, 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, ALFABETA, hlm. 7.

Indonesia mengikuti, menghayati, dan mewujudkan nilai-nilai mendasar Pancasila dalam praksis kehidupan yang bercorak *bhinneka*.

1.5 Nilai-Nilai Mendasar Dalam Pancasila

Dalam rangka mengusung Pancasila menjadi Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia, perlu kiranya menelaah sila-sila Pancasila untuk mengedepankan nilai-nilai mendasarnya. Berikut adalah ulasan deskriptif mengenai nilai-nilai mendasar yang terkandung secara utuh dalam Pancasila.²⁷

A. Nilai-Nilai Mendasar Sila Pertama

Bangsa Indonesia telah sejak dulu menaruh sikap percaya kepada hal-hal supra natural. Sejak jaman batu hingga perunggu masyarakat prasejarah Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan, yang pada umumnya bercorak animisme.²⁸ Pengaruh kepercayaan tradisional dan agama-agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen telah dengan sendirinya membentuk konsep Ketuhanan yang unik.

Gagasan Ketuhanan yang diusung oleh Sukarno juga dapat dipastikan merupakan kristalisasi penghayatan dan pintalan wawasannya mengenai Ketuhanan dalam konteks pluralitas sistem kepercayaan pada masa itu. Pengalaman perjumpaan dan dialog Sukarno dengan masyarakat nusantara di daerah kolonial pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan memperdalam imannya akan Tuhan dan memperluas wawasannya tentang Tuhan serta membentuk *mindset*-nya perihal sesama yang berbeda agama. Pengalaman hidupnya yang sarat dengan pesan kemerdekaan itu terurat dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sesungguhnya, muatan pesan teologis, politis, dan sosiokultural dalam pidato Sukarno tersebut adalah keluhuran Tuhan dapat dirasakan secara nyata dalam diri manusia sebagai manusia yang bebas.

Daya pikat gagasan Ketuhanan Sukarno terletak dalam spirit kebebasan dan toleransi yang diusungnya. Visi Ketuhanan Sukarno selain kontekstual dan inklusif, juga mendahului kesadaran religiusitas para tokoh perjuangan pada masanya. Dengan Ketuhanannya itu,

²⁷ Pemaparan sila demi sila ini bukan hendak dimaksudkan untuk memisah-misahkannya satu terhadap yang lain, tapi demi memahaminya secara utuh. Sebab Pancasila, kata Sukarno, adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan satu sama lain. Sukarno, *op.cit.*, hal. 117.

²⁸ Animisme (dari bahasa Latin *anima* atau "roh") adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi ini seperti petir, pohon, wilayah tertentu, sungai, gunung) mempunyai "roh" yang harus dihormati agar tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya.

Sukarno merangkul semua lapisan dan golongan, mempersatukan perbedaan tanpa hendak menyeragamkannya. Itulah sebuah kedewasaan dan kematangan seorang Sukarno dalam praksis hidup beragama. Barangkali itulah yang kita namakan toleransi aktif. Sebab gagasan Ketuhanan yang dikumandangkannya selain melampaui koridor-koridor dan dogma-dogma agama-agama, juga berdaya kohesif, inklusif, dan integratif.

Berdasarkan pengalaman hidupnya, keluasan pengetahuan dan pemahamannya atas realitas sosial Indonesia, Sukarno yakin bahwa Negara Indonesia harus didirikan di atas dasar prinsip Ketuhanan. Pentingnya prinsip Ketuhanan bukan demi menonjolkan suatu agama tertentu, tapi demi menghargai kebebasan dan martabat manusia. Prinsip Ketuhanan adalah suatu keistimewaan Negara Indonesia bila dibandingkan dengan konsep Negara liberal, Negara sosialis, Negara sekuler, Negara theokrasi. Negara liberal yang mendewakan kebebasan individu di atas Ketuhanan, Negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan Negara, Negara Atheis yang menyangkal keberadaan Tuhan dipandang Sukarno tidak cocok untuk rakyat Indonesia, yang sejak dahulu kala terbiasa hidup berkomunitas dalam spirit kepercayaan tertentu kepada Tuhan. Menyadari hal itu dan berdasarkan fakta sosial yang majemuk dalam agama dan kepercayaan, Sukarno menyerukan pentingnya kebebasan beragama, hormat-menghormati di antara masing-masing pemeluk agama. Itulah inti pernyataannya berikut ini:

*“Bukan saja bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara kita adalah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”.*²⁹

²⁹ Sukarno, *ibid.* hal, 29-30.

Seruan dan ajakan Sukarno dalam ber-Tuhan di atas menunjukkan bahwa prinsip kelima (yang kemudian menjadi prinsip pertama) bagi Negara Indonesia merdeka bukan pertama-tama menyangkut agama-agama tertentu. Prinsip Ketuhanan yang ditawarkannya itu lebih merupakan “ruh” atau spiritualitas kehidupan setiap insan beragama dalam menghayati dan mewujudkan imannya dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Oleh karena itu, Sukarno menghendaki agar insan beragama dapat menghayati imannya secara berkebudayaan, berbudi pekerti luhur, dan saling menghormati satu sama lain. Inti perkaranya di sini adalah Ketuhanan harus menjiwai kehidupan bangsa Indonesia sehingga setiap manusia di Indonesia mampu menghormati hak masing-masing pihak dan bertumbuh imannya dalam semangat yang toleran.

Selain berdaya kohesif, inklusif, dan toleran prinsip Ketuhanan ini menjadi sumber inspirasi bagi kebebasan beragama. Keyakinan akan Ketuhanan yang Maha Esa merupakan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan selain sebagai pencipta kehidupan, juga pemberi kebebasan bagi manusia. Keyakinan demikian bisa jadi berakar dalam pengalaman iman akan Tuhan atau harapan akan Tuhan sebagai pembebas manusia dari segala kondisi hidup yang dehumanistik. Dalam praksis kehidupan, penghayatan akan kemahakuasaan Tuhan ini membebaskan manusia di Indonesia dari segala kecenderungan yang destruktif, dehumanistik akibat picik, naif, dan eksklusif. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan yang tumbuh dalam alam kebebasan itu diaktualisasikan dalam cinta dan hormat kepada sesama manusia beragama. Muara dari sikap iman tersebut adalah kehidupan bersama yang berperikemanusiaan, yakni hormat-menghormati dan bertoleransi aktif.

Berkaitan dengan uraian di atas dan berlandaskan nilai-nilai mendasar yang menjadi daya dorong kehidupan ber-Tuhan dan beragama di Indonesia, praksis kehidupan ber-Tuhan dan beragama di Indonesia mestilah mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan sebagai Pencipta adalah sumber kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya. Keyakinan demikian menuntut segenap insan beragama di Indonesia untuk mampu dan mau menghargai kebebasan masing-masing pihak dalam beragama dan berpartisipasi aktif dalam mengakomodasi kebebasan beragama serta menjunjung sikap toleransi dalam kebebasan beribadah. Kekuatan sila ini terletak pada pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kebebasan manusia.

a.1. Tuhan adalah Sumber Kebebasan Manusia.

Sebagai bangsa yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang adalah anugerah istimewa dari Tuhan. Kemerdekaan adalah peristiwa bersejarah yang menjadi tanda kemahakuasaan dan belaskasihan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga merupakan bukti nyata bahwa Tuhan peduli, perhatian, berbelaskasihan dan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Iman bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan adalah pembela Agung yang berjuang bersama bangsa Indonesia dalam melawan kebengisan dan kekejaman penjajahan.

Keyakinan bahwa Tuhan terlibat aktif dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan diakui oleh Sukarno. Baginya, tanpa campur tangan Tuhan agaknya mustahil bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Campur tangan Tuhan atas kemerdekaan Indonesia, kata Sukarno, sudah terjadi selama proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Tuhan selalu melindungi bangsa Indonesia selama perjuangannya merebut kemerdekaan.

Keyakinan Sukarno tentang campur tangan Tuhan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia diungkapkannya dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Sukarno menyebut kata Tuhan dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia sebanyak duapuluh satu kali. Ia yakin sekali bahwa Tuhan adalah aktor utama di balik peristiwa bersejarah bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Keyakinan serupa diungkapkannya kembali pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, Sukarno menyebut Tuhan sebanyak sepuluh kali dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan.

Berangkat dari uraian di atas, tampak bahwa Sukarno meyakini campur tangan Tuhan dalam seluruh proses kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah bukti nyata Tuhan turut membela bangsa Indonesia. Hal itu berarti pula bahwa, perwujudan Negara Indonesia dan perolehan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah kepenuhan rencana Tuhan atau diberkati olehNya. Akan tetapi, patut kita catat dan ingat bahwa relasi yang kuat antara bangsa Indonesia dengan Tuhan tidak serta merta menggiring Sukarno pada niat dan tekad untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara agama. Ia sejak semula berkomitmen untuk mempersatukan segenap golongan di Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongannya. Hingga kini Pemerintah Indonesia membantu setiap orang Indonesia untuk memenuhi kewajiban agamanya.

Bagi bangsa Indonesia, agama adalah wahana untuk menghayati dan mengekspresikan kehidupan berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan yang transenden dihayati dan dialami kehadirannya sebagai sosok yang imanen dalam dan melalui agama. Keyakinan bahwa Tuhan itu dekat pada kehidupan manusia di Indonesia tampak dalam pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia berjuang sendiri dalam mewujudkan kemerdekaannya. Tuhan selalu ada dan hadir dalam sejarah bangsa Indonesia. Tuhan selalu menuntun kehidupan bangsa Indonesia setiap hari dan memperkuat mereka dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan adalah pembebas dari segala situasi yang tidak manusiawi. Keyakinan demikian tampak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa Tuhan adalah sumber kebebasan. Tuhan menjamin kemerdekaan manusia. Tak seorang pun dapat menguasai dan mengambil kebebasan seseorang sebab ia berasal dari Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kebebasan menuntut sikap akomodatif dan partisipatif dari setiap insan beragama dalam mewujudkan iklim kebebasan beribadah. Maka tuntutan praksis kehidupan beragama adalah adanya kebebasan beribadah dalam konteks pluralitas agama di Indonesia.

a.2. Hormat pada Kebebasan Beragama

Pembahasan di atas menempatkan Tuhan sebagai sumber kebebasan manusia. Konteks sila pertama Pancasila adalah pengakuan iman bangsa Indonesia kepada Kemahakuasaan Tuhan sebagai pemberi kebebasan manusia. Berangkat dari spirit itu, tak satupun bangsa di dunia ini yang berhak menjajah bangsa lain. Artinya, semua bangsa di dunia ini berhak atas kebebasannya dan penjajahan terhadap bangsa lain adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Penjajahan adalah tindakan melawan atau menolak kehendak Tuhan sebagai pemberi dan sumber kebebasan manusia.

Dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia, sila pertama Pancasila ini menjadi dasar bagi perwujudan situasi kehidupan beragama yang harmonis. Sila pertama Pancasila menuntut agar masing-masing manusia di Indonesia sanggup berpartisipasi dan berkomitmen untuk mewujudkan dan menjamin kebebasan beragama. Spirit sila pertama Pancasila adalah kebebasan beribadah yang mendorong dan menyemangati masing-masing insan beragama untuk mampu menjamin, menghargai hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Sikap hormat kepada Tuhan tampak dalam komitmen masing-masing insan beragama untuk saling menghormati hak atas kebebasan

beragama dan beribadah. Daya spiritual sila pertama ini membangkitkan kemauan masing-masing insan beragama untuk berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam upaya mewujudkan dan menjamin kebebasan beribadah serta menghormati perbedaan identitas keagamaan.

Dalam praksis kehidupan beragama, tuntutan atas kebebasan beragama berdasarkan spirit sila pertama ini mengandung tiga implikasi. **Pertama**, setiap orang Indonesia bebas untuk menentukan atau memilih agamanya tanpa dipaksa oleh siapa pun juga sebab kebebasan beragama adalah hak yang tak terhapuskan dari setiap warga Negara Indonesia. **Kedua**, pemerintah dan warga Negara wajib untuk menciptakan iklim kehidupan beragama yang harmonis dalam mewujudkan hak katas kebebasan beragama, termasuk jaminan atas semua kemungkinan dan fasilitas untuk membangun rumah ibadah, seperti gereja, wihara, dan masjid. Pembatasan atau pelarangan pembangunan rumah ibadah bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan kehendak Tuhan sebagai sumber kebebasan manusia. **Ketiga**, penolakan terhadap atheisme. Sila pertama ini jelas menempatkan Tuhan sebagai kekuatan bangsa Indonesia untuk hidup bernegara. Berdasarkan spirit sila pertama ini, segala bentuk kegiatan yang menjurus pada penyangkalan akan keberadaan Tuhan dan pembatasan kebebasan beribadah adalah tindakan reduktif dan bertentangan dengan spirit sila pertama Pancasila sehingga dilarang di Indonesia.

Spirit kebebasan beribadah atau beragama di Indonesia selaras dengan kehendak Tuhan bahwa semua ciptaanNya hidup berdampingan sebagai saudara dalam keadaan yang utuh dan akur. Oleh sebab itu, kebebasan beragama semestinya diakomodasi sebagai ungkapan penghayatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan. Partisipasi aktif setiap warga Negara dalam mewujudkan kebebasan beragama adalah kekuatan yang mampu mencegah konflik antarumat beragama yang berbeda. Singkatnya, nilai kebebasan beragama yang diusung sila pertama Pancasila seharusnya menjadi kekuatan integratif bagi umat beragama di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kebebasan beragama itu seharusnya menjadi kekuatan yang menyatukan perbedaan.

Pertama, sila pertama mewajibkan setiap warga Indonesia untuk menjalin relasi yang harmonis dengan Tuhan, tetangga, dan alam semesta. Dasar kewajiban ini adalah kehendak Tuhan agar setiap manusia membawa berkat bagi sesamanya. Tuhan menghendaki agar masing-masing manusia berkontribusi dan bekerjasama dalam

mewujudkan kehidupan yang bahagia. **Kedua**, perwujudan kebebasan beragama adalah bukti iman kepada Tuhan yang serius. Setiap manusia yang terlibat aktif dengan caranya masing-masing dalam membangun keharmonisan hidup beragama berpartisipasi dalam meneguhkan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam agama. Iman yang benar kepada Tuhan melarang setiap orang untuk merendahkan agama lain. Penghayatan iman yang benar akan menjadi cahaya bagi perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial. Masing-masing agama mengajarkan para pengikutnya untuk hidup dalam persaudaraan dan toleransi. **Ketiga**, kebebasan beragama adalah hak yang mesti digunakan untuk memperkuat jalinan persaudaraan dan kesadaran untuk saling menghormati perbedaan. Aktualisasi kebebasan beragama hendaknya dipandang sebagai pelatihan mental dan tanggungjawab sosial dalam menjamin keutuhan bangsa.

a.3. Toleransi Aktif yang Tulus

Landasan spiritual bagi kebebasan beragama adalah pernyataan Sukarno yang menghendaki agar bangsa Indonesia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga membangun Negara yang ber-Tuhan.³⁰ Ajakan tersebut tentu mengandung konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus saling menjaga dan menghargai hak atas kebebasan beragama. Artinya, mau menghormati dan menerima adanya perbedaan cara dalam ber-Tuhan. Dalam konteks kebebasan beragama itu, spirit atau “ruh” yang menghidupkan dinamika kebebasan beragama adalah iman yang inklusif yang tampak dalam sikap dan tindakan toleransi aktif yang tulus.

Konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dalam agama merupakan alasan di balik pentingnya insan beragama bersikap toleran secara aktif dan tulus. Dalam kerangka itu, para tokoh agama bertanggungjawab mendidik dan mengarahkan masing-masing umatnya agar memiliki kerendahan hati untuk menerima perbedaan agama sebagai fakta sejarah peradaban bangsa Indonesia. Dalam praksis kehidupan, masing-masing umat beragama memaknai kegiatan agama selain sebagai bentuk pemuliaan Allah, juga sebagai upaya menciptakan peluang bersama untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis.

³⁰ Ir. Sukarno, 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal. 29-30.

Toleransi beragama yang aktif dan tulus adalah spirit kebebasan beragama. Dalam konteks pluralitas agama, toleransi aktif yang tulus mengandung dua aspek. **Pertama**, menyangkut pengakuan akan keberadaan dari semua agama resmi; **kedua** menuntut sikap terbuka untuk pihak lain dan hormat pada hak-hak sesama yang berbeda cara dalam memuliakan Allah (beribadah). Dengan kata lain, tuntutan kebebasan beragama dalam spirit toleransi aktif yang tulus adalah pengakuan dan penerimaan akan fakta bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama untuk menjalani kehidupan keagamaannya secara beradab dan bertanggungjawab terhadap Allah dan sesamanya. Artinya, dalam ranah keagamaan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sebab hak untuk memilih, memeluk dan mempraktikkan agama adalah hak-hak mendasar manusia.

Toleransi aktif yang tulus dalam kebebasan beragama di Indonesia didorong oleh dua faktor penting. **Pertama**, keyakinan dan pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajakan kepada setiap manusia di Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai saudara yang berasal dari satu Pencipta. Dalam kapasitas itu pula, sebagai bangsa, orang-orang Indonesia harus hidup dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan serta berusaha untuk menggapai atau mewujudkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran untuk menjamin kehidupan bersama yang damai. **Kedua**, iman kepada Tuhan sebagai perwujudan kebebasan manusia adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam praksis kehidupan bersama. Artinya, ekspresi iman harus konstruktif bagi kondisi hidup bersama. Takarannya adalah membangun persaudaraan universal. Dalam konteks kebebasan beragama, iman berarti lentera yang menyinari perjalanan bersama menuju Tuhan yang ESA. Melalui iman yang aktif itu, umat beragama di Indonesia saling membuka jalan menuju kemuliaan Tuhan, meneguhkan harapan akan keselamatan.

Dalam konteks toleransi aktif yang tulus itu, keterbukaan terhadap perbedaan adalah kata kuncinya. Artinya, masing-masing pihak berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan dan menjamin keutuhan hidup bersama dalam iklim persaudaraan. Artinya, masing-masing pihak bersedia untuk menjalin dialog setaraf dengan sesamanya yang berbeda agama dan kepercayaan dalam rangka perwujudan iman yang inklusif.

a.4. Dialog Antar-Umat Beragama

Toleransi aktif yang tulus dalam kebebasan beragama adalah sebuah proses yang mengisyaratkan pentingnya partisipasi aktif dan keterbukaan untuk berdialog menuju

keutuhan dalam persaudaraan. Bila kondisi hidup yang damai adalah harapan kehidupan beragama secara horizontal maka penting untuk memperhatikan seruan Hans Kung, “tidak ada perdamaian di dunia tanpa adanya dialog antaragama-agama, dan tidak ada dialog antaragama-agama tanpa kemauan masing-masing pihak untuk berdialog. Jadi, dialog antarumat beragama adalah pintu menuju toleransi aktif yang menjamin kebebasan beragama.

Kesediaan untuk berdialog adalah ungkapan pengakuan akan Tuhan sebagai sumber kebebasan manusia dan kemudian menjadi landasan bagi pengakuan terhadap kebebasan beragama dalam konteks pluralitas agama. Untuk itu dialog antar-umat berbeda agama dan kepercayaan menjadi penting. Dialog adalah upaya untuk menumbuhkan saling pengertian atau toleransi yang berguna untuk memajukan dan mempromosikan kebebasan beragama sampai pada tataran menjadi kesadaran semua pihak.

Kebebasan yang diterima manusia dari Tuhan itu menjadi kekuatan cinta dan sikap percayanya kepada Tuhan yang terekspressi dalam sikap kepada sesama, yakni saling menghormati perbedaan cara dalam ber-Tuhan.³¹ Itulah yang disebut sebagai sikap toleransi aktif. Realisasi toleransi aktif itu berupa kesediaan untuk saling tolong-menolong dalam menyukseskan aktivitas beragama dalam praksis kehidupan; masing-masing pihak berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Itulah inti seruan Sukarno mengenai pentingnya Negara Indonesia ber-Tuhan.³²

Dalam konteks dialog antarumat berbeda agama, syarat-syarat yang diajukan oleh Paul F. Knitter, seperti dipaparkan I. Bambang Sugiharto,³³ penting diperhatikan.

Pertama, dialog haruslah berdasarkan pengalaman religius personal dan klaim yang kokoh tentang kebenaran. Artinya, dialog yang memungkinkan untuk transformasi iman hingga pada tataran toleransi aktif dilandasi oleh kesungguhan iman para pesertanya. Kecuali itu, sikap intelektual akademis para peserta dialog juga penting. **Kedua**, dialog harus didasarkan pada keyakinan bahwa religi lain sangat mungkin memiliki kebenaran pula. Maka peserta dialog harus pula memiliki taraf pendidikan dan penguasaan cukup atas ajaran agama masing-masing. **Ketiga**, dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan

³¹ Bartolomeus Samho, 2012. *Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dalam Pancasila Kekuatan Pembebas, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 233.

³² Sukarno, 1964. *Tjampkan Patjasila*, hlm. 29-30.

³³ I. Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W, 2000. *Wajah Baru Etika & Agama*, hlm. 164-167

perubahan yang tulus. Perubahan yang dimaksud terutama adalah perubahan pemahaman. Maka keterbukaan di sini berarti keberanian untuk melepas anggapan-anggapan semula, baik tentang tradisi religius kita sendiri, maupun tentang tradisi lain. Keterbukaan pada pihak lain tentu tanpa bermaksud ke arah peleburan atau sinkretisme. Keterbukaan ini bisa dipahami juga sebagai kemauan untuk menghargai kekhasan masing-masing agama. Dalam konteks keterbukaan ini, peserta dialog harus setia pada intuisi awal pendiri agamanya dan juga kesediaan mengubah diri, membiarkan diri ditentukan dan ditempa oleh agama yang lain. Tuntutan ke arah itu menunjukkan pentingnya sikap saling percaya dan kehendak baik untuk mencari bersama kehendak Tuhan bagi dunia dan berusaha melaksanakannya lewat agama dan kelompok agama masing-masing.

B. Nilai-Nilai Mendasar Sila Kedua

‘Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab’ merupakan rangkaian frase ‘kemanusiaan’, yang terdiri dari akar kata ‘manusia’ dan afiks ke- /-an. Meskipun demikian, isi sila atau substansinya adalah utuh dan tidak tercerai berai dari sila-sila lainnya. Artinya, gambaran ideal manusia di Indonesia berdasarkan nilai-nilai mendasar sila kedua ini adalah memuliakan Tuhan dengan bersikap dan bertindak adil dan beradab kepada sesama, mendukung dan menjaga keutuhan bangsa, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung kesetaraan hak-hak, dan bersolidaritas terhadap sesama dalam realitas kehidupan sosial. Nilai-nilai mendasar itu menjadi spirit bahwa iman kepada Tuhan haruslah berdimensi kemanusiaan. Dalam konteks itu, hubungan yang baik dengan sesama dalam komunitas dilandasi oleh iman kepada Tuhan yang berprikemanusiaan, bukan iman yang sektarian.

Nilai-nilai mendasar sila kedua ini berakar dalam pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Semula, sila kedua ini berbunyi “Internasionalisme, atau Perikemanusiaan.”³⁴ Dalam proses perumusan selanjutnya, sila kedua diubah redaksionalnya menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁵ Perubahan pada rumusan sila kedua ini bukan tanpa maksud dan juga bukan dimaksudkan untuk mereduksi kandungan nilai-nilai mendasar yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Perubahan dimaksudkan untuk mempertegas nilai-nilai kemanusiaan dan menekankan pentingnya manusia sebagai manusia menghormati sesamanya sebagai

³⁴ A.M.W. Pranarka, *op.cit.*, hal. 32.

³⁵ Perubahan redaksional pada sila-sila Pancasila terjadi pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945.

sesama ciptaan Tuhan. Dalam spirit itu, manusia di manapun juga dipandang setara, memiliki kebebasan, dan hendaknya hidup bersaudara satu dengan yang lainnya. Itulah ciri khas manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas oleh Tuhan. Berdasarkan gagasan itu spirit yang terkandung dalam sila kedua adalah supaya setiap insan menjunjung kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan universal. Spirit itu menjadi daya interaktif antarmanusia di Indonesia dan antarbangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

b.1. Kesetaraan Manusia

Agama-agama mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang luhur martabatnya. Kedudukan atau derajat manusia sebagai ciptaan Tuhan diyakini sama atau setara. Secara sosio-kultural, manusia adalah makhluk yang tidak pernah menyendiri. Hidup manusia personal, mengikuti Martin Heidegger, selalu “ada dalam dunia” dan “bersama yang lain”. Dunia adalah realitas yang disadari sebagai dalam konteks keberadaan diri bersama yang lain sehingga “ada dalam dunia selalu dalam kerangka “ada bersama yang lain”.³⁶ Hidup adalah pengalaman akan kebersamaan dengan yang lain. Pengalaman itu membentuk kesadaran setiap pribadi bahwa dirinya setara dengan yang lain dan selalu dalam ketergantungan pada pihak lain. Kesadaran akan kesetaraan itu tampak pada kepedulian kepada pihak lain. Ketika manusia personal peduli pada sesamanya, dia menghormati hak-hak sesamanya. Itulah yang menghantar seseorang menuju kondisi hidup yang “adil dan beradab”.

Gagasan Sukarno mengenai kemanusiaan selalu relevan sebab mengandung pesan kesetaraan derajat kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam hidup berkomunitas. Bagi Sukarno, kesetaraan derajat kemanusiaan adalah modal untuk membangun Negara Indonesia merdeka, sebuah Negara yang majemuk dalam suku, agama, ras, dan golongan. Spirit kesetaraan itu tampak pada muatan pesan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang, antara lain, menegaskan bahwa negara yang hendak dibangun bukan untuk satu orang, bukan untuk sesuatu golongan, juga bukan untuk mengagungkan satu orang saja, bukan untuk memberikan kekuasaan untuk satu golongan yang kaya, juga bukan

³⁶ Martin Heidegger, 1962. *Being and Time*, San Francisco: Herper, hal. 146.

untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Negara merdeka yang hendak kita dirikan, kata Sukarno, adalah suatu Negara “semua buat semua”.³⁷

Gambaran Negara *a la* Sukarno itu menempatkan kesetaraan kemanusiaan sebagai nilai dasarnya. Bagi Sukarno, kesetaraan derajat dan martabat kemanusiaan di Indonesia adalah alasan mendasar atau utama bagi pembangunan Negara Indonesia merdeka. Dalam konteks Negara yang merdeka, visi kemanusiaan Sukarno jelas, yakni: manusia siapapun dia adalah setara derajatnya, memiliki kebebasan, dan hidup dalam persaudaraan. Bisa jadi bahwa gagasan itu mendapat pengaruh dari Negara merdeka lainnya. Gagasan serupa juga dapat kita temukan dalam gerakan kesadaran akan kesetaraan kemanusiaan dalam, misalnya, *Virginia Bill of Rights*, Juli 1776:

“Bahwa segala manusia diciptakan sama, diberkati oleh pencipta dengan beberapa hak yang tak tergantikan, bahwa di antara hak-hak ini adalah Hidup, Kemerdekaan, dan pencarian akan Kebahagiaan.”³⁸

Spirit *Virginia Bill of Rights* tentu memengaruhi segala bangsa manusia pada jamannya. Gema gaungnya pun tetap menggelegar dan maknanya selalu relevan hingga pada masa kini, bahwa manusia itu diciptakan sama (oleh Sang Pencipta). Besar kemungkinan bahwa kesadaran tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia akan kesederajatan manusia dan bangsa-bangsa di dunia pada masa penjajahan mendapat pengaruh dari visi kemanusiaan universal dari *Virginia Bill of Rights*.

Dalam konteks nilai-nilai mendasar sila kedua, praksis kemanusiaan yang menunjukkan spirit Pancasila adalah mengakui dan menempatkan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk mewujudkan kondisi hidup yang bermartabat. Seruan spirit ini menjadi tanda dan lonceng peringatan bagi setiap tindakan yang dehumanistik. Artinya, di Negara Indonesia yang merdeka tidak ada tempat untuk tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan daerah. Segala tindakan diskriminatif terhadap manusia adalah bertentangan dengan spirit sila kedua. Nilai mendasar kesetaraan manusia ini melarang setiap manusia di Indonesia dan di seluruh bumi ini bertindak destruktif kepada sesamanya. Tindakan diskriminatif, dehumanistik, dan destruktif apapun alasan dan

³⁷ Ir. Sukarno, *op.cit.* hal. 18.

³⁸ Rachmat Subagyo, 1955. *Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, hal. 58.

latarbelakangnya adalah pengkhianatan terhadap Pancasila sebab menyangkal anugerah kodrati yang melekat pada setiap manusia, yakni kesetaraan yang berakar dalam kebebasan sebagai manusia. Berikut adalah ulasan mengenai kebebasan manusia sebagai dasar dari kesetaraan kemanusiaan universal.

b.2. Kebebasan

Bila kesetaraan derajat kemanusiaan adalah prasyarat bagi situasi hidup manusia yang ideal dalam konteks kebersamaannya, itu mengisyaratkan adanya kebebasan sebagai anugerah kodrati manusia. Adalah mustahil kita berbicara tentang kesetaraan manusia manakala kita mengabaikan dimensi kodrati yang bersifat terberi pada dirinya yaitu kebebasannya sebagai pribadi. Kesetaraan derajat sebagai manusia berlandaskan kebebasannya sebagai manusia. Kebebasan itulah yang memungkinkan adanya kesetaraan yang kemudian menjadi landasan bagi adanya kesamaan hak-hak setiap manusia dalam konteks kehidupan bersama. Tanpa kebebasannya, manusia individual dan komunal mengalami kendala dalam mewujudkan komunitas yang manusiawi. Dalam pengertian itu, seruan ke arah “kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah seruan akan pentingnya mengakui kebebasan setiap manusia dan pembebasan manusia dari kondisi hidup yang dehumanistik.

Secara kodrati, manusia lahir dalam kondisi “bebas”. Sumber kebebasan manusia adalah Allah, Sang Penciptanya. Sementara secara sosiologis, hal itu pada umumnya dikaitkan dengan kebutuhan masing-masing individu, antara lain, menyangkut kebutuhannya akan pengakuan, penjaminan, dan pemenuhan hak-hak sosialnya agar ia mampu mewujudkan kondisi hidup yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, batasan kebebasan seseorang adalah kebebasan sesamanya. Dan setiap pribadi yang memiliki kebebasan, juga memiliki hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Singkatnya, kebebasan sebagai manusia adalah salah satu nilai mendasar yang terkandung dalam sila kedua ini, sebab sila ini mengusung pentingnya menghormati kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Dalam konteks itu, implementasi nilai mendasar kebebasan dalam konteks nasional dan internasional adalah hormat pada kemerdekaan seseorang dan suatu bangsa. Seruan ini sejalan dengan apa yang diserukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

b.3. Persaudaraan

Dalam uraiannya tentang makna sila kedua, Sukarno menegaskan bahwa sila berlambang rantai yang terdiri dari gelang-gelangan persegi dan bundar ini mengandung makna relasi antarmanusia secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (bangsa dengan bangsa). Menurut Sukarno, corak relasi itu telah berlangsung sejak jaman purbakala. Corak itu ia hadirkan dalam simbol rantai yang terdiri dari gelang-gelangan persegi dan bundar yang menyimbolkan relasi yang tiada putus-putusnya antara wanita dan pria. Persegi melambangkan wanita, bulat melambangkan pria. Relasi yang berkelanjutan tanpa henti antara wanita dan pria itulah yang bermuara pada komunitas manusia dan kemudian relasi itu berkembang menjadi relasi antarkomunitas manusia atau antarabangsa di dunia ini. Dengan kata lain, lambang rantai yang terdiri dari gelang-gelangan persegi dan bundar adalah sebuah ungkapan simbolik mengenai relasi abadi antarmanusia dan antarabangsa. Kesalingterkaitan itulah inti kemanusiaan yang dihayati dalam perikemanusiaan. Sukarno menggarisbawahi bahwa bangsa Indonesia penting menyadari hidupnya dalam kebersamaan dalam masyarakat umat manusia :

*“Saudara-saudara...didalam abad kedupuluh...demikian pula didalam beberapa abad yang terdahulu, apalagi didalam abad yang akan datang. Tiada manusia dapat berdiri sendiri, manusia adalah satu makhluk masyarakat, manusia adalah suatu homo socius. Demikian pula bangsa tak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup didalam masyarakat umat manusia, didalam masyarakat bangsa-bangsa”.*³⁹

Pernyataan Sukarno di atas menegaskan bahwa Kemanusiaan adalah alam manusia itu sendiri. Sementara perikemanusiaan, katanya, adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ada hubungannya. Perikemanusiaan adalah panggilan dan dorongan yang berasal dari rasa terdalam, dari hati nurani, dari jiwa dan kehendak seseorang yang bulat untuk mengangkat jiwanya dan (jiwa) sesamanya manusia lebih tinggi dari pada jiwa binatang.⁴⁰ Rasa perikemanusiaan, kata Sukarno, adalah hasil pertumbuhan rohani, hasil pertumbuhan kebudayaan, hasil pertumbuhan alam dari tingkat

³⁹ Sukarno, *Tjamkan Pancasila.*, hal. 120.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 121.

rendah ke taraf tinggi, dan hasil evolusi dari kalbunya manusia.⁴¹ Jadi, spirit lainnya yang terkandung dalam sila kedua ini adalah hidup dalam persaudaraan universal, seperti tampak dalam ungkapan Sukarno:

*“kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chovinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan ‘Deutschland über Alles’ tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggidi atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Janganlah kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tapi kita harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa.”*⁴²

Dalam konteks persaudaraan universal, setiap manusia dituntut untuk saling memuliakan sesamanya, mengangkat harkat dan martabat sesamanya dalam pergaulan yang saling memanusiaikan. Oleh karena itu, kata Sukarno, jika kita berbuat sesuatu yang rendah yang membikin celaka kepada manusia lain, kita melanggar (hukum) perikemanusiaan.⁴³

C. Nilai-Nilai Mendasar Sila Ketiga

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, acap kali diinterpretasikan atau dimaknai dengan nasionalisme dan cinta tanah air. Pada mulanya, Sukarno menyebutnya sebagai “kebangsaan”. Tentu yang dimaksudkan adalah kebangsaan Indonesia. Mengenai kebangsaan, Sukarno memang mengikuti dan mengamini pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer. Tapi ia pun mengakui bahwa pandangan kedua teoretikus itu belumlah lengkap.

Ernest Renan menginspirasi Sukarno bahwa bangsa adalah satu jiwa (*“une nation est un ame”*). Artinya, bangsa adalah jiwa. Satu bangsa adalah satu jiwa.⁴⁴ Maksudnya, kata Sukarno, “satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar” (*“une nation est un grand*

⁴¹ Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 194-195.

⁴² Sukarno, *op.cit.* hal, 117-119; lih juga pada Yudi Latif, hal. 180.

⁴³ *Ibid.*, hal. 121.

⁴⁴ Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 153-155.

solidarite”). Jadi, yang membuat bangsa itu bersatu (satu jiwa) menurut Renan adalah solidaritas antarsesama anggotanya, yang juga kemudian oleh Ernest Renan disebut “kehendak untuk hidup bersama”.⁴⁵ Sementara dari Otto Bauer, gagasan yang menginspirasi Sukarno adalah “persamaan watak”. Berangkat dari konsep bangsa dari kedua teoretikus itu, Sukarno kemudian merumuskan konsep bangsa yang menurutnya tepat untuk bangsa Indonesia yang majemuk. Ia pun menegaskan pentingnya Geopolitik. Jadi, selain menggamit pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer tentang bangsa, Sukarno kemudian melengkapinya dengan teori geopolitiknya. Uraian berikut adalah kupasan dari rangkaian gagasan Renan, Bauer, dan Sukarno.

c.1. Geopolitik

Istilah geopolitik berakar dari kata “geo”, dari perkataan geografi, peta, gambarnya. Geopolitik adalah hubungan antara letaknya tanah dan air, petanya itu, dengan rasa-rasa dan kehidupan politik.⁴⁶ Bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia punya keinginan bersatu, keras ia punya *charaktergemeinschaft*, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit.⁴⁷ Untuk mempertegas konsep bangsa dalam kaitannya dengan geopolitik, Sukarno berkata:

*“Kalau sekadar bagian daripada unit, bukan bangsa!
Minangkabau bukan bangsa bukan bangsa. Solo bukan bangsa.
Yogya bukan bangsa. Bugis bukan bangsa. Madura bukan
bangsa. Bali bukan bangsa. Lombok bukan bangsa”.*⁴⁸

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa bangsa bagi Sukarno adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama dalam kesatuan wilayah yang mencakup keseluruhan unit. Geopolitik yang dimaksudkan Sukarno adalah mencakup seluruh wilayah dan unit-unit suku bangsa yang tersebar di seluruh bekas daerah jajahan Belanda. Bagi Sukarno, perpaduan antara kehendak untuk hidup bersama, persamaan watak, dan kesatuan dari semua unit di atas satu wilayah yang nyata itu dimungkinkan karena adanya rasa kebangsaan. Sementara rasa kebangsaan itu diperkuat oleh solidaritas

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 156-157.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 166.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 167.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 168.

dan kehendak hidup bersama serta persamaan watak berdasarkan pengalaman hidup bersama. Di atas semuanya itu adalah pentingnya geopolitik. Dalam konteks geopolitik itu, bahasa berperan sebagai alat untuk menumbuhkan solidaritas sosial, kehendak hidup bersama, dan persamaan watak berdasarkan pengalaman bersama. Rasa kebangsaan, yakni merasa bagian utuh dari bangsa Indonesia hanya mungkin dirawat, diteruskan dari generasi ke generasi melalui bahasa, terutama bahasa yang satu atau kesamaan bahasa. Dalam hal itu, Sukarno berbeda pandangan dengan Renan yang memandang kesamaan bahasa bukanlah syarat mutlak bagi keutuhan bangsa. Bagi Sukarno, bahasa yang satu justru menjadi kekuatan mendasar untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang hebat. Berikut adalah analisis atas nilai-nilai mendasar di balik sila ketiga berdasarkan pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer yang diamini Sukarno dan dipertegasnya dengan dengan konsep geopolitik.

c.1.1. Solidaritas dalam Kehendak Hidup Bersama

Bagi Ernest Renan, yang memungkinkan suatu bangsa itu eksis adalah “satu jiwa yang solider”. Sukarno mengamini pandangan mahaguru dari universitas Sorbonne tersebut. Bagi Renan, persamaan bahasa bukanlah syarat mutlak yang mengutuhkan bangsa, meskipun ia menyadari bahwa kalau bahasanya satu lebih kuat persatuannya. Sukarno pun memandang benar ungkapan Renan. Tapi Sukarno juga menegaskan: *“kalau bahasanya satu lebih hebat rasa kebangsaannya, seperti kita ini. Kita ini amat berbahagia karena mempunyai bahasa satu”*.⁴⁹

Kembali ke gagasan Renan, satu jiwa yang solider adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa. Ia adalah tanda bagi bangkit atau hidupnya nasionalisme, atau cinta tanah air. Ia juga merupakan kata kunci untuk persatuan komunitas sosial. Tanpa adanya jiwa yang solider, tidak mungkinlah komunitas sosial mengalami keberlanjutan eksistensinya. Jiwa yang solider adalah perekat bagi keutuhan komunitas sosial.

Untuk konteks Indonesia yang begitu luas dan kaya akan perbedaan, tanpa jiwa yang solider akan rentan konflik. Ketika bangsa yang majemuk ini tidak lagi memiliki solidaritas terhadap yang lain, keanekaragaman pun dipandang sebagai ancaman. Bukan persatuan dalam keberagaman yang diperjuangkan, tapi kesatuan dalam keseragaman. Supaya

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 154.

terwujud harapan akan persatuan dalam keberagaman (bhinneka tunggal Ika), solidaritas sosial perlu diintensifkan dan diaktualisasikan dalam kenyataan hidup bersama melalui cinta, keterbukaan, penerimaan dan kepedulian kepada sesama yang berbeda latar belakang kehidupan suku, agama, ras, dan golongannya (SARA). Daya pikat dan ikat yang merajut perbedaan di Indonesia adalah kesadaran akan dan kepedulian pada keberadaan pihak lain sebagai bagian integral dari eksistensi diri. Itulah solidaritas sosial. Kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial memang perlu ditumbuhkan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.⁵⁰ Tapi seperti kata Sukarno, solidaritas dan kehendak hidup bersama saja tidaklah cukup. Perlu adanya “persamaan watak” dan geopolitik.

c.2. Persamaan Watak Berdasarkan Pengalaman Bersama

Bila Ernest Renan menginspirasi Sukarno dengan “satu jiwa yang solider”, Otto Bauer memantik kesadaran Sukarno akan pentingnya “persamaan watak”. Untuk eksistensi sebuah bangsa, seperti Renan juga, Otto Bauer pun membantah mutlak perlunya persatuan bahasa, membantah mutlak perlunya persatuan agama, membantah mutlak perlunya persatuan warna kulit, membantah mutlaknya persatuan keturunan sebagai syarat bagi sebuah bangsa. Bagi Otto Bauer, yang menentukan bangsa adalah pengalaman bersama atau mengalami nasib bersama selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Pengalaman bersama itulah yang menumbuhkan persatuan watak. Dan persamaan watak itulah yang menentukan sifat bangsa.⁵¹

Kata Sukarno, bagi Otto Bauer, bangsa adalah satu *individualiteit*, mempunyai watak sendiri, mempunyai karakter sendiri. *Charaktergemeinschaft*, persamaan watak itu yang menetapkan, menentukan corak bangsa. Itu yang menentukan bangsa atau bukan bangsa.⁵² Rupanya Sukarno mengakui bahwa setelah ia memikirkan teori-teori Ernest Renan dan Otto

⁵⁰ Cinta tanah air bisa dibuktikan dengan kualitas diri dalam solidaritas sosial. Lembaga pendidikan bertanggung-jawab dalam membentuk generasi bangsa Indonesia menjadi generasi yang mencintai tanah airnya melalui prestasi-prestasi pendidikan formal dan internalisasi nilai-nilai dasar yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial sebagai kata kunci untuk mengaktualkan rasa cinta pada tanah air. Bila kesadaran akan solidaritas sosial tinggi, mentalitas dalam mengabdikan kepada ibu pertiwi melalui karya nyata dalam berbagai ranah kehidupan (politik, ekonomi, pendidikan, dll) akan bermuara pada kepentingan hidup bersama. Dalam kerangka itu, lembaga Pendidikan penting membiasakan para peserta didik untuk mengekspresikan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dengan bersikap solider pada sesama dan berprestasi dalam ranah akademik, menghormati keragaman identitas, bersikap, bertindak, dan berkata-kata yang jujur, adil, dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 162.

⁵² *Ibid.*, hal. 163-164.

Bauer itu, menggantinya mulai dari tahun '25, '26 (1925-1926), ia pun sampai pada kesimpulan bahwa teori Renan dan Bauer itu tidak lengkap.⁵³ Sukarno memang mengakui kalau ia menerima konsep bangsa Ernest Renan dan Otto Bauer, tapi sekaligus ia mengakui bahwa konsep-konsep itu belum lengkap sehingga ia perlu menegaskan kembali dengan pentingnya satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan, satu kesatuan. Berikut adalah penalaran mengenai Geopolitik yang dimaksudkan Sukarno.

Jadi, prinsip kebangsaan yang kemudian menjadi “Persatuan Indonesia” merupakan upaya Sukarno untuk merekat persatuan di antara fakta perbedaan suku, agama, ras, dan golongan serta daerah di negeri jajahan Belanda dan Jepang. Tanpa rasa kebangsaan tidak mungkin adanya persatuan. Persisnya, nilai mendasar di balik sila ketiga ini adalah paham kebangsaan. Paham tersebut terbentuk atas dasar kehendak untuk hidup bersama, persamaan watak, dan geopolitik.

D. Nilai-Nilai Mendasar Sila Keempat

Salah satu fakta Indonesia yang disadari Sukarno adalah pluralitas dalam suku, agama, golongan, dan daerah. Kesadaran itu mewarnai pergaulannya selama masa pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kesadaran dan pengalaman yang sama juga mewarnai interaksi dan dialog politiknya yang mengedepankan demokrasi.

Sukarno menyadari kebhinnekaan adalah kekuatan atau modal sosial untuk membangun sebuah Negara yang kuat. Selain itu, tata kelola sebuah Negara juga menentukan bagi kuatnya sebuah negara. Dalam konteks itu, Sukarno menegaskan demikian: “saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”.⁵⁴ Pernyataan Sukarno ini menunjukkan kehendaknya agar negara Indonesia yang *bhinneka* dikelola dengan syarat-syarat yang menjurus pada demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Menurut Sukarno, demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk Indonesia tidak perlu identik dengan yang berlaku di negara-negara lain.⁵⁵ Demokrasi di Indonesia hendak dimaksudkan untuk mewujudkan satu masyarakat keadilan sosial. Demokrasi ini jelas bukan

⁵³ *Ibid.*, hal. 164.

⁵⁴ Sukarno, 1964. hal. 25.

⁵⁵ Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 237.

parlementaire democratic,⁵⁶ juga bukan fasisme, tapi demokrasi yang mengedepankan permusyawaratan, perwakilan. Dalam kerangka itu, Sukarno menegaskan bahwa demokrasi adalah satu ideologi politik, satu alam pikiran, alam pikiran politik yang terbuat oleh suatu cara produksi di dalam suatu periode. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia hendaklah yang relevan dengan keadaan-keadaan Indonesia, konteks sosio-kultural, ideologi politik, alam pikiran politik Indonesia yang terbuat oleh suatu cara produksi di dalam sesuatu periode.⁵⁷ Pada masa itu, Indonesia baru saja akan merdeka dan kalau Indonesia memasuki alam kemerdekaan, demokrasi yang cocok adalah yang mampu mengakomodasi kepentingan sebagian besar masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih bertani secara tradisional dan mengandalkan alat produksi tradisional, yang oleh Sukarno disebut kaum marhaen (rakyat kebanyakan). Marhaensime adalah paham atau pikiran politik yang merujuk pada kenyataan hidup dan alat produksi rakyat kebanyakan di Indonesia pada masa itu. Itulah sebabnya, Sukarno mengedepankan permusyawaratan, perwakilan sebagai syarat mutlak demokrasi.

Oleh karena itu, seruan sila keempat adalah pentingnya menata kehidupan bernegara dalam iklim yang demokratis. Artinya, tata kelola hidup bersama dirumuskan dalam semangat musyawarah untuk mufakat. Praksis pendidikan di Indonesia penting membiasakan para peserta didik menerapkan nilai-nilai demokrasi melalui diskusi kelompok yang memungkinkan untuk belajar bersikap terbuka pada perbedaan pandangan, mau saling mendengarkan, dan menerima keputusan bersama yang demokratis. Sementara dalam konteks politik praktis, seruan ini diarahkan pada mekanisme pengambilan keputusan oleh para elit politik agar memenangkan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia di atas kepentingan partai dan golongan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola kehidupan bersama yang demokratis. Ketika ada kemauan untuk duduk bersama dalam spirit kesetaraan peran dan kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan perbedaan pandangan, deskripsi mengenai manusia yang bijaksana sungguh tergarut dalam

⁵⁶ Sukarno menolak *Parlementaire democratic* karena merupakan ideologi politik kapitalisme yang sedang naik. Atas dasar hasil dari *Parlementaire democratic* ini kapitalisme di Eropa Barat berkembang biak dengan pesat. Sementara Fasisme ditolaknya karena merupakan ideologi kapitalisme yang sedang turun atau menurut sosiolog Karl Steurman, fasisme adalah usaha yang terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme yang hendak mati. Lih. *Ibid.*, hal. 240-241; 258.

⁵⁷ Menurut Sukarno, demokrasi dibutuhkan karena suatu cara produksi dalam suatu periode membutuhkannya. Ia adalah produk dari alam pikiran politik yang terbuat oleh cara produksi dalam suatu periode. Artinya, suatu periode yang cara produksinya belum membutuhkan *parlementaire democratie*, belum timbul pikiran *parlementaire democratie* itu, misalnya, periode Feodalisme. Lih. *Ibid.*, hal. 247.

konteks dan praksis kehidupan berdemokrasi. Agenda utama di sini adalah bagaimana mewujudkan praksis demokrasi yang diwarnai oleh keinginan untuk memenangkan kepentingan bangsa dan Negara. Dalam konteks itu, permusyawaratan dan perwakilan adalah nilai mendasar dalam praksis berdemokrasi di Indonesia.

d.1. Permusyawaratan

Permusyawaratan mengisyaratkan diakuinya kemerdekaan dan hak setiap pribadi untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam forum, kelompok diskusi, dan rapat. Proses berdemokrasi tampak hidup dan ideal ketika terjadi musyawarah untuk mufakat. Proses demikian diwarnai oleh adanya argumentasi-argumentasi kritis dari setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Meskipun demikian, kerendahan hati, kesopanan, dan kebijaksanaan tetap dijunjung tinggi.

Sebagai proses demokrasi, nilai dasar permusyawaratan meminta adanya musyawarah (merumuskan, merencanakan, dan mengusulkan gagasan-gagasan) untuk kemudian secara mufakat memutuskan perkara-perkara yang penting untuk hidup bersama. Prinsip musyawarah untuk mufakat ini penting dibiasakan dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia. Dalam praksisnya, setiap pribadi membiasakan dirinya untuk berdiskusi dalam kelompok, belajar membuka diri untuk pihak lain, mau saling mendengarkan, dan mau menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan mengambil keputusan bersama.

Dalam konteks politik praktis, permusyawaratan menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan oleh para elit politik atau perwakilan rakyat agar memenangkan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia di atas kepentingan partai dan golongan. Manakala terjadi kegagalan dalam proses musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dapat diambil dengan sistem voting (suara terbanyak adalah yang menentukan keputusan yang sah). Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola kehidupan bersama yang demokratis. Ketika ada kemauan untuk duduk bersama dalam spirit kesetaraan peran dan kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan perbedaan pandangan, deskripsi mengenai manusia yang bijaksana sungguh tergarut dalam konteks dan praksis kehidupan berdemokrasi. Agenda utama di sini adalah bagaimana mewujudkan praksis demokrasi yang diwarnai oleh keinginan untuk memenangkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan partai dan golongan. Berkenaan dengan demokrasi, mengiuti Fritz Adler, Sukarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia mengejar demokrasi politik-ekonomi.

Kata Sukarno, “demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi”.⁵⁸

d.2. Perwakilan

Permusyawaratan, perwakilan mengisyaratkan adanya ruang dinamis bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Itulah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam prosesnya, kata Sukarno, ada perjuangan faham yang bergolak dan selalu bergosok di antara para calon wakil dari berbagai golongan. Dalam iklim demokrasi, proses demikian adalah wajar dan perlu untuk perwujudan Negara demokratis yang sehat dan kuat. Kata Sukarno: “...kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya”.⁵⁹

Dari ungkapan Sukarno di atas, tampak bahwa prinsip perwakilan yang dikumandangkannya mengisyaratkan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat atau Negara. Memang alat untuk mencapai tujuan masyarakat, kata Sukarno, tidak selalu demokrasi.⁶⁰ Tapi, katanya, dalam cara keyakinan dan kepercayaan bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat bukan sekadar alat secara teknis saja. Lebih dari itu, kedaulatan rakyat adalah alat secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan. Ia kemudian menyebut demokrasi sebagai satu “geloof” atau satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Sebagai satu “geloof”, kata Sukarno, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia.⁶¹ Artinya, demokrasi kita merupakan perwujudan Pancasila sebagai kepribadian Indonesia.⁶² Dalam konteks itu, Sukarno menegaskan agar praksis demokrasi Indonesia tidak perlu identik dengan yang diterapkan di negara-negara lain.⁶³

⁵⁸ Ir. Sukarno, hal. 158.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 27.

⁶⁰ Sukarno menjelaskan bahwa selain demokrasi, alat untuk mencapai tujuan bisa berupa nasionalis-sosialisme (seperti kaum Hitleris yang fasisme diktatur) atau komunisme (seperti kaum komunis dengan diktatur proletariat). Lih. *Ibid.*, hal. 145.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 146.

⁶² Kepribadian Indonesia yang terjelma di dalam dasar Pancasila, menurut Sukarno, adalah cinta merdeka, tidak mau dijadikan budak orang lain. Tetapi juga menghormati kemerdekaan orang lain. Ingin bersahabat dengan semua manusia di dunia ini. Ingin bersahabat dengan semua bangsa di dunia ini. Ingin bersahabat dengan semua Negara di dunia ini. Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 67-68.

⁶³ Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 237.

Berkenaan dengan demokrasi, mengikuti Fritz Adler, Sukarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia mengejar demokrasi politik-ekonomi. Kata Sukarno, “demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi”.⁶⁴ Mengikuti Adler, Sukarno berujar, demokrasi politik saja tidak cukup. Sebab, orang tidak dapat menghilangkan rasa lapar sang pengemis hanya dengan memberikan kitab Undang-Undang Dasar (UUD) atau dengan mengatakan bahwa semua orang memiliki kesetaraan hak di hadapan UUD.⁶⁵ Demokrasi politik adalah kesetaraan di hadapan hukum dan Undang-Undang Dasar. Tapi, kaum lemah secara ekonomi yang setara dengan kaum kaya di hadapan hukum tetap saja dieksploitatif oleh kaum kaya.

Oleh karena itu, perlu adanya demokrasi politik dan ekonomi, yang dicakup dalam nama “*sociale democratie*”. Melalui sosial demokrasi itu, akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur sebab demokrasinya disusun dan dijalankan secara selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Sukarno meminta rakyat Indonesia meninggalkan ekonomi liberal sebab hanya menguntungkan pemilik modal dan menyengsarakan kaum buruh, meninggalkan cara berpikir *parlementaire democratie* sebab merupakan politik demokrasi yang menjadi ideologi kaum kapitalis, dan menyusun demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri.⁶⁶ Demokrasi yang disusun di atas kepribadian bangsa Indonesia itu bukan sekadar alat teknis, tapi suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia yang diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita akan satu masyarakat yang adil dan makmur yang tidak mungkin dapat dicapai dengan ekonomi liberal yang dikuasai kapitalisme dan *parlementaire democratie* yang hanya menegaskan keadilan di hadapan hukum dan undang-

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 158.

⁶⁵ Sukarno menegaskan bahwa *Parlementaire democratic* hanya menjamin kesetaraan hak pilih di hadapan undang-undang dasar, tapi tidak di lapangan ekonomi. UUD adalah politik demokrasi yang menegaskan bahwa semua orang sama-sama mempunyai hak dipilih, mempunyai hak mengeluarkan pikiran dan pendapat, sama-sama boleh menjadi menteri, menjadi hakim, tapi dalam kenyataannya orang miskin tetap dieksploitasi oleh orang kaya, tidak ada sama rata-sama rasa dalam bidang ekonomi. Kondisi ini hanya dapat diatasi dengan mengadakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang dapat dicakupkan dalam satu perkataan “*sociale democratie*” (demokrasi social) yang dilaksanakan dalam apa yang kemudian disebut Sukarno dengan demokrasi terpimpin bersama dengan ekonomi terpimpin. Lih. *Ibid.*, hal. 159-160.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 270.

undang. Demokrasi yang dimaksudkan itu dikenal dengan Demokrasi Terpimpin, yang kemudian menuai protes dan kritik dari para elit politik di Indonesia.⁶⁷

E. Nilai-Nilai Mendasar Sila Kelima

Keadilan adalah suatu kondisi sosial yang tercipta manakala adanya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam komunitas. Setiap pribadi dalam komunitas membutuhkan keadilan. Tuntutan akan keadilan berakar dalam pertimbangan etis bahwa hidup setiap pribadi dalam komunitasnya harus manusiawi, layak, dan bermartabat. Menurut Ulpianus, pakar hukum Romawi kuno, adil atau tidaknya perilaku seseorang terhadap sesamanya dalam komunitasnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menghargai hak-hak sesamanya. Istilah yang dia kemukakan untuk itu adalah "*tribuere jus suum cuique*" (memberi masing-masing haknya).⁶⁸

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa tindakan adalah adil manakala tujuannya adalah untuk menghormati hak-hak seseorang. Dalam pengertian itu, keadilan sosial menjadi seruan universal bahwa setiap pribadi dalam komunitasnya berhak atas situasi kehidupan yang sejahtera dan makmur. Tapi, situasi demikian menjadi nyata manakala seseorang memiliki kebebasannya dan menghormati kebebasan pihak lain. Tanpa kebebasannya, tidak mungkinlah seseorang menuntut keadilan baginya sebab keadilan adalah milik mereka yang mempunyai kebebasan alias tidak dijajah. Itulah barangkali mengapa Plato memahami keadilan sebagai kebijakan utama sebab menjadi dasar untuk setiap pribadi memelihara dan memiliki kebebasannya dalam komunitas.

Dalam konteks Indonesia selama alam penjajahan, keadilan adalah kata dan istilah yang mahal untuk dituntut dan ditemukan dalam praksis sosial sebab takaran untuk itu dipegang oleh pihak penjajah. Alam imperialisme menaruh keadilan pada pihak penjajah, bukan pada pihak kaum terjajah. Kondisi ini menjadi lonceng pengingat bagi Sukarno ketika

⁶⁷ Gagasan demokrasi terpimpin dicanangkan Sukarno selain untuk mengatasi krisis demokrasi pada masa itu, juga untuk mengupayakan perwujudan suatu keadilan sosial bagi setiap warga Negara. Demokrasi terpimpin mengupayakan keadilan sosial bukan hanya di bidang hukum dan perundang-undangan, tapi juga di bidang ekonomi sehingga tidak ada lagi rakyat yang melarat. Berdasarkan itu, demokrasi terpimpin ini bersama dengan ekonomi terpimpin diyakini Sukarno dapat diandalkan untuk merealisasi keadilan di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Namun, itu mendapat kritik dari Hatta sebagai suatu diktator, totaliter sebab serba bercorak etatisme, yang justru meniadakan proses demokrasi. Lih. Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi, hal. 431-433.

⁶⁸ Hak dalam konteks ini lebih dimaksudkan sebagai prinsip formal bagi keadilan, bukan prinsip materilnya. Substansi hak bersifat relatif dan kontekstual. Namun, tuntutan universalnya adalah bahwa hak-hak setiap orang harus dihormati. Lih. K. Bertens, 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, hal. 87.

menggemakan dasar-dasar penting untuk mendirikan Negara Indonesia yang kala itu menuju alam kemerdekaan.

Belajar dari sejarah dunia tentang kenyataan sosial di negara-negara Eropa pada masa itu yang diwarnai oleh pertentangan kelas dan berdasarkan pengalaman perjuangannya serta kenyataan sosial di Indonesia kala itu, Sukarno pun sampai pada keyakinannya bahwa Indonesia harus dikelola dengan sistem yang tidak perlu identik dengan negara-negara Barat. Sukarno menggambarkan keadilan sosial identik dengan sosialisme Indonesia atau berdasarkan Pancasila.

e.1. Kesejahteraan Sosial

Kondisi hidup yang manusiawi perlu diupayakan secara sistematis dan terencana dalam agenda kepemimpinan di negeri ini. Tugas pemerintah negeri ini memang mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi segenap anak negeri. Tapi bila pemerintah belum mampu mewujudkannya, tugas tersebut juga menjadi tanggungan bersama. Di sini tuntutanannya adalah bagaimana segenap manusia di Indonesia menjadi pribadi yang solider atau peduli kepada pihak-pihak yang tidak berdaya agar keluar dari kondisi-kondisi hidup yang sungguh tidak manusiawi. Spirit keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya berdimensi materil menyangkut pembangunan fisik negeri ini, tapi juga berdimensi spiritual atau mental. Artinya, menyangkut solidaritas sosial,⁶⁹ kemurahan, dan kebaikan hati masing-masing pribadi.

Sila kelima menyerukan pentingnya manusia di Indonesia menjadi pribadi yang tidak egois, tapi solider. Tuntutannya adalah agar manusia di Indonesia ini bertumbuh dalam sikap peduli kepada sesamanya yang miskin dan berkehendak baik untuk membantunya keluar dari kondisi tersebut. Tentu ini bukan berarti bahwa orang miskin tidak perlu bekerja, tapi bagaimana orang yang kaya atau orang mampu secara ekonomis dapat meringankan

⁶⁹ Solidaritas sosial memang memungkinkan bertumbuhnya rasa cinta tanah air. Solidaritas sosial melarang dan mencegah setiap pribadi untuk bertindak disintegratif. Solidaritas sosial adalah motor yang menggerakkan warga Negara Indonesia untuk berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Indonesia dari dalam dan dari ancaman pihak luar. Dalam pengertian itu, segala bentuk persoalan eksistensial seperti korupsi, konflik horizontal, kekerasan sosial, diskriminasi, dan eksploitasi lingkungan hidup yang kini berpotensi mengancam Persatuan Indonesia dapat dicegah melalui sikap dan tindakan yang menginspirasi dan mengaktualisasikan solidaritas sosial. Artinya, sikap rela berkorban demi keutuhan dan persatuan nusa dan bangsa selain dapat dilakukan dengan angkat senjata, juga dapat dilakukan dengan bersolidaritas sosial bertaraf nasional. Bila bangsa Indonesia tinggi tingkat solidaritas sosialnya, masyarakat internasional dapat dipastikan respek, segan, dan memperhitungkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh.

beban kehidupan yang miskin. Dengan demikian, prinsip kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dapat dimaknai secara kontekstual.

Bila dilihat dari latar belakang sejarah perumusannya, prinsip kesejahteraan sosial ini bertaut erat dengan gagasan Ratu Adil. Gagasan tersebut mendeskripsikan harapan bangsa Indonesia yang tak kunjung terwujud selama masa penjajahan, yakni hidup sejahtera. Oleh karena itu, gagasan Ratu-Adil (*“sociale rechtvaardigheid”*) adalah ungkapan harapan rakyat yang harus disikapi dan diupayakan pada masa kemerdekaan, yakni hidup sejahtera. Rakyat yang telah sekian lama kurang sandang, pangan, dan papan menciptakan keadilan di bawah pimpinan Ratu-Adil. Sukarno begitu yakin akan gagasannya itu sehingga ia mengajak setiap orang yang mengerti, mengingat, dan mencintai rakyat Indonesia untuk menerima prinsip *“sociale rechtvaardigheid”* atau kesejahteraan sosial. Dengan menerima prinsip *“sociale rechtvaardigheid”*, terbukalah peluang menuju persamaan dalam bidang politik dan bidang ekonomi.⁷⁰

Gagasan Sukarno tentang Ratu-Adil itu dipertegas dan dipertajamnya lagi dalam kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 3 September 1958 di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sukarno lebih jauh memaknai prinsip *“sociale rechtvaardigheid”* ini dengan istilah sosialisme Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila. Ia menegaskan bahwa, sosialisme Indonesia ini akan tercapai jika demokrasi Indonesia tidak mengikuti demokrasi Barat, tapi demokrasi yang mengedepankan prinsip permusyawaratan, perwakilan, yang di dalamnya ada kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu, Sukarno kembali menegaskan pentingnya demokrasi terpimpin sebagai jalan menuju keadilan sosial di Indonesia dalam lapangan politik dan ekonomi. Keadilan dalam konteks demokrasi terpimpin dilukiskan Sukarno sebagai kondisi *“suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. ...Semuanya bahagia, cukup sandang, cukup pangan, “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”*.⁷¹ Istilah demokrasi terpimpin yang kemudian mendapat kritik dari berbagai kalangan, pada mulanya merupakan upaya Sukarno untuk mengedepankan suatu sistem demokrasi yang berbeda dari Barat, yang tidak individualis.

⁷⁰ Sukarno, *op.cit.*, hal. 28-29.

⁷¹ Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 277-278.

Sukarno memang menolak dengan tegas *parlementaire democratie* dan fasisme karena menjadi alat industrialisme kapitalisme yang menguntungkan sebagian kecil golongan dan menyengsarakan sebagian besar rakyat. Dalam konteks sosialisme Indonesia, kata Sukarno, perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, makmur dan adil tetap dengan mempergunakan alam industrialisme. Sosialisme Indonesia tidak anti terhadap industrialisme. Alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern menjadi sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.⁷² Bukan mesin atau alat-alat yang mencelakai manusia, kata Sukarno, tapi cara kerja mesin tersebut yang perlu ditata arahnya. Di sini jelas bahwa yang ditentang oleh Sukarno adalah sistemnya, yakni bagaimana sistem demokrasi Barat dalam bidang politik dan ekonomi dipandang Sukarno merendahkan dan merugikan manusia kelas proletar.

Bangsa kita, kata Sukarno, akan mencapai keadilan sosial dengan menggunakan alam industrialisme modern asal tidak dikuasai oleh kapitalisme. Industrialisme modern, mesin dan alat-alat modern, sejauh dipergunakan untuk kepentingan umum adalah baik. Liberalisme dan kapitalisme menjadi suatu fase yang perlu dan penting, kata Sukarno, sejauh kita gunakan sebagai alam latihan, alam pengalaman menggunakan alat-alat modern, alam pengalaman hal manajemen, dan alam untuk mendidik kaum proletar.⁷³ Sampai di sini terang sekali bahwa yang ditolak oleh Sukarno adalah kultur liberalisme yang dikuasai oleh kapitalisme, bukan kultur industrialisme modern dengan kecanggihan alat-alatnya.

e.2. Gotong Royong

Dalam teori evolusi, kata Sukarno, selalu ada pertentangan kelas sosial. Pada jaman feodal terjadi pertentangan antara tuan feodal (tuan tanah) dengan kaum bawah yang difeodali. Demikian pun, dalam alam kapitalisme terjadi pertentangan antara kaum kapitalis dengan kaum proletar. Kesadaran akan kelas ini semakin bertumbuh, bergesek, bergosok sampai menipis, luntur hingga makin lama makin menghilang dan lahirlah masyarakat sosialisme. Tapi kapitalisme tidak bisa gugur dengan sendirinya. Kapitalisme hanya bisa digugurkan oleh perjuangan kaum proletar yang terhimpun dalam suatu massa aksi yang hebat.

⁷² *Ibid.*, hal. 294.

⁷³ *Ibid.*, hal. 295-296, 302-303.

Sukarno jelas tidak hendak menuntun bangsa Indonesia pada alam industrialisme kapitalisme. Wawasannya yang luas tentang bahaya dan akibat-akibat industrialisme kapitalisme seperti pertentangan kelas yang dialami rakyat di Jerman, Prancis, dan Inggris menjadi dasar pernyataannya bahwa bangsa Indonesia tidak perlu mengalami fase kapitalisme.⁷⁴ Oleh karena itu, sosialisme ala Indonesia atau yang berdasarkan Pancasila, kata Sukarno, kita upayakan melalui demokrasi terpimpin bersama dengan ekonomi terpimpin.⁷⁵ Bagaimana cara kerjanya dalam praksis politik dan ekonomi?

Cara kerjanya, kata Sukarno, berdasarkan *blueprint* yang dibuat oleh Negara. Pemimpin berperan bagaikan seorang pemimpin lagu (*drigent*) yang memimpin kelompoknya sesuai dengan *blueprint* notasi lagu yang dinyayikan bersama secara merdu. Masing-masing anggota paduan suara menyumbangkan kemampuan (tenaga, suara, kecerdasan notasinya) di bawah pimpinan *drigent* berdasarkan satu *blueprint* berupa kitab not-nya. Contoh ini dapat dimaknai sebagai gotong royong.⁷⁶ Meskipun gagasan Sukarno itu tampak menunjukkan upayanya memajukan keadilan dalam bidang politik dan ekonomi demi keutuhan dan persatuan di Indonesia, tapi coraknya yang etatisme (serba negara) itu membuat Bung Hatta yang semula menyambut “ekonomi terpimpin” lantas menolak dan mengkritiknya.

1.5 Makna Pancasila Menjadi Spiritualitas

Dalam konteks penelitian ini, istilah Spiritualitas Pancasila kami maknai sebagai: jiwa yang merasuki kehidupan bangsa Indonesia berupa perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan. Pancasila menjadi daya dorong kehidupan yang kohesif dalam iklim

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 307.

⁷⁵ Ekonomi terpimpin ini berlangsung dalam kurun waktu 1959-1966. Perekonomian memburuk karena politik menjadi “panglima”. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dalam kurun waktu 1957-1958 yang secara kebetulan bersamaan dengan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi mendorong sentralisasi politik dan ekonomi di segala bidang, yang kemudian memuncak dalam demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin, serta sosialisme ala Indonesia. Setelah dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar untuk perekonomian Indonesia. Tapi, kenyataannya tidak ada perubahan mendasar dalam UUD mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Orde Lama membuat “ekonomi terpimpin” yang mula-mula disambut baik oleh Bung Hatta lalu sangat mudah berubah menjadi “ekonomi komando” yang etatistik (serba negara), yang memang ditolak Bung Hatta. Lih. Mubyarto, 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*, Jakarta, LP3ES, hal. 78-80.

⁷⁶ Kata Sukarno, gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Lih. Sukarno, *op.cit.*, hal. 32.

kebebasan, persaudaraan, kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan. Kelima prinsip itu adalah isi dari kepribadian Indonesia, yakni cinta kemerdekaan.

Dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila menjadi ruh yang mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan, dan memberanikan setiap manusia di Indonesia untuk mengaktualkan dan merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam spirit itu, pluralitas Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila menjadi sumber keutuhan dan kekuatan dalam persatuan. Itulah sebabnya mengapa Sukarno menegaskan Pancasila sebagai landasan di mana negara dan bangsa Indonesia ini didirikan secara kekal dan abadi.

Berdasarkan uraian di atas, istilah Pancasila menjadi spiritualitas mengandung tuntutan bahwa ia dapat dipandang sebagai (1) ruh yang menjiwai (menghidupkan), mengutuhkan dan menggerakkan bangsa Indonesia menuju kondisi hidup yang humanum dan religiosum, (2) kristalisasi nilai-nilai spiritual yang menggerakkan kemampuan, keinginan, dan intelegensia setiap manusia di Indonesia, (3) hal yang bersifat immaterial, (4) daya yang membangkitkan kinerja potensi-potensi intelektualitas, rasionalitas, moralitas, dan religiusitas bangsa Indonesia secara sinergis (5), kesadaran dan sikap dasar bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan kenyataan hidup (menyangkut penghayatan dan pengalaman), dan (6) pengharapan bangsa Indonesia akan masa depan yang dicita-citakan (menyangkut realisasi hidup menurut tuntutan hidup yang konkret). Semuanya itu dapat disimpulkan dalam perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan.

1.6 Penutup

Mengartikulasikan Pancasila menjadi Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia adalah menempatkan Pancasila sebagai ruh dalam praksis kehidupan Indonesia. Dalam konteks itu, kehidupan di Indonesia hendaknya dijiwai oleh nilai-nilai dasar Pancasila, yakni: **Pertama**, hormat pada keluhuran martabat kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menghormati martabat kehidupan manusia berarti melindungi dan menjamin kebebasan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. **Kedua**, persaudaraan antar-manusia. Praksis kehidupan di Indonesia adalah berdasarkan pada persaudaraan universal. **Ketiga**, keutuhan dalam kebersamaan yang saling melindungi dan menghormati keberagaman identitas sehingga tumbuhlah perasaan persatuan dalam keberagaman. **Keempat**, kesetaraan manusia. Kebebasan manusia sebagai pribadi yang

difasilitasi secara normatif mengisyaratkan pengakuan akan kesetaraan manusia. Kebebasan, persaudaraan universal, keutuhan dalam keberagaman, dan kesetaraan kedudukan sebagai manusia adalah modal utama untuk praksis demokrasi. **Kelima**, keadilan dan solidaritas. Kehidupan bersama yang adil dan solidaritas sosial yang berdaya emansipatif dan liberatif selain menuntut distribusi yang adil secara material, juga menyangkut spirit institusional yang memfasilitasi setiap masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerjasama secara kolektif dalam spirit demokrasi.

Jadi, perspektif Pancasila menjadi spiritualitas bermakna menghidupkan, menggerakkan kesadaran bangsa Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai macam aspek. Bangsa diharapkan untuk menjadi bangsa yang religius, hormat pada martabat kehidupan, hidup dalam persaudaraan, menjunjung kesatuan dalam kebersamaan, bermusyawarah untuk menentukan kepentingan bersama, dan peduli dan solider terhadap sesama. Itulah nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang dinamis.

Sub Bab 2

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH TENTANG PANCASILA

2.1. Pengantar

Pancasila identik dengan Sukarno sebab dia adalah sosok yang dipandang berpengaruh dan berjasa dalam perumusannya. Para pendiri bangsa Indonesia memang berperan besar dalam perumusan Pancasila, tapi catatan sejarah menceritakan bahwa pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 adalah momentum kelahiran Pancasila. Dalam pidatonya itu Sukarno untuk pertama kali menyebut rumusannya sebagai Pancasila, yang dimaksudkannya sebagai dasar di atas mana Negara Indonesia Merdeka akan didirikan.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, ditetapkan secara resmi. Sejak itu pula Negara Indonesia resmi didirikan di atas dasar Pancasila. Kehidupan bangsa Indonesia diarahkan secara selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila atau mengikuti nilai-nilai dasar Pancasila.

Meskipun Pancasila identik dengan Sukarno, dalam pembahasan berikut kami memaparkan pandangan beberapa tokoh tentang Pancasila. Penalaran dan interpretasi mereka atas Pancasila kami kaji dalam kaitannya dengan upaya menempatkan Pancasila menjadi Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

2.2 Pandangan Beberapa Tokoh

Tentu banyak tokoh dan pemikir yang menelaah Pancasila untuk maksud mendalami atau mengkritisinya. Namun, dalam tulisan ini kami hanya mengkaji pandangan beberapa saja, yakni M. Hatta, N. Drijarkara, Suharto, Notonagoro, dan Abdurrahman Wahid. Pandangan kelima tokoh itu kami pandang cukup representatif untuk mengukuhkan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Kendati demikian, kami juga sadar bahwa terdapat tekanan yang berbeda dari masing-masing tokoh tersebut mengenai Pancasila. Berikut adalah pemaparan kami atas Pandangan mereka.

1. Mohamad Hatta

Dalam penalarannya, M. Hatta menegaskan bahwa Pancasila itu adalah fundamen politik dan fundamen moral untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian

dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat.⁷⁷ Istilah fundamen tentu bermakna bahwa Pancasila menjadi amat penting dalam konteks Indonesia. Dalam kajiannya tentang Pancasila, Hatta menempatkan Ketuhanan sebagai tautan utama yang membuat sila-sila lainnya berarti atau bermakna. Menurutnya, sila perikemanusiaan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial menjadi sendi-sendi negara. Sementara sila Ketuhanan adalah fundamen moral dari sendi-sendi tersebut. Sendi-sendi negara itu semua dicita-citakan untuk masa yang akan datang sebagai reaksi terhadap keadaan yang pahit: kesengsaraan rakyat, penghinaan bangsa, pemerasan, dan penderitaan bangsa di bawah tekanan kekuasaan penjajah Belanda. Dicitakan berarti diupayakan untuk diwujudkan. Dalam konteks itu, tampak bahwa proses dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia diarahkan untuk menuju cita-cita itu, yang berarti pula mengikuti apa yang menjadi cita-cita. Bila demikian adanya, betul bahwa Pancasila bermakna spiritualitas sebab kehidupan bangsa Indonesia digerakan oleh dan mengikuti irama nilai-nilai mendasar Pancasila.

Dalam tulisannya yang bertajuk *Lampau dan Datang*, Hatta menegaskan bahwa sejak Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk dijadikan teks proklamasi Indonesia Merdeka, oleh Sembilan pemimpin yang meliputi berbagai golongan, urutan kelima dasar seperti yang diusulkan Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, sudah berubah. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tadinya menjadi dasar kelima, kemudian menjadi dasar pertama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipandang sebagai dasar moral dalam kehidupan bernegara sehingga harus dijadikan urutan pertama. Dengan demikian negara dan pemerintahnya memperoleh dasar yang lebih kokoh yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam.⁷⁸ Hatta kemudian menegaskan keyakinannya bahwa, dengan politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi (nilai-nilai mendasar dalam sila Ketuhanan), akan diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam Mukadimah UUD 1945. Pernyataan Hatta itu jelas mendeskripsikan peranan Pancasila sebagai ruh atau spiritualitas pembangunan di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

⁷⁷ Karya Lengkap Bung Hatta, 2000. *Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta, LP3ES. hal. 396.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 95.

Untuk memperuncing pandangan Hatta tentang Pancasila dalam kaitannya dengan upaya kami memaknai Pancasila sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia, berikut kami deskripsikan inti pandangan beliau untuk masing-masing sila dalam Pancasila.

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Bagi Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi semata-mata menjadi dasar hormat-menghormati agama-masing-masing seperti yang dikemukakan Bung Karno, tapi menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dalam konteks itu, sila ini menjadi fundamen moral bagi praksis kehidupan yang terkait dengan implementasi nilai-nilai mendasar sila-sila lainnya. Istilah memimpin ke jalan yang benar, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia wajib mengikuti Pancasila. Dalam perspektif itu pula, ungkapan Hatta itu bermakna menempatkan Pancasila menjadi Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

Kedua, sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab atau perikemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, diharapkan agar segenap masyarakat Indonesia mampu membentuk diri menjadi manusia yang mencintai persaudaraan, manusia yang menghormati kemanusiaan orang lain. Hidup dalam keanekaragaman suku, agama, dan golongan akan menjadi ancaman jika tidak bersikap hormat terhadap sesama yang berbeda.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini pada umumnya dikaitkan dengan nasionalisme atau paham kebangsaan. Menurut Hatta, asas kebangsaan mengandung arti bahwa kemerdekaan Indonesia terutama hanya dapat dicapai dengan usaha rakyat Indonesia sendiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari luar.⁷⁹ Oleh karena itu, kata Hatta, yang menjadi pedoman adalah semangat nasional. Artinya, yang dibutuhkan bukan sekadar menjadi bangsa yang cerdas otak, tapi menjadi bangsa yang sadar akan harga diri dan kehormatannya, dengan harkat dan martabat mulia, mewujudkan "*dignity*" sebagai bangsa yang memiliki kemandirian. Jadi, kata Hatta, "kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan *cap ningrat*, *cap intelek* atau *cap lainnya*, tetapi *cap rakyat*". Meskipun demikian, kata Hatta, bukan sembarangan cap rakyat, melainkan cap rakyat yang tidak

⁷⁹ Sri Edi Swasono, 1991. Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP7 Pusat, disunting oleh Oetoyo Oesman dan Alfian, hal. 254.

tersesat, yang tanpa kemabukan, yang tidak sekadar gila kebangsaan, tetapi disertai kesadaran mendalam dan menjalankan politik yang nyata.⁸⁰ Di sini Hatta hendak menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang memiliki dan berdasarkan ideologi sendiri. Point pentingnya adalah tentang kesatuan, persatuan, dan relasi (yang mutualistik) antara manusia dan alam (di persada nusantara). Tekanan Hatta agar bangsa Indonesia berpedoman pada semangat nasional menunjukkan keyakinannya bahwa, jika bersatu maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan memiliki martabat sebagai bangsa yang berdaulat sehingga dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk mengikuti semangat nasionalisme itu perlu segenap masyarakat Indonesia terbuka pada perbedaan dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kesatuan dan kekuatan untuk menjadi bangsa yang bermartabat luhur.

Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini acapkali dikaitkan dengan demokrasi. Hatta menegaskan bahwa demokrasi yang dicita-citakan Indonesia adalah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia (politik dan ekonomi). Cita-cita demokrasi sosial yang meliputi ranah politik dan ekonomi itu, kata Hatta, bertolak dari pengalaman pahit dengan pemerintahan otokrasi kolonial dalam bentuk negara kepolisian. Untuk mencegah kembalinya pengalaman serupa, kaum muda Indonesia mencita-citakan negara hukum yang demokrat. “Negara haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedaulatan rakyat”, tegas Hatta.⁸¹ Tekanannya adalah kerakyatan. Demokrasi Indonesia harus merupakan perkembangan demokrasi Indonesia yang asli, bukan bercorak individualisme seperti di Barat, tetapi bercorak kolektivisme. Sifat kolektivisme yang dikemukakan Hatta itu bermuatan integralistik yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat desa di Indonesia. Dalam demokrasi kolektivisme yang integralistik itu, kata Hatta, negara Indonesia menjamin sejumlah hak warga negara sebagai individu seperti hak berserikat dan berkumpul dan hak mengeluarkan pikiran dan pendapat.⁸² Dalam paham demokrasi individualisme Barat, sifat integralistiknya menujurus pada kekuasaan fasisme yang otoriter dan totaliter. Oleh karena itu, demokrasi Barat tidak

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 254-255.

⁸¹ Kedaulatan rakyat yang dicita-citakan di sini berbeda dengan konsep Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat yang dimaksudkan Hatta adalah harus berakar dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia sendiri yang bercorak kolektivisme. Karya Lengkap Hatta, *op.cit.*, hal.

⁸² Oetoyo Oesman dan Alfian, 1991. *Pendahuluan, dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP-7 Pusat, hal. 21.

sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksanannya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Untuk tujuan mulia yang terakhir itu, kata Hatta demokrasi harus terjadi dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam kedua lapak demokrasi itulah manusia mengalami apa yang disebut merdeka, persamaan, dan persaudaraan. Demokrasi politik menjamin persamaan hak. Dalam kultur demokrasi, hak kaum kaya dan miskin, hak laki-laki dan perempuan setara dalam memilih dan dipilih, sama hak dalam mengeluarkan pendapat, kedudukan yang sah dalam hukum. Sementara dalam demokrasi ekonomi, negara bertanggungjawab dalam menciptakan kesamaan ekonomi. Inti gagasan demokrasi ekonomi adalah kemakmuran bagi semua orang seperti ditegaskan dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dalam konteks demokrasi politik dan ekonomi itu, tujuan demokrasi Indonesia, kata Hatta, adalah untuk pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil merupakan jalan terbuka menuju kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan (liberte, fraternite, dan egaliter). Dalam praksisnya, demokrasi politik dan ekonomi itu menunjukkan anasir-anasirnya, yakni rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang menjadi dasar juga bagi pemerintahan Indonesia di masa mendatang.⁸³ Dalam konteks demokrasi, Hatta menegaskan bahwa apabila rakyat dirugikan untuk kepentingan partai, yaitu golongan dan apabila partai yang pada hakekatnya adalah alat dijadikan tujuan sementara negara dijadikan alatnya, maka itu adalah imoril dan bertentangan dengan Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Partai pada hakekatnya adalah alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur agar belajar bertanggungjawab sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, bukan untuk dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya. Akibatnya, orang masuk partai bukan karena keyakinan, tapi karena ingin memperoleh jaminan.⁸⁴ Di sini jelas Hatta hendak menegaskan bahwa praksis demokrasi yang cocok untuk Indonesia adalah yang berlandaskan pada nilai-nilai mendasar dalam sila ketiga Pancasila. Lagi-lagi di sini bangsa Indonesia diharapkan mengikuti nilai-nilai mendasar Pancasila dalam mewujudkan negara

⁸³ Menurut Hatta, jika ditinjau benar-benar ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial dalam sanubari para pemimpin Indonesia pada waktu itu, yakni: pertama, **socialisme Barat** berkaitan dengan dasar-dasar perikemanusiaannya, kedua, **ajaran Islam** yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan ketiga, **Pengetahuan** bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Karya Lengkap Bung Hatta, *op.cit.*, hal. 436.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. .

demokrasi yang menjawab kebutuhan bangsa Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi politik dan ekonomi seperti dipaparkan di atas bermuara pada keadilan sosial sebagai agenda utama. Kedaulatan rakyat atau demokrasi sosial tidak terlepas dari tujuan mendasarnya, yakni keadilan sosial. Dalam konteks keadilan sosial ini, Hatta menegaskan corak sosialisme Indonesia haruslah sosialisme religius. Artinya, jiwa sosialisme Indonesia itu bersarang dalam ajaran agama. Etika agama menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan persaudaraan, tolong-menolong, dan bersikap adil pada sesamanya. Dalam konteks sosialisme religius itu, Hatta menegaskan bahwa sosialisme tidak harus merupakan Marxisme dan hasil hukum dialektika, tapi lebih pada tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi semua orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala penindasan. Berangkat dari pengalaman penjajahan yang merendahkan kemanusiaan Indonesia, sosialisme Indonesia ini lebih merupakan tuntutan jiwa dan kehendak kuat untuk mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala penindasan sebab berdasarkan pada perikemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks sila kelima ini, nilai-nilai mendasar yang hendak diwujudkan adalah kemakmuran untuk semua manusia di Indonesia, keadilan, kesamaan peluang dalam mengupayakan usaha ekonomi. Artinya, nilai-nilai itu menjadi acuan kehidupan bangsa Indonesia. Bila demikian adanya, kehidupan bangsa Indonesia diabdikan kepada Pancasila atau mengikuti anjuran nilai-nilai Pancasila sehingga mewujudkan dalam kehidupan nyata.

2. N. Drijarkara, SJ

Drijarkara adalah salah satu tokoh yang berupaya menelaah Pancasila dalam konteks kodrat manusia. Telaah beliau atas Pancasila berangkat dari ungkapan Bung Karno bahwa, Pancasila diperolehnya dengan menggali dalam manusia Indonesia. Terhadap pernyataan Bung Karno itu, Drijarkara kemudian memberi interpretasi demikian, “menggali berarti meneliti sejarah, meneliti keadaan sosiologis, meneliti watak-watak dan psycho manusia Indonesia”. Berangkat dari penalarannya itu, Drijarkara merasa yakin benar bahwa visi Bung Karno tersebut adalah tepat. Artinya, Pancasila itu memang berakar dalam manusia Indonesia.

Berangkat dari ungkapan Bung Karno yang diyakini benar tepat adanya itu, Drijarkara kemudian mengembangkan pemahamannya interpretatifnya tentang Pancasila secara mendalam dan universal. Menurutnya, Pancasila berpangkal dalam kodrat manusia sebagai manusia. Baginya, Pancasila tidak hanya dapat diketemukan dengan dan dalam menggali kehidupan manusia Indonesia pada konkretnya. Pancasila, kata Drijarkara, timbul dari kodrat manusia. Ia pun menegaskan sebagai berikut:

“Kami sadar, bahwa Pancasila adalah inheren (melekat) pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretnya. Oleh karena itu, dengan memandang kodrat manusia “qua talis” (sebagai manusia), kita juga akan sampai ke Pancasila.”⁸⁵

Istilah memandang kodrat manusia “*qua talis*” menunjukkan bahwa sikap dan tindakan yang manusiawi terhadap sesama, yang terlepas dari tindakan diskrimatif secara tidak adil dalam konteks hidup bersama, merupakan jalan menuju Pancasila. Kondisi hidup yang harmonis dan manusiawi dimungkinkan jika ada sikap hormat dan cinta kepada sesama. Dalam konteks ini, Drijarkara memaknai Pancasila sebagai spiritualitas yang menggerakkan hidup bangsa Indonesia untuk bertumbuh dalam cintakasih secara vertikal dan horizontal.

Dalam penalarannya terkait dengan hubungan antara Pancasila dan religi, Drijarkara menegaskan bahwa Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan filosofis yang terkandung dalam setiap manusia: apakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya dalam realita? Manusia, kata Drijarkara, bukanlah “*monade*”, yang terpisah dan tanpa hubungan dengan siapa pun juga, seperti yang diajarkan oleh Leibniz. Eksistensi manusia, kata Drijarkara, tidak berdiri tersendiri. Kita tidak bisa mengerti manusia kecuali sebagai serba terhubung dalam segala-galanya. Untuk memperkuat keyakinannya itu, Drijarkara memberi ilustrasi demikian, jika seseorang berkata: Aku di Jogjakarta, maka ungkapan itu jika diteruskan adalah Aku di Jogjakarta, Jogjakarta adalah di Jawa, Jawa adalah di Indonesia, Indonesia adalah di Asia, Asia adalah di planet yang kita sebut dunia, dunia adalah di dalam sistem matahari dan selanjutnya. Jadi, manusia sebagai manusia selalu terhubung dengan manusia yang lain. Aku selalu hidup dan berada bersama dengan

⁸⁵ Prof. Dr. N. Drijarkara, SJ., *Pancasila dan Religi*, dalam *Kumpulan Karangan yang Pernah dimuat Dalam Majalah BASIS*, hal. 35.

aku-aku yang lain. Jadi, manusia dalam realita adalah selalu dalam keterkaitan dengan yang lain.

Selanjutnya, Drijarkara menegaskan bahwa struktur manusia dalam realitanya (kedudukannya) selalu ada-bersama. Menurutnya, ada (*sein*) selalu ada-bersama (*Mit-sein*). Manusia tidak hanya meng-Aku, tetapi juga meng-Kita. Kesadaran manusia tentang dirinya sebagai Aku selalu dalam konteks “Aku memuat Engkau”. Hanya dalam dan dengan pertemuan dengan Engkaulah Aku menjadi Aku. Artinya, manusia selalu terdorong ke orang lain. Manusia terdorong untuk berkomunikasi dengan orang lain; manusia sadar untuk membuka bagi orang lain dan siap sedia untuk memasuki orang lain. Kesadaran demikian sudah selalu dalam konteks dialog atau percakapan dengan orang lain, sehingga aku selalu meng-Kita.⁸⁶

Dalam konteks Aku yang meng-Kita itu, ada bersama selalu berarti berada bersama dengan hormat dan cinta kasih. Hakikat eksistensi manusia adalah cinta kasih. Ada-ku yang berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha-Cinta-Kasih. Oleh karena itu, Pancasila yang timbul dari kodrat manusia itu bermuara pada cinta kasih. Dalam konteks perspektif itu, Drijarkara kemudian menegaskan bahwa Pancasila merupakan dukungan bagi Religi. Secara vertikal, cintakasih itu tertuju kepada Allah, sementara secara horizontal tertuju kepada sesama. Berikut adalah bagaimana penalaran Drijarkara tentang Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat, dalam kaitannya dengan realita manusia berangkat dari cinta kasih sebagai intinya:

1. Aku manusia mengakui, bahwa adaku merupakan ada bersama-dengan cinta kasih dengan sesama. Jadi, adaku harus aku jalankan dengan cinta kasih. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia jika dipandang pada umumnya, disebut perikemanusiaan.
2. Perikemanusiaan itu harus aku jalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut Keadilan Sosial.
3. Perikemanusiaan harus kulakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia niscaya me-masyarakat. Me-masyarakat berarti mengadakan kesatuan-karya. Agar supaya

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 38.

kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (pembentukan kesatuan-karya) kita sebut Demokrasi. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil maupun dalam masyarakat besar.

4. Perikemanusiaan harus juga kulakukan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkret dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya, dan lain-sebagainya. Ada bersama pada konkretnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Jadi, hidupku dalam kesatuan itu harus merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, di mana aku pertama harus melaksanakan perikemanusiaan, disebut Kebangsaan.
5. Aku mengakui bahwa adaku itu ada bersama, serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Jadi, aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang ada dengan terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tidak mungkin memberikan keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah Ada Yang Mutlak, Sang Maha-Ada. Sang Maha-Ada itu bukanlah sesuatu, melainkan Pribadi Yang Maha-Sempurna. Itulah Tuhan Yang Maha Esa.

Penalaran Drijarkara di atas menunjukkan bahwa cintakasih adalah nilai mendasar Pancasila. Tampak bahwa sistematika penalaran Drijarkara atas Pancasila bermula dari perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan Ketuhanan. Pancasila itu dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi hidup manusia di Indonesia yang berperikemanusiaan. Perwujudan perikemanusiaan itu tampak dalam kenyataan hidup yang menunjukkan keadilan sosial, menghormati kesamaan hak (demokrasi), bersikap terbuka dan menerima perbedaan (kebangsaan), serta pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan setiap manusia yang fana dan terbatas.

Urut-urutan pemaknaan Pancasila di atas bermula dari manusia yang harus sadar akan keberadaan dirinya. Drijarkara menunjukkan bahwa keberadaan manusia secara individu adalah keberadaan yang dimungkinkan karena adanya cintakasih. Secara horizontal,

cintakasih itu terarah pada sesama manusia dalam konteks hidup bersama. Sementara secara secara vertikal, cinta kasih itu ditujukan kepada Tuhan sebagai sumbernya.

Dengan tegas Drijarkara mengungkapkan bahwa cintakasih dalam kesatuan hidupku sebagai individu dengan sesama, secara pandangan umum disebut perikemanusiaan. Segala pikiran yang bermula dari cinta kasih atau perikemanusiaan bermuara pada tindakan yang menghormati kemanusiaan orang lain, yang tampak dalam kenyataan dan kondisi hidup bersama yang harmonis, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam konteks nilai mendasarnya sebagai cinta kasih atau perikemanusiaan itu, kata Drijarkara, Pancasila barulah menjadi pendirian atau sikap hidup atau dalam konteks tulisan ini menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia, jika setiap orang Indonesia berkata dalam hatinya: hidupku akan merupakan pelaksanaan dari semua Sila itu. Itulah kehendakku, itulah putusanku, itulah tekadku.⁸⁷

3. Notonagoro

Notonagoro dengan jelas mengakui dan menyatakan bahwa Bung Karno adalah pencipta Pancasila.⁸⁸ Ia juga menegaskan bahwa Pancasila yang diciptakan oleh Bung Karno adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penyelidikan cipta yang seksama. Oleh karena itu, kata Notonagoro, Pancasila bukan suatu konsepsi politis, melainkan buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh saban orang.⁸⁹ Di sini Notonagoro hendak menegaskan bahwa Pancasila memang layak menjadi pendirian dan pandangan hidup bangsa, yang berfungsi sebagai dasar negara dalam membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Nilai-nilai mendasar Pancasila mengisi dan menjiwai Undang-Undang Dasar, menjadi dasar pendidikan dan pengajaran serta usaha ilmu pengetahuan. Dalam praksis kehidupan masyarakat, Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang mengisnyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 153-155.

⁸⁸ Prof. Dr. Mr. Drs. Notonagoro, 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 7-9.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 10.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 12.

Menurut Notonagoro, susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Tiap-tiap sila yang di belakang sila-sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Ringkasnya, antara sila satu dengan yang lainnya ada hubungan yang mengikat sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Bila masing-masing sila dipandang tidak saling terkait maka ia terpecah-belah sehingga tidak dapat dijadikan dasar kerohanian bagi Negara Indonesia. Dalam susunan yang hierarkis piramidal ini, kata Notonagoro, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, Persatuan Indonesia, (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Jadi, menurut Notonagoro masing-masing sila itu memuat satu sama lain sehingga tidak mungkin dipisahkan. Berikut adalah deskripsi pandangan Notonagoro mengenai nilai-nilai untuk mendasar masing-masing sila:

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Notonagoro, Ketuhanan bukanlah semata-mata kepercayaan belaka, akan tetapi dapat dimengerti dengan alasan-alasan pikir yang berdasarkan pengalaman, kenyataan yang terdapat dalam dunia dan diperuntukkannya asas-keharusan sebab-akibat.⁹¹ Di sini tampak bahwa, Notonagoro hendak menegaskan pentingnya memahami Ketuhanan secara fenomenologis. Pengertian akan Tuhan dapat diperluas melalui pemaknaan fenomena-fenomena Ketuhanan dalam kehidupan insan beragama setiap hari. Di lain kesempatan, ia juga menegaskan bahwa **sila pertama** ini yang paling sulit karena merupakan sila yang paling banyak menimbulkan persoalan. Ada berbagai macam pendekatan dan interpretasi atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu faktor yang menyulitkan itu. Untuk mengatasi hal itu, Notonagoro mengarahkan pikirannya pada hasil tertinggi yang dicapai oleh manusia di dalam mencari kenyataan berdasarkan kekuatan akalinya tentang Ketuhanan. Menurutnya, hasil dari pencarian itu adalah “sebab yang pertama”. Artinya, Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Di sini Notonagoro menunjukkan nilai mendasar sila pertama yang harus diikuti oleh manusia di Indonesia adalah Kemahakuasaan Tuhan atas segala yang ada di alam semesta ini.

Kedua, Kemanusiaan. Mengenai sila ini, Notonagoro menegaskan bahwa kemanusiaan itu dapat diartikan sebagai hakekat dari susunan diri manusia. Manusia

⁹¹ *Ibid.*, hal. 18.

mempunyai dua sifat, yakni sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Menurut Notonagoro, kemanusiaan merupakan hakekat struktur diri manusia atas tubuh dan jiwa, serta sifat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Jadi, kemanusiaan adalah hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan-kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yang berujud peng-hati-hati (kebijaksanaan), keadilan, kesederhanaan dan keteguhan, untuk mencapai tujuan hidup manusia, ialah kebahagiaan sempurna. Maka kata “adil dan beradab” sudah termasuk juga dalam inti-isi itu.⁹² Menurut Notonagoro, sila Ketuhanan dan kemanusiaan meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar dari sila-sila lainnya. Sila-sila lainnya hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia. Sila yang menyangkut kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial hanyalah meliputi ranah hidup lahir manusia. Namun, mengingat susunan piramidal Pancasila maka ketiga sila itu mempunyai asas-asas batin. Selain itu, ketiga sila ini juga saling berkaitan satu dengan yang lain. Berdasarkan pemahaman itu, dalam Pancasila tidak ada tempat bagi paham kebangsaan yang tidak berkemanusiaan dan tidak mengenal Ketuhanan, serta tidak memiliki corak demokratis dan tidak menyelenggarakan keadilan sosial.

Ketiga, “Persatuan Indonesia”. Sila ini dalam konteks historis merupakan suatu faktor kunci perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks Indonesia yang merdeka, keanekaragaman adalah salah satu fakta yang terberi. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh kemajemukan suku, agama, warna kulit, dan golongan. Dalam konteks itu, sila ketiga ini mengajak bangsa Indonesia untuk menerima perbedaan yang sungguh nyata dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan itu kemudian dijadikan daya penarik ke arah kerjasama dan kesatuan. Keterbukaan dan kemauan untuk menerima fakta perbedaan menjadi kekuatan untuk mengurangi ancaman perselisihan, pertikaian dan perpecahan. Tuntutannya adalah agar bangsa Indonesia, atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya; dan dengan kesediaan, kecakapan dan usaha, untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan menurut pedoman-pedoman majemuk-tunggal bagi pengertian kebangsaan.

⁹² *Ibid.*, hal. 61-62.

Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menurut Notonagoro, sila ini berkaitan dengan pengakuan akan kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, atas dasar tritunggal “Negara dari Rakyat, bagi rakyat dan oleh rakyat”.⁹³ Dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, pengakuan akan kebebasan dan kekuasaan rakyat adalah hal yang menentukan proses demokrasi yang ideal.

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut Notonagoro, sila kelima ini adalah suatu prinsip yang mendasari aktivitas nyata kehidupan bernegara. Berdasarkan prinsip itu pula, dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan yang seimbang dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat manusia sebagai individu.

Berdasarkan pembahasan di muka, tampak bahwa Notonagoro menempatkan Pancasila sebagai ruh kehidupan bernegara. Keyakinannya atas susunan Pancasila sebagai yang hirarkis piramidal menunjukkan makna yang hendak ditegaskannya bahwa Pancasila adalah ruh atau spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mesti dipandang dan dipahami secara utuh, tak terpisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ia menjadi sumber kekuatan dan kehidupan yang manusiawi dalam konteks Indonesia yang majemuk atau berkebhinnekaan dalam suku dan budaya.

4. Suharto⁹⁴

Dalam kaitannya dengan Pancasila, Suharto, presiden kedua Indonesia yang mengawali jabatan kepresidenannya setelah adanya krisis dan kerusuhan tahun 1965, terkenal dengan slogannya kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa kepemimpinannya, di era Orde Baru, upaya menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen diintensifkan. Gerakan ke arah itu berpangkal pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara Republik

⁹³ *Ibid.*, hal. 66.

⁹⁴ Tulisan ini disarikan dari pidato Jendral TNI (purn) Soeharto pada peringatan ulang tahun ke 25 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1974 saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Lih. Ika Dewi Ana, dkk (ed.), 2006. *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila*, Yogyakarta, Aditya Media bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, hal. 66-80.

Indonesia. Untuk maksud itu pula, pada masa Orde Baru dilaksanakan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Segenap generasi muda Indonesia, para pelajar dalam berbagai tingkat sekolah formal, diwajibkan mengikuti penataran P4 sebagai syarat untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kewajiban serupa berlaku bagi setiap pegawai negeri dan swasta yang hendak mengurus kenaikan jabatannya dalam lembaga terkait.

Dalam perspektif penguasa Orde Baru, sikap hidup manusia Indonesia yang ber-Pancasila adalah: kepentingan pribadinya tak dapat dilepaskan dari kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Kewajibannya terhadap masyarakat harus lebih besar dari pada kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi akan berakhir untuk memulai melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Semuanya itu dituntun oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab, oleh kesadaran untuk memperkokoh Persatuan Indonesia untuk menjunjung tinggi sikap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.

Menurut Suharto, pada tingkat yang lebih tinggi kesadaran akan nilai-nilai Pancasila itu membuat orang akan rela memberikan segala pengorbanan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianggap luhur tadi. Untuk itu, Presiden kedua Indonesia itu menghendaki adanya kesatuan tafsir atas Pancasila. Dengan adanya kesamaan tafsir, dapat dihindarkan adanya penafsiran yang beranekaragam menurut selera kepentingan pribadi dan golongan, dan juga dapat dihindarkan untuk menggunakan Pancasila sebagai 'cantolan' kepentingan ideologi golongan seperti pada masa 'nasakom' di jaman Orde Lama.⁹⁵

Dalam kerangka membuat kesamaan tafsir atas Pancasila itu, Suharto menganjurkan adanya penelitian. Tempat yang paling cocok untuk melakukan penelitian, kata Suharto, adalah Perguruan Tinggi, sebab di sanalah tempat yang tepat bagi proses penelitian berlangsung secara ilmiah dan jujur, sehingga nilai kebenarannya mencapai derajat tertinggi.⁹⁶

Anjuran Suharto agar Perguruan Tinggi melakukan penelitian ilmiah terhadap Pancasila tentu patut disambut baik dan diberi apresiasi sebab bertujuan untuk menggali

⁹⁵ *Ibid.* hal. 79.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 80.

kebenaran ilmiah atas Pancasila, terutama menyangkut nilai-nilai mendasarnya. Demikianpun dengan kebijakan Orde Baru agar segenap rakyat Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, adalah perlu dan penting sebab menunjukkan keseriusan dalam menempatkan Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi, kebijakan Orde Baru dalam ber-Pancasila itu memuat kelemahan mendasar yang bisa menjadi anti-klimaks Pancasila, yakni menjadikan Pancasila sekadar alat politik untuk persatuan yang bernuansa penyeragaman sehingga menyangkal realitas keberagaman atau kebhinnekaan di Indonesia.

5. Abdurrahman Wahid

Dalam tulisannya yang bertajuk Pancasila dan Pemaknaannya, yang disampaikan dalam saresahan dan simposium hari lahir Pancasila yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada, 14 dan 15 Agustus 2006, Abdurrahman Wahid yang kerap disapa Gus Dur, menegaskan keinginannya untuk mengembalikan pengertian Pancasila kepada keadaan semula. Menurutnya, pada mulanya Pancasila dimaksudkan sebagai kesepakatan Politik antara dua pihak yang saling berbeda pandangan ketika negara ini hendak dibentuk. Kedua pihak yang dimaksudkan itu adalah golongan sekuler (negara tidak berdasarkan ajaran agama tertentu) dan pihak lain yang hendak mewajibkan adanya negara Islam di negeri ini.⁹⁷

Dalam pemaparannya, Gus Dur berupaya menarik makna Pancasila berdasarkan kesepakatan dalam keputusan Mukhtar NU di Banjarmasin tahun 1935. Menurutnya, kesepakatan Mukhtar menyatakan bahwa, upaya mendirikan negara Islam di kawasan nusantara bukanlah kewajiban agama sama sekali. Oleh karena itu, kata Gus Dur, NU berkewajiban mempelajari dan menerima semua konsep tentang negara yang akan didirikan berdasarkan kompromi politik yang adil, yang tidak membuat pihak manapun mendapat kemenangan atau menerima kekalahan, sebab prosesnya terjadi melalui kesepakatan para pemimpin berbagai gerakan Islam dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh M. Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Gus Dur, itulah yang kemudian membuat NU dapat dengan mudah menerima Pancasila sebagai kompromi politik.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 1.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata Gus Dur, bahwa Pancasila dimaknai sebagai ideologi negara, itu adalah soal lain yang disebabkan oleh perkembangan sejarah pada masa-masa setelah kompromi politik. Penggunaan Pancasila yang berubah-ubah, katanya, juga terkait dengan keperluan yang berbeda-beda. Setelah semula berubah menjadi kesadaran bersatu sebagai bangsa, kata Gus Dur, Pancasila kemudian berubah menjadi asas legalitas bagi adanya sebuah pemerintahan saja dalam lingkup Republik Indonesia. Pada saat itu, demikian Gus Dur, mereka yang ingin mempertahankan sentralisme pemerintahan menggunakan Pancasila dalam arti keharusan bersatu ketika menyatakan adanya kewajiban ber-Pancasila. Itu berarti bahwa Pancasila menjadi alat pemersatu. Sayangnya, upaya bersatu dengan kewajiban ber-Pancasila itu bernuansa penyeragaman yang mencederai hakekat makna Pancasila sebagai kompromi politik yang memayungi keanekaragaman. Akibatnya, kata Gus Dur, mereka yang menolak “kesetiaan” membabi buta terhadap gagasan keharusan bersatu yang menafikan keanekaragaman, ingin memperluas kemandirian daerah dengan dalih Pancasila justru mendukung keragaman yang tinggi antara berbagai daerah dan budaya.

Selanjutnya, kata Gus Dur, keinginan menjaga keanekaragaman di Indonesia, mengalami keguncangan hebat sebab pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai landasan pengembangan keseragaman (uniformitas) dalam hubungan antar-daerah, atas nama persatuan. Meskipun demikian, kata Gus Dur, persatuan yang bernuansa penyeragaman itu memang dibutuhkan demi mengembangkan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Hasilnya adalah penggunaan bahasa yang umum dipakai di Riau daratan di bawah pimpinan Raja Haji Ali di ujung abad ke 19, menjadi bahasa Indonesia. Berkat ide persatuan yang bercorak penyeragaman itu, bahasa daerah tersebut dengan cepat berkembang menjadi bahasa Nasional.⁹⁸

Akan tetapi, kata Gus Dur, ada kerugiannya yang menjadi taruhan penyeragaman tersebut, yakni hilangnya perbedaan-perbedaan antara berbagai budaya daerah. Menurut Gus Dur, proses itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang justru mencoba menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. Tentu perubahan penggunaan terhadap Pancasila ini berlangsung seiring dengan perkembangan politik di tanah air, tapi sayangnya tidak sejalan dengan maksud semula pencipta Pancasila. Bila pada mulanya Pancasila dijadikan

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 4.

sebagai alat untuk mengembangkan perbedaan antar budaya, maka pada masa Orde Baru justru sebaliknya, Pancasila dijadikan alat untuk menyeragamkan budaya dan kehidupan berbangsa. Jadi, kata Gus Dur, tantangan berat yang dihadapi Pancasila kini bukanlah sebagai falsafah negara, melainkan sebagai entitas budaya.

Gus Dur jelas memandang Pancasila sebagai kompromi politik yang dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara mesti memberi solusi secara adil bagi masing-masing suku untuk menghidupkan budaya daerahnya masing-masing. Sebagai kompromi politik, Pancasila memang menjadi acuan yang harus diikuti dalam praksis kehidupan bersama. Dalam perspektif itu, Pancasila yang dijadikan acuan hidup bersama dengan sendirinya menjadi spiritualitas kehidupan bersama untuk segenap suku di Indonesia. Sebagai demikian, Pancasila menjadi Ruh kehidupan bangsa Indonesia dalam keanekaragamannya.

2.3 Penutup

Pandangan para tokoh di atas tentang Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memang sejak semula dirancang sebagai panduan atau pedoman hidup yang wajib diikuti oleh bangsa Indonesia di alam kemerdekaan. Sebagai pedoman dan panduan hidup, nilai-nilai mendasar Pancasila menjadi orientasi kehidupan dan sekaligus tolak ukur bagi setiap upaya pembangunan di alam kemerdekaan. Segala dinamika kehidupan bangsa Indonesia mengikuti nilai-nilai mendasar Pancasila.

Dalam konteks Pancasila sebagai pedoman, panduan yang kemudian menjadi orientasi kehidupan bangsa Indonesia itu, sesungguhnya Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Menyebut Pancasila menjadi spiritualitas bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia hendaklah mengikuti nilai-nilai mendasar Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam praksis kehidupan. Jika bangsa Indonesia tidak hidup berdasarkan nilai-nilai mendasar Pancasila, maka ia terancam mengalami kelabilan, kemunduran, dan ketidakseimbangan yang bermuara pada kejatuhan dan kehancuran sebagai bangsa sebab tidak berada dalam keseimbangan atau "*balancing*" antara Pancasila sebagai "Ruh" dan bangsa Indonesia sebagai "Tubuh" yang dihidupinya dan harus menghidupinya.

Sub Bab 3
SIGNIFIKANSI DAN RELEVANSI
PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS BANGSA INDONESIA

3.1 Pengantar

Pembahasan di muka menunjukkan bahwa gagasan Pancasila lahir dari renungan Bung Karno. Pengalaman pahit di masa penjajahan dan kenyataan sosial bangsa Indonesia yang majemuk menjadi titik sentuh permenungan tersebut. Nilai-nilai mendasar Pancasila mendeskripsikan harapan terdalam bangsa Indonesia di alam kemerdekaan. Kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah yang berdasarkan Pancasila atau selaras dengan nilai-nilai mendasarnya. Dalam arti itulah Pancasila dimaksudkan sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang berdaya emansipatif dan liberatif dari segala kondisi sosial yang dehumanistik.

Pancasila dalam arti sebagai kristalisasi renungan Bung Karno pada hakekatnya adalah spiritualitas kehidupan. Ketika nilai-nilai mendasarnya diikuti, dihayati, dan diwujudkan dalam praksis bernegara, itu berarti ia menjadi spiritualitas bernegara. Perihal bagaimana spiritualitas itu ditransformasikan dalam kenyataan, upaya-upayanya tentu bisa diterjemahkan misalnya dengan menyebutnya sebagai Dasar Negara, filsafat, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan sebutan macam itu sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan hakekatnya sebagai Spiritualitas. Justru pemaknaan seperti itu menjadi berdaya emansipatif, transformatif, dan liberatif dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Selaras dengan makna mendasarnya, istilah Pancasila sebagai spiritualitas mestinya memang bersifat mengutuhkan, menghidupkan, dan membebaskan. Artinya, menyebut Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia berarti mengisyaratkan bangsa Indonesia telah selalu berkomitmen untuk mengikuti, menghayati, dan mewujudkan nilai-nilai mendasarnya dalam praksis kehidupan. Apakah signifikansi dan relevansinya bila Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia?

3.2 Signifikansi Pancasila Menjadi Spiritualitas Indonesia

Sesuai dengan makna mendasarnya sebagai Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia, nilai-nilai mendasar Pancasila menjadi daya dorong yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Berikut adalah signifikansi Pancasila menjadi Spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia berangkat dari pembahasan di muka.

Pertama, Bangsa Indonesia diharapkan terdorong dan tergerak oleh nilai-nilai mendasar Pancasila sehingga menjadi bangsa yang ber-Tuhan, bangsa yang religius. Dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan, harapan demikian menjadi mungkin terwujud manakala bangsa Indonesia bersikap terbuka dan menerima kenyataan akan perbedaan agama-agama dan kepercayaan di Indonesia. Seruan toleransi aktif menjadi perlu dikumandangkan justru karena adanya fenomena bahwa bangsa ini bersikap tertutup terhadap pihak lain dan bahkan menyangkal adanya keanekaragaman cara dalam ber-Tuhan. Kini istilah toleransi aktif menjadi bagaikan mantra yang amat diperlukan dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan. Padahal, yang sungguh esensial adalah keterbukaan dan pengakuan akan keberadaan pihak lain, agama dan kepercayaan orang lain. Itulah esensi ajakan Bung Karno agar bangsa Indonesia ber-Tuhan dan masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.⁹⁹ Setiap manusia di Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang rendah hati dan mengimani Tuhan dengan kerendahan dan ketulusan hatinya yang terpancar dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan manusia sebagai manusia. Dalam konteks itu, iman kepada Tuhan sungguh menjadi energi yang membebaskan manusia di Indonesia dari kecenderungan yang merendahkan kemanusiaan pihak lain. Praksis hidup beragama yang ideal adalah ketika adanya sikap hormat pada kebebasan beragama, kemauan untuk menerima pihak lain, dan terbuka untuk dialog antar-umat beragama.

Kedua, Pancasila menjadi daya dorong bagi bangsa Indonesia untuk merancang dan mewujudkan kehidupan bersama yang berperikemanusiaan. Iman kepada Tuhan menjadi nyata ketika masing-masing orang Indonesia menyadari bahwa hidup bersaudara dengan sesama manusia itu merupakan ungkapan religius dan bentuk serius dalam hidup beragama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi kekuatan, daya, dan ruh bangsa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang menghormati kebebasan, kesetaraan derajat kemanusiaan, dan

⁹⁹ Sukarno, *ibid.* hal, 29-30.

menjunjung persaudaraan universal. Sila kedua Pancasila bukan hanya menghendaki bangsa Indonesia untuk tidak merendahkan kemanusiaan bangsa lain, tapi juga menggarisbawahi bahwa bangsa Indonesia mesti menjadi bagian integral keluarga bangsa-bangsa di dunia. Itulah esensi ungkapan Bung Karno di bawah ini:

“kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chovinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan ‘Deutschland über Alles’ tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Janganlah kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tapi kita harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa.”¹⁰⁰

Jadi, sila kedua Pancasila signifikan untuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab dan sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya, serta berkomitmen untuk memuliakan sesamanya, mengangkat harkat dan martabat sesama umat manusia di seluruh dunia. Kiranya itulah inti ungkapan Bung Karno bahwa, “jika kita berbuat sesuatu yang rendah yang membikin celaka kepada manusia lain, kita melanggar (hukum) perikemanusiaan”.¹⁰¹

Ketiga, akar dari kesadaran akan kemanusiaan universal itu adalah konteks kemanusiaan bangsa Indonesia sendiri yang mesti kuat dan tangguh dalam persaudaraan nasional. Bangsa Indonesia akan diperhitungkan sebagai bagian penting dari keluarga besar bangsa-bangsa manakala mampu membangun persaudaraan dalam konteks nasionalnya secara mandiri. Artinya, kekeluargaan dalam konteks Indonesia mesti menjadi langkah utama menuju kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Dalam kerangka membangun kekeluargaan Indonesia itu, paham kebangsaan dibutuhkan. Sila ketiga sungguh signifikan untuk membangun paham kebangsaan yang tangguh seperti diimajinasikan oleh Bung Karno, bahwa bangsa Indonesia itu berjiwa solider, memiliki kehendak untuk hidup bersama, dan memiliki persamaan watak berdasarkan pengalaman bersama. Dalam konteks

¹⁰⁰ Sukarno, *op.cit.* hal, 117-119.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 121.

itu, Bung Karno melihat peran bahasa, dalam arti kesamaan bahasa sebagai modal amat penting untuk membangun kesadaran sebagai bangsa dan pentingnya persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kesadaran akan persatuan itu hendaknya mengatasi kepentingan golongan. Bung Karno yakin bahwa negara yang kuat adalah yang didasarkan di atas rasa kebangsaan yang kuat. Dalam konteks itu, signifikansi sila ketiga ini adalah merekat rasa kebangsaan dan membangun kekuatan dalam spirit persatuan di antara fakta perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Tanpa rasa kebangsaan tidak mungkin adanya persatuan dan tanpa persatuan tidak mungkin ada kesamaan perspektif mengenai “menjadi Indonesia” yang merdeka dalam arti seluas-luasnya. Sila ketiga ini menuntut tanggungjawab segenap generasi Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang tangguh, kuat, dan maju dalam berbagai aspek kehidupan.

Keempat, salah satu faktor yang menentukan bagi Persatuan Indonesia adalah tata kelola hidup bersama yang menghormati *kebhinnekaan* Indonesia. Sila keempat menunjukkan bahwa demokrasi menjadi paradigma tata kelola yang cocok untuk konteks Indonesia yang majemuk. Dalam alam demokrasi ada kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan undang-undang. Kehidupan bernegara ditata dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan. Dalam mekanisme penentuan dan pengambilan kebijakan, setiap pribadi berhak mengeluarkan pendapat. Sikap kritis setiap subjek demokrasi dihargai dan perbedaan pandangan diantara warga dihormati. Hal itu menjadi mungkin karena proses berdemokrasi dihidupi oleh kerendahan hati, kesopanan, dan kebijaksanaan. Dalam konteks politik praktis, kolektivitas dijunjung tinggi. Kebijakan tampak ketika kepentingan mayoritas rakyat Indonesia ditempatkan di atas kepentingan partai dan golongan. Apapun pendekatan dan teknis pengambilan keputusan yang bernilai demokratis, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial seperti ditegaskan dalam sila kelima Pancasila. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis dalam alam demokrasi Indonesia berwajah kolektif sebab diupayakan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Kelima, pada prinsipnya sila kelima menegaskan agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan secara kolektif (kesejahteraan sosial). Prinsip hormat pada martabat kehidupan, persaudaraan, kesatuan dalam keberagaman, dan kesetaraan hak bermuara pada kondisi Indonesia yang berkeadilan sosial. Keadilan dalam konteks Indonesia adalah suatu kondisi hidup warga negara Indonesia yang mengalami kemakmuran dan

kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa keadaan komunitas Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila mesti manusiawi dan bermartabat. Dalam konteks itu, tuntutan implementasi nilai mendasar sila kelima adalah setiap individu selain memiliki kebebasan, juga menghormati kebebasan pihak lain. Tanpa kebebasannya, tidak mungkinlah seseorang menuntut keadilan baginya sebab keadilan adalah milik mereka yang mempunyai kebebasan alias tidak dijajah. Itulah barangkali mengapa Plato memahami keadilan sebagai kebijakan utama sebab menjadi dasar untuk setiap pribadi memelihara dan memiliki kebebasannya dalam komunitas. Senada dengan itu, deskripsi Bung Karno tampak signifikan bahwa keadilan sosial identik dengan sosialisme Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila. Menurut Bung Karno, sosialisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu akan tercapai jika demokrasi Indonesia tidak mengikuti demokrasi Barat, tapi demokrasi yang mengedepankan prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam istilah teknisnya, Bung Karno mendeskripsikan signifikansi keadilan sosial sebagai kondisi “suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. ...Semuanya bahagia, cukup sandang, cukup pangan, *“gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”*.¹⁰² Dalam kerangka keadilan sosial itu, Bung Karno dengan tegas menolak kultur liberalisme dan cara kerjanya yang merendahkan martabat manusia karena bercorak diskriminatif, tapi ia sekaligus terbuka pada kultur industrialisme modern dengan kecanggihan alat-alatnya bila dikelola dan dijalankan dengan maksud untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara kolektif. Khusus pada tekanan yang terakhir itu, keadilan sosial di Indonesia akan terwujud manakala ada solidaritas sosial dalam spirit gotong royong.

3.3 Relevansi Pancasila Menjadi Spiritualitas

Mengartikulasi Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia mengandung makna bahwa kehidupan bangsa Indonesia digerakan oleh nilai-nilai mendasar Pancasila atau bangsa Indonesia menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka memajukan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengakomodasi penghormatan terhadap keluhuran derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sebagai Spiritualitas, Pancasila sungguh relevan untuk memajukan iklim kebebasan dalam

¹⁰² Ir. Sukarno, *op.cit.*, hal. 277-278.

ber-Tuhan, (berketaqwaan kepada Tuhan), memperkuat ikatan rasa persaudaraan (yang harmonis dalam konteks hidup bersama), persatuan dalam keberanekaragaman, kesetaraan hak-hak dalam konteks hidup bersama, memajukan serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah uraian singkat tentang relevansi tersebut.

3.3.1. Aspek Ketuhanan

Berbicara tentang relevansi Pancasila sebagai spiritualitas bangsa Indonesia dalam konteks religiusitas terasa mengena kalau dikaitkan dengan gagasan Ketuhanan Bung Karno. Bukan tanpa alasan Bung Karno mengusung Ketuhanan sebagai bagian utuh prinsip-prinsip Indonesia merdeka. Pengamatan dan pengalamannya selama masa perjuangan kemerdekaan bermuara pada keyakinannya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan. Ekspresi kehidupan ber-Tuhan itu berdimensi vertikal dan horisontal. Pada aspek vertikal, bangsa Indonesia menaruh harapan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan. Bahkan kemerdekaan Indonesia diyakini sebagai anugerah istimewa dari Tuhan. Sementara pada aspek horizontal, ekspresi keyakinan kepada Tuhan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mestilah menjamin ketentraman, kedamaian, dan kerukunan di antara setiap umat beragama.

Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan secara horizontal tampak pada sikap hormat kepada martabat kehidupan sesama manusia. Seruan Bung Karno agar segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan dan negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan selalu relevan untuk iklim kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.¹⁰³ Beriman kepada Tuhan dalam konteks pluralitas agama menuntut sikap terbuka dan menerima fakta perbedaan dan aktif menghidupkan kebebasan beragama yang kondusif bagi kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap manusia di Indonesia bertanggungjawab dalam menciptakan iklim kebebasan beragama yang kondusif. Prinsip Ketuhanan menjadi ruh kebebasan beragama. Implementasinya dalam praksis kehidupan adalah sikap saling hormat-menghormati dan menjalin relasi yang rukun di antara pemeluk agama-agama. Begitulah kiranya praksis kehidupan beragama yang dicita-citakan oleh Bung

¹⁰³ Sukarno, *op.cit.*, hal. 29-30.

Karno di alam kemerdekaan Indonesia.¹⁰⁴ Dalam perspektif itu pula, diharapkan agar segala regulasi yang menyangkut kehidupan beragama dan berkepercayaan di Indonesia menjamin kebebasan dalam cara ber-Tuhan. Kebebasan yang dimaksudkan menjadi nyata manakala pluralitas religiusitas di Indonesia dihargai dan diberi ruang yang leluasa untuk mewujudkan keyakinan akan nilai-nilai mendasar dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila demikian adanya, implementasi prinsip Ketuhanan tentulah tidak destruktif dan dehumanistik sebab dalam praksisnya mengakui dan menerima fakta pluralitas keagamaan. Artinya, nilai-nilai mendasar Ketuhanan tidak mengijinkan adanya tindakan diskriminatif atas nama agama. Dalam pengertian itu, negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang ada di Indonesia.

3.3.2. Aspek Kemanusiaan

Bila sila pertama menegaskan pentingnya bersikap taqwa kepada Tuhan maka sila kedua berfokus pada perkara kemanusiaan. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai mendasar prinsip Ketuhanan secara bertanggungjawab terhadap fakta pluralitas dengan sendirinya memajukan aspek kemanusiaan. Artinya, sikap taqwa bangsa Indonesia kepada Tuhan tidak bisa diandaikan telah sempurna bila relasi vertikal dalam doa digiatkan, tapi juga penting dibuat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa sikap horma pada kemanusiaan sesama.

Inti renungan Sukarno tentang manusia dalam sila kedua tentu berkaitan dengan imannya kepada Tuhan, bahwa manusia di Indonesia penting dan perlu hidup bersaudara dengan manusia sejangat. Prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang kemudian berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menegaskan bahwa persaudaraan universal adalah kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dalam spirit sila kedua ini, hidup manusia di Indonesia dihayati dan dimaknai sebagai medan pengalaman akan kebersamaan dengan manusia yang lain, bangsa lain tanpa terkecuali.

¹⁰⁴ Kata Sukarno, “Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid*, itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Lih. *Ibid.*, hal. 31.

Secara sosio-kultural, sila ini menggarisbawahi kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah menyendiri. Seperti diungkapkan oleh Martin Heidegger, hidup manusia personal selalu “ada dalam dunia” dan “bersama yang lain”.¹⁰⁵ Dunia adalah tempat manusia merajut pengalaman akan kebersamaan itu. Dalam konteks “ada bersama yang lain” itu, nilai yang penting adalah pengakuan akan kesetaraan derajat kemanusiaan dengan pihak lain dan kesadaran akan hidup yang selalu dalam ketergantungan pada sesamanya. Oleh karena itu, implementasi prinsip kemanusiaan dalam Pancasila sungguh nyata dalam sikap peduli pada pihak lain dan menjaga eksistensi pihak lain. Perwujudan kepedulian pada eksistensi pihak lain ini bermuara pada kondisi hidup yang humanis berupa hormat pada kehidupan sesama manusia. Cinta akan kehidupan dan bertanggungjawab pada kehidupan diri dan sesama itulah yang dimaksudkan juga dengan manusia yang “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Dalam konteks Indonesia yang *bhinneka*, sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan ruh yang mejamin kehidupan dalam rasa persaudaraan. Hidup dalam persaudaraan adalah paradigma kemanusiaan di Indonesia. Pentingnya persaudaraan di Indonesia itu diungkapkan Bung Karno dalam bagian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang menegaskan bahwa negara yang hendak dibangun bukan untuk satu orang, bukan untuk sesuatu golongan, juga bukan untuk mengagungkan satu orang saja, bukan untuk memberikan kekuasaan untuk satu golongan yang kaya, juga bukan untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Negara merdeka yang hendak kita dirikan, kata Sukarno, adalah suatu Negara “semua buat semua”.¹⁰⁶ Seruan demikian sungguh selalu relevan untuk kemanusiaan Indonesia di segala jaman sebab mengandung pesan persatuan dalam keanegaragaman. Hormat pada martabat kemanusiaan dan pengakuan akan kesetaraan derajat manusia di Indonesia bermuara pada rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia seperti ditegaskan dalam sila ketiga. Dalam perspektif itu, pun seruan perikemanusiaan atau internasionalisme yang dikumandangkan Bung Karno tetap memiliki relevansi untuk kemanusiaan di Indonesia khususnya, dan kemanusiaan universal pada umumnya di segala jaman sebab menegaskan, mengakui, dan menjunjung kesetaraan derajat setiap manusia.

¹⁰⁵ Martin Heidegger, 1962. *Being and Time*, San Francisco: Herper, hal. 146

¹⁰⁶ Ir. Sukarno, *op.cit.* hal. 18.

3.3.3 Aspek Persatuan atau Nasionalisme Indonesia

Telah disinggung di atas bahwa sila pertama dan kedua menjadi bagian utuh penghayatan dan pengamalan rasa kebangsaan Indonesia. Pengalaman pahit pada masa penjajahan Belanda memang menjadi titik sentuh secara tertentu bagi menggelornya rasa kebangsaan pada masa perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, hidupnya nasionalisme atau persatuan Indonesia juga berakar dalam kemanusiaan Indonesia yang percaya pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan kenyataan Indonesia yang *bhinneka*. Dalam konteks Indonesia yang *hinneka* itu, Bung Karno menyerukan agar masing-masing golongan bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan.¹⁰⁷ Persatuan itu akan menumbuhkan paham kebangsaan. Alat untuk memajukan persatuan atau paham kebangsaan adalah bahasa, yakni bahasa Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bung Karno meyakini bahwa prinsip kebangsaan atau rasa sebagai bangsa Indonesia menjadi modal utama dalam mencapai kemerdekaan. Perjuangan yang dimotori oleh rasa kebangsaan yang menggelora menjadi ruh Persatuan Indonesia. Akan tetapi, pentingnya persatuan Indonesia juga berangkat dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia perlu bersatu untuk maju dalam membangun dan mengisi alam kemerdekaan. Oleh karena itu, pluralitas sosio-religius Indonesia (suku, agama, dan golongan) akan menjadi kekuatan untuk maju bersama manakala ada kesadaran akan geopolitik, yakni kesadaran yang mencakup seluruh wilayah dan unit-unit suku bangsa yang tersebar di seluruh bekas daerah jajahan Belanda. Bagi Sukarno, perpaduan antara kehendak untuk hidup bersama, persamaan watak, dan kesatuan dari semua unit di atas satu wilayah yang nyata itu dimungkinkan karena adanya rasa kebangsaan. Dalam konteks rasa kebangsaan itu, bahasa berperan sebagai alat untuk menumbuhkan solidaritas sosial, kehendak hidup bersama, dan persamaan watak berdasarkan pengalaman bersama. Rasa kebangsaan, yakni merasa bagian utuh dari bangsa Indonesia adalah kekuatan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian itu, rasa kebangsaan acapkali dimaknai sebagai cinta pada tanah air. Ungkapan demikian tentu selalu memiliki relevansi bagi Indonesia.

¹⁰⁷ Kata Bung Karno. "Kalau sekadar bagian daripada unit, bukan bangsa! Minangkabau bukan bangsa. Solo bukan bangsa. Yogya bukan bangsa. Bugis bukan bangsa. Madura bukan bangsa. Bali bukan bangsa. Lombok bukan bangsa". Lih. *Ibid.*, hal. 168.

Bila cinta kepada tanah air diyakini sebagai makna terdalam sila ketiga, kehidupan yang selaras dengan itu bukan hanya menyangkut tidak melakukan gerakan disintegratif, tapi juga bagaimana menjadi warga Negara Indonesia yang mampu berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan dan wibawa Negara Indonesia di tingkat internasional. Dalam pengertian itu, segala bentuk tindakan yang menghancurkan, memalukan, dan merugikan bangsa Indonesia seperti korupsi, konflik sosial, diskriminasi, dan eksploitasi lingkungan hidup sungguh merusak nilai Persatuan Indonesia.

Dalam konteks cinta tanah air atau menghayati paham kebangsaan, perlu adanya sikap rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Akan tetapi, sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa bukan hanya dilakukan dengan angkat senjata, tapi juga angkat kualitas diri dalam pendidikan dan memiliki mentalitas yang kuat mampu menolak godaan korupsi dan bertekad untuk mengabdikan kepada ibu pertiwi melalui karya nyata dalam berbagai ranah kehidupan (politik, ekonomi, pendidikan, dll). Dalam kerangka itu, relevansi paham kebangsaan tampak menunjukkan cinta tanah air.

3.3.4 Aspek Demokrasi

Pluralitas adalah kekuatan untuk pembangunan Negara Indonesia. Dalam konteks itu, perlu adanya tata kelola yang tepat agar negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Berkaitan dengan hal itu, Sukarno menegaskan pentingnya syarat berupa permusyawaratan, perwakilan.¹⁰⁸ Artinya, sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Menurut Sukarno, demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk Indonesia tidak perlu identik dengan yang berlaku di negara-negara lain. Demokrasi di Indonesia hendak dimaksudkan untuk mewujudkan satu masyarakat keadilan sosial. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat yang dimaksudkan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tekanannya adalah agar para pemimpin negeri ini memimpin rakyat dalam terang cahaya kebijaksanaan yang digapai melalui proses demokrasi yang mengedepankan permusyawaratan/perwakilan.

Bila kebijaksanaan adalah nilai yang membingkai proses berdemokrasi di Indonesia, proses untuk mencapainya adalah permusyawaratan dan perwakilan. Dalam kerangka itu pula, kejujuran, keadilan, dan kebenaran adalah ruh yang menjiwai tata kelola kehidupan yang demokratis itu. Dalam konteks itu, demokrasi dalam ranah politik hendaknya

¹⁰⁸Kata Sukarno, *"saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan"*. Lih. Sukarno, 1964. hal. 25.

menjunjung kedaulatan rakyat sehingga mekanisme pengambilan keputusan demokratis oleh para elit politik selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Kebijaksanaan sebagai kandungan nilai yang hendak dicapai melalui proses permusyawaratan dan perwakilan tetap relevan untuk demokrasi di Indonesia. Apa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan sesungguhnya adalah ketika para elit politik memiliki kemauan untuk duduk bersama dalam spirit kesetaraan peran dan kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan perbedaan pandangan, menunaikan tugas dan kewajiban dengan jujur, benar, terbuka, dan adil.

3.3.5 Aspek Keadilan Sosial

Di atas telah disinggung bahwa demokrasi Indonesia hendak dimaksudkan untuk mewujudkan suatu masyarakat keadilan sosial. Dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan rakyat adalah “hukum tertinggi”. Bila rakyat berdaulat atas dirinya sendiri, hidupnya diliputi oleh keadilan sosial. Bila rakyat mengalami keadilan sosial, ia akan dapat menikmati kesejahteraan sosial.

Prinsip keadilan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Gagasan keadilan sosial yang diusung Bung Karno memang erat terkait dengan gagasan Ratu Adil. Pada dasarnya, gagasan keadilan sosial berlandaskan kenyataan yang dialami oleh segenap rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan harapan bangsa Indonesia untuk menikmati kehidupan yang sejahtera dan makmur di alam kemerdekaan. Artinya, gagasan keadilan sosial ini adalah hasil refleksi kritis Bung Karno terhadap kenyataan hidup rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda dan sekaligus merupakan suatu cita-cita yang mesti diwujudkan oleh dan untuk segenap rakyat Indonesia di alam kemerdekaan. Rakyat yang telah sekian lama kurang sandang, pangan, papan, dan terabaikan dalam pendidikan akibat penjajahan secara bahu-membahu atau bergotong royong mewujudkan suatu keadaan sejahtera untuk bersama. Dalam konteks itu, tugas pemerintah negeri ini memang mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi segenap anak negeri. Tapi bila pemerintah belum mampu mewujudkannya, tugas tersebut juga menjadi tanggungan bersama.

Selanjutnya, gagasan keadilan sosial atau “Ratu Adil” ini dikembangkan dan dimaknai oleh Sukarno secara lebih jauh sebagai sosialisme Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila. Keyakinan Sukarno adalah bahwa, sosialisme Indonesia akan tercapai jika demokrasi Indonesia tidak mengikuti demokrasi Barat, tapi demokrasi yang mengedepankan prinsip permusyawaratan, perwakilan, yang di dalamnya ada kekeluargaan dan gotong royong.

Tampak bahwa yang ditekankan Sukarno untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong. Gagasan demikian tentu selalu relevan untuk Indonesia. Bukan saja karena kekeluargaan dan gotong-royong merupakan suatu nilai kehidupan komunitas sosial yang bersifat turun-temurun, tapi karena motivasinya adalah untuk memajukan taraf hidup komunitas. Intinya adalah di negara Indonesia merdeka, segenap rakyatnya hidup layak dan manusiawi. Dalam perspektif itu, seruan Bung Karno agar di negara Indonesia merdeka terwujud keadilan sosial dalam pengertian kondisi *“suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. ...Semuanya bahagia, cukup sandang, cukup pangan, “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”*, tetap relevan. Nilai yang menjiwalkannya adalah kekeluargaan dan gotong royong demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Pada prinsipnya, itulah spirit yang semestinya menggerakkan roda perekonomian Indonesia, yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi oleh Bung Hatta.

Tuntutan prinsip keadilan dalam konteks demokrasi ekonomi di Indonesia adalah bagaimana segenap manusia di Indonesia menjadi pribadi yang solider atau peduli kepada pihak-pihak yang tidak berdaya agar keluar dari kondisi-kondisi hidup yang sungguh tidak manusiawi. Spirit keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya berdimensi materil menyangkut pembangunan fisik negeri ini, tapi juga berdimensi spiritual atau mental. Artinya, menyangkut solidaritas sosial, kemurahan, dan kebaikan hati masing-masing pribadi. Sila kelima menyerukan pentingnya manusia di Indonesia menjadi pribadi yang tidak egois, tapi solider. Artinya, manusia di Indonesia diharapkan bertumbuh dalam sikap peduli kepada sesamanya yang miskin dan berkehendak baik untuk membantunya keluar dari kondisi tersebut. Tentu ini bukan berarti bahwa orang miskin tidak perlu bekerja, tapi bagaimana orang yang kaya atau orang mampu secara ekonomis dapat meringankan

beban kehidupan yang miskin. Begitulah nilai kekeluargaan dan gotong royong itu diwujudkannyatakan.

3.4 Penutup

Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan mesti dimaknai sebagai suatu istilah yang hendak mendeskripsikan bagaimana peranan vital Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Istilah tersebut hendak mendeskripsikan dan sekaligus mengusung gagasan bahwa Pancasila hendaknya menjadi ruh kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ranah hukum dan perundang-undangan, Pancasila adalah ruhnya. Perumusan hukum dan perundang-undangan di Indonesia dikatakan bersumber dari nilai-nilai Pancasila atau Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, Pancasila menjiwai dan menghidupkan segala peraturan di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan sebutan lain yang dialamatkan pada Pancasila. Misalnya, sebutan bahwa Pancasila adalah filsafat, ideologi, pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengilustrasikan peranan penting Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, tuntutan Pancasila dalam praksis kehidupan adalah bagaimana nilai-nilai mendasarnya dihayati, diwujudkan, dan diamalkan dalam karya nyata. Artinya, seluruh gerak langkah kehidupan bangsa Indonesia mengikuti nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan Pancasila. Dalam pengertian itu Pancasila disebut menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan upaya kami mengkaji pandangan Sukarno tentang Pancasila. Setelah kami membaca dan menganalisis pandangan-pandangan Sukarno tentang Pancasila, kami memaparkan nilai-nilai mendasar Pancasila yang kami maksudkan sebagai spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perspektif itu, Pancasila kami tempatkan sebagai ruh kehidupan atau *'elan vital'* bangsa Indonesia.

Sukarno menyebut Pancasila sebagai yang bersumber dari elemen-elemen jiwa masyarakat Indonesia. Sebutan demikian tentu dapat dimaknai dari berbagai kebutuhan studi. Tapi bagi kami sebutan itu semakin jelas menunjukkan bahwa Pancasila sesungguhnya adalah ruh yang menggerakkan dan menghidupkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.

Tentu ada aneka ragam pemaknaan atas Pancasila sesuai dengan pendekatan studi dan penekanan masing-masing pihak yang mengkajinya. Bagi kami hal itu wajar sebab Pancasila tidak terjadi *exnihilo*. Pancasila merupakan hasil renungan terdalam Bung Karno atas kehidupan masyarakat Indonesia.

Apa yang kita sebut Pancasila menurut Bung Karno merupakan buah refleksi atau semadi politiknya mengenai nilai-nilai yang menjadi orientasi kehidupan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan. Menurut Sukarno, nilai-nilai yang dikristalisasinya sebagai Pancasila itu merupakan hasil renungan atau semadinya di bawah pohon sukun di Ende, saat ia menjalani hukum buang di pulau Flores. Secara politis, nilai-nilai yang sudah ia batinkan dalam keheningan semadi politiknya selama di Ende itu, pada saat yang tepat, dikumandangkannya sebagai jawaban atas pertanyaan Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI, yang dalam sidang itu mempertanyakan mengenai, "Apakah yang menjadi dasar Indonesia merdeka"?

Pertanyaan ketua BPUPKI itu tentu diajukan untuk segenap bangsa Indonesia pada umumnya, dan para anggota BPUPKI khususnya yang merupakan wakil-wakil dari hampir seluruh daerah dan golongan. Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah tanggapan dan sekaligus jawabannya atas pertanyaan tersebut. Setelah menguraikan pandangan-pandangannya, Sukarno menyebut atau menamakan prinsip-prinsip Indonesia yang diajukannya itu dengan istilah Pancasila.

Secara historis kita temukan bahwa, proses perumusannya Pancasila memang tidak sekali jadi. Prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Sukarno memang ideal, tapi bukan tanpa tanggapan kritis dari berbagai pihak atau golongan tertentu. Sebelum terumuskan seperti yang ada saat ini, rumusan Pancasila pernah terpatri dalam apa yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, rumusan Pancasila menampilkan 7 kata yang menimbulkan pro dan kontra, yakni “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Bagi golongan non-Islam tertentu, rumusan ini tampak diskriminatif, yang kalau tidak segera diubah pada masa itu dapat mengancam keutuhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya.

Kita patut berterimakasih dan memuji ketangkasan dan kecerdasan serta kerendahan hati para tokoh yang dipimpin oleh M. Hatta untuk mengevaluasi kembali rumusan yang termuat dalam Piagam Jakarta itu dan menyusun rumusan yang baru, yang kemudian disahkan oleh Sukarno pada tanggal 18 Agustus 1945 dan jadilah rumusan Pancasila seperti yang ada hingga saat ini.

Sejarah perumusan Pancasila dengan sendirinya menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pilihan prinsip politik terbaik pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, kita patut mengucapkan terimakasih kepada para intelektual yang menjadi wakil-wakil dari segenap daerah dan golongan di Indonesia yang berkenan menerima Pancasila berdasarkan konsensus. Artinya, Pancasila adalah konsensus politik di antara para wakil-wakil yang menjadi anggota BPUPKI, para intelektual yang memiliki komitmen tinggi untuk merancang dan mendirikan negara Indonesia merdeka.

Sebagai konsensus politik, Pancasila menjadi orientasi kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menggerakkan kehidupan atau dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi daya utama aktivitas sosial-politik di Indonesia.

Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia mengisyaratkan adanya nilai yang mendasari dan menggerakkan orientasi masyarakat Indonesia. Dalam perspektif itu, sila-sila Pancasila menjadi ruh yang menjiwai gerak perkembangan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Sila pertama dari Pancasila menjiwai penghayatan religiusitas bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan imperatif etis untuk bangsa Indonesia agar bersikap mengakui dan

menerima keberadaan pihak lain, agama lain. Dalam perspektif itu, sila pertama tersebut menyerukan pluralisme dan fakta pluralitas di Indonesia. Dalam konteks itu, hormat pada kehidupan sesama manusia dalam arti seluas-luasnya adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia agar kebhinnekaan menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Sila kemanusiaan seperti yang ditegaskan dalam sila kedua dari Pancasila mengedepankan penghargaan pada martabat manusia. Di sini manusia dipandang sebagai subjek yang tidak dapat direndahkan derajatnya sebagai objek. Oleh karena itu, nilai mendasar di balik sila ini adalah persaudaraan universal. Artinya, Pancasila menggerakkan manusia di Indonesia untuk bersaudara dengan bangsa-bangsa di seantero dunia.

Dalam sila ketiga dari Pancasila tampak bahwa Indonesia yang *bhinneka* itu merupakan kekuatan bagi kemanusiaan universal. Implementasi nilai-nilai sila pertama dan kedua adalah berakar di bumi Indonesia. Bila Indonesia yang *bhinneka* itu mampu saling terbuka, menerima dan mengakui satu sama lain maka paham kebangsaannya kuat. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat dan bercorak pluralisme itu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bebas dari pikiran picik dan sempit, dan berkembang menjadi bangsa yang solid dalam membangun kebersamaan yang luas di atas keberagaman. Dengan cara demikian, bangsa Indonesia akan luput dari konflik horizontal, dan semakin nyata menjadi kekuatan untuk memajukan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, pembangunan bangsa dan implementasi wawasan kebangsaan yang bercorak pluralisme penting menjadi agenda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sila keempat kita belajar bahwa manusia yang bijaksana adalah kata kunci menuju demokrasi yang sehat dan kuat. Kebijaksanaan adalah suatu nilai mendasar yang menjiwai Pancasila. Sila keempat menunjukkan bahwa permusyawaratan dan perwakilan sebagai cara yang ditempuh dalam kerangka kepemimpinan yang bijaksana. Perspektif demikian menunjukkan bahwa praksis berdemokrasi di Indonesia bercorak kolektif tanpa mengabaikan manusia sebagai makhluk individual. Dalam spirit sila keempat ini, pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh kedaulatan rakyat, partisipasi segenap rakyat dalam proses berdemokrasi, adanya kontrol yang jelas atau akuntabilitas dalam mekanisme

demokrasi, dan adanya komitmen bersama agar menjunjung persamaan peluang atau kesempatan (*equality*) untuk berkontribusi dalam proses berdemokrasi.

Sementara itu, sila kelima dari Pancasila hendak menyasar perkara keadilan sosial. Prinsip yang dikedepankan adalah keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu, kedaulatan rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yakni suatu keadaan di mana segenap rakyat Indonesia hidup layak dan manusiawi atau diliputi oleh kemakmuran dan kesejahteraan. Implementasinya dalam praksis kehidupan, segenap bangsa Indonesia hendaknya bersolidaritas satu terhadap yang lain. Pihak yang kuat hendaknya memiliki kepedulian sosial terhadap pihak yang lemah atau pihak yang kaya menopang kehidupan pihak yang tidak kaya. Pada intinya adalah agar bangsa Indonesia bergotong royong dan hidup dalam kekeluargaan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, 2006. Pancasila dan Pemaknaannya, dalam Ika Dewi Ana, dkk (ed.), 2006. *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila*, Yogyakarta, Aditya Media bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
- Adams, Cindy. 2014, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Penerjemah Syamsu Hadi. Edisi Revisi Cetakan ketiga, Yogyakarta, Media Presindo dan Yayasan Bung Karno.
- Ata Ujan, Andre, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bertens, K, 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Jogjakarta: Kanisius.
- Chang, William, 1997. *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*, Claretian Publications, Quezon city, Philippines.
- Chaplin, J.P, 1968. *Dictionary of Phsicology*, terjemahan. Kartini-Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakker, Anton and Achmad Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Collins, Gerald O SJ dan Edward G. Farrugia, SJ, 1991. *A Concise Dictionary of Theology*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Drijarkara, N. SJ,. *Pancasila dan Religi*, dalam Kumpulan Karangan yang Pernah dimuat Dalam Majalah BASIS.
- Garvey, James, 2010. *20 Karya Filsafat Terbesar*, Kanisius, Yogyakarta.
- Goulet, Denis, 1995, *Development Ethics: A Guide to Theory and Practice*, New York: The Apex Press.
- Hatta, Mohammad, 1955. *Islam, Society Democracy and Peace, The Indian Council of World Affairs*, New Delhi.
- Heidegger, Martin, 1962. *Being and Time*, San Francisco: Herper.
- Heuken, A. SJ, 2005. *Ensiklopedi Gereja Jilid VIII Sel-To*, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Ismaun, 1970. *Tinjauan Pantjasila Dasar Filsafat Negara Indonesia (dalam rangkaian tjita2 dan sedjarah perjuangan kemerdekaan*, Bandung: Penerbit "Carya Remadja".
- Jacobs, Tom, SJ, 2002. *Paham Allah*, Yogyakarta, Kanisius.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1983. Jakarta, Balai Pustaka.
- Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2, 2000, *Kemerdekaan dan Demokrasi*, Jakarta, LP3ES.
- Latif, Yudi, 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia,
- Mubyarto, 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta, LP3ES.
- Notonagoro, Prof. Dr. Mr, Drs, 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Bina Aksara.
- Oesman, Oetojo dan Alfian, 1991. Pendahuluan, dalam *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP-7 Pusat.
- Pranarka, A.M.W, 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta, CSIS.
- Purwadi, Slamet, dkk., 2007. *Pendidikan Nilai Pancasila*, Unpar Press, Bandung.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rohmat Mulyana, 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, ALFABETA.
- Samho, Bartolomeus, 2012. *Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dalam *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992. Risalah BPUPKI-PPK.
- Sen, Amartya, 2009. *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
- Seri Buku Tempo: BAPAK BANGSA, 2010. *Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan TEMPO, Jakarta.
- Seri Buku Tempo: BAPAK BANGSA, 2010. *Sjahir: Peran Besar Bung Kecil*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan TEMPO, Jakarta.
- Seoharto, 1974. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Masyarakat Perguruan Tinggi*, dalam Ika Dewi Ana, dkk (ed.), 2006. *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila*, Yogyakarta, Aditya Media bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
- Soekarno, Ir, 2006. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas.
- Sukarno, 1964, *Tjamkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara*, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964.
- Subagyo, Rachmat, 1955. *Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius.

Sugiharto, Bambang I & Agus Rachmat W, 2000. *Wajah Baru Etika & Agama*, Yogyakarta, Kanisius.

Swasono, Sri Edi, 1991. *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, BP7 Pusat, disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian.

Tim Nusa Indah, 2015. *Bung Karno dan Pancasila, Ilham Dari Flores untuk Nusantara*, Ende, Nusa Indah.